

Media Politik dan Dakwah

# al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

## BAHAYA LATEN NEO-PKI/KOMUNISME

*Menanamkan  
Ideologi Islam  
dalam Keluarga*

**Ekonomi  
Sosialisme  
versus  
Ekonomi  
Islam**



H.M. Ismail Yusanto:  
**TETAP WASPADAI  
KOMUNISME**

## MUTIARA DOĞU BEYAZIT: ISTANA ISHAK PASHA BAGIAN 1

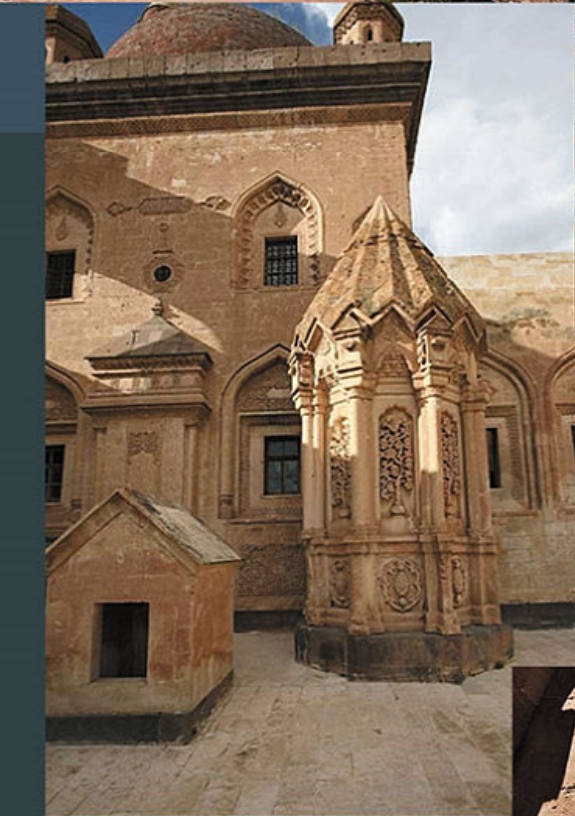
al-wa'ie



Sumber:

<https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/dogu-beyazitin-incisi-ishak-pasa-sarayi/2>

Istana Ishakpaşa terdiri dari 116 kamar. Dibangun oleh kepala suku Doğubeyazıt Sarjak Çolak Abdi Pasha pada tahun 1685 di tebing curam. Jaraknya 7 kilometer jauhnya dari distrik. Selesai dibangun pada tahun 1784 pada masa pemerintahan putranya, Ishak Pasha. Istana ini sangat populer setiap tahun dengan mausoleum, masjid, tembok, halaman, bangsal, dipan dan aula haremnya, menyambut banyak turis lokal dan asing.



Terletak di Ağrı, yang digambarkan sebagai "jalan peradaban". Ini adalah istana terbesar kedua di Turki setelah Istana Topkapı. Istana Ishak Pasha tampak seperti sarang elang dibangun di atas bukit yang menghadap ke Doğubeyazıt di ketinggian 2.000.

Istana Ishak Pasha, 5 kilometer dari Doğubeyazıt, dikenal sebagai tempat sistem pemanas pertama di dunia juga digunakan. Istana ini diibaratkan sarang elang. Istana yang dibangun oleh Doğubeyazıt Sarjak Bey Çolak Abdi pada tahun 1685 dan diketahui telah bertahan selama 99 tahun ini sangat penting dalam hal pariwisata daerah. Istana ini salah satu contoh arsitektur Turki terindah.



## Daftar Isi

### Iqtishadiyah: Ekonomi Sosialisme versus Ekonomi Islam

Ekonomi Sosialisme sering dianggap antitesis dari ekonomi Kapitalisme-liberal. Karena itu sistem ekonomi sosialis kerap dianggap sama persis dengan sistem ekonomi Islam yang juga sama-sama kontradiktif dengan sistem ekonomi kapitalis-liberal. Betulkah demikian?

### Hiwar: Tetap Waspadaai Komunisme

46

Komunisme memang telah lama runtuh. Pengusung utamanya, Uni Sovyet, sudah lama bubar. Negara kedua setelah Uni Sovyet, yakni Cina saat ini, juga sudah tidak sepenuhnya mengusung ideologi Komunisme. Namun demikian, sebuah ideologi—termasuk Komunisme—berpotensi untuk bangkit kembali. Karena itu umat Islam di Indonesia khususnya harus tetap mewaspadai Komunisme/Neo-PKI. Itulah di antara yang dibicarakan pada rubrik *Hiwar* kali ini.

57

### *Baiti-Jannati:* Menanamkan Ideologi Islam dalam Keluarga

38

Islam tentu berbeda dengan agama-agama lain. Islam bukan agama yang bersifat ritual dan spiritual belaka. Dalam hal ini, setiap keluarga Muslim tentu harus berupaya menanamkan ideologi Islam di tengah keluarganya masing-masing. Inilah yang dibahas dalam rubrik *Baiti-Jannati* kali ini.

<i>Pengantar</i> .....	2	Terhadap Masjid al-Haram .....	42
<i>Dari Redaksi: Islam Kekuatan Kita!</i> .....	3	<i>Lintas Dunia</i> .....	44
<i>Opini</i> .....	5	<i>Hiwar: Ust M Ismail Yusanto: Tetap Waspadaai Komunisme</i> .....	46
<i>Muhasabah: Membaca Arah Demokrasi Indonesia</i> .....	7	<i>Siyasah Dakwah: Sejarah Merah Komunisme Di Indonesia (Ragam Kejahatan PKI Terhadap Islam &amp; Kaum Muslim di Negeri Ini)</i> .....	51
<i>Fokus: Mewaspadai Kebangkitan Kembali Gerakan Komunis Di Indonesia</i> .....	9	<i>Iqtishadiyah: Ekonomi Sosialisme versus Ekonomi Islam</i> .....	57
<i>Analisis: Bahaya Keppres 17/2022 &amp; Inpres 2/2023</i> .....	14	<i>Ibrah: Tobat</i> .....	62
<i>Afkar: Sejarah Kebiasaan Komunisme Di Berbagai Negara</i> .....	20	<i>Tafsir: Memenangkan Islam Atas Seluruh Agama</i> .....	64
<i>Catatan Dakwah: Merdeka</i> .....	23	<i>Telaah Kitab: Negara Wajib Menjamin Distribusi Kekayaan Secara Adil (Telaah Kitab Muqaddimah ad-Dustûr Pasal 157)</i> ..	68
<i>Soal Jawab: Bagaimana Spirit Islam Melawan Penjajahan?</i> .....	26	<i>Hadis Pilihan: Syubhat Dalil Kebolehan Kanz Al-Maal Selama Dekeluarkan Zakatnya</i> .....	72
<i>Nafsiyyah: 'IBÂD AR-RAHMÂN: Terdepan Dalam Kebenaran</i> .....	29	<i>Takrifat: Keumuman (redaksi) Itu Sesuai Topik Peristiwa Dan Permasalahannya</i> .....	74
<i>Nisa: Women, Peace and Security, dan Kepentingan Penjajahan Barat</i> .....	32	<i>Dunia Islam: Konstituante: Menggemakan Ideologi Islam</i> .....	77
<i>Fikih: Cenderung Kepada Orang Zalim</i> .....	35	<i>Tarikh: Jejak Khilafah Di Sulawesi Menyibak Jalinan Politik &amp; Spiritual yang Dilupakan (9)</i> ..	79
<i>Baiti Jannati: Menanamkan Ideologi Islam dalam Keluarga</i> .....	38		
<i>Atsar: Pelayanan Khilafah Utsmaniyah</i>			

# Pengantar

*Assalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.*

Pembaca yang budiman, trauma bangsa ini atas kekejaman Gerakan 30 September/PKI (Partai Komunis Indonesia), juga sejumlah pemberontakan para pengusung ideologi Komunisme sebelumnya di Tanah Air, tentu tak akan mudah hilang begitu saja. Sejumlah jenderal TNI tewas mengenaskan di tangan PKI. Mereka dibunuh dengan kejam. Sejumlah ulama, para santri dan ribuan kaum Muslim dibunuh dengan sadis. Jelas, korban dari kekejaman PKI/Komunisme di Indonesia adalah umat Islam dan TNI.

Anehnya, belakangan keluar Keppres dan Inpres terkait pelanggaran HAM berat, yang diduga berpotensi untuk membalikkan sejarah. Sangat boleh jadi, berdasarkan Kppres dan Inpres tersebut, PKI dianggap sebagai korban. Sebaliknya, TNI dan umat Islam berpotensi dituding sebagai pelaku. Sebelum keluar Keppres dan Inpres tersebut, Pemerintah didorong untuk menyatakan permintaan maaf kepada korban Peristiwa G 30 S PKI. Siapa yang dimaksud korban? Tentu, dalam pandangan mereka, adalah PKI dan anak keturunannya.

Jelas, keberadaan Keppres dan Inpres tersebut sangat berbahaya. Hal ini sekaligus juga menjadi isyarat bahwa bahaya laten Komunisme (Neo-PKI) bukan isapan jempol. Apalagi realitas politik belakangan mirip dengan kondisi menjelang Peristiwa G 30 S PKI. Umat Islam kerap dituding anti-Pancasila. Mereka yang kritis terhadap Pemerintah dijuluki kadrun, anti-NKRI, radikal, dll. Umat Islam pun kerap diadu-domba. Semua mirip. Pelakunya siapa lagi kalau bukan agen-agen dan para simpatisan Komunisme (Neo-PKI).

Karena itu jelas, segenap komponen umat Islam, terutama para ulama dan para tokohnya, harus benar-benar waspada. Tidak boleh tinggal diam. Pemerintah harus terus dikontrol dan dikawal ketat. Jangan sampai peluang bagi kebangkitan kembali Komunisme di negeri ini justru difasilitasi oleh Pemerintah. Sadar atau tidak sadar. Sebabnya, jika langkah-langkah kalangan Neo-PKI tidak diwaspadai dan tidak segera dihentikan, tidak menutup kemungkinan umat Islam akan kembali menjadi korban keganasan mereka.

Di seputar itulah tema utama *al-wa'ie* kali ini. Selain tema menarik lain lainnya. Selamat membaca!

*Wassalâmu 'alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.*

**Penerbit:** Pusat Studi

Politik Dan Dakwah

Islam **Alamat :** Gedung

Graha Mampang Lt-1 -

Suite 101. Jl.

Mampang Prapatan

Raya Kav. 100, Jakarta

Selatan

e-mail: redaksialwaie

@gmail.com **Pemimpin**

Umum: M. Anwari.

**Pemimpin Perusahaan**

dan Keuangan: M.

Anwari **Pemimpin**

Redaksi: Ibnu Faruq.

**Redaktur Pelaksana:**

M. Arief Billah.

**Redaktur:** Abu Umam,

Yahya Abdurrahman.

**Layout:** reeun.

**Pemasaran:** Tedi

**Harga:** Rp. 10.000,- (P.

Jawa) dan Rp.

14.000,- (Luar P.

Jawa).

## ISLAM KEKUATAN KITA!

Pada bulan September kita selalu diingatkan tentang peristiwa pahit yang pernah terjadi di negeri ini: pemberontakan Partai Komunisme Indonesia (PKI). Banyak umat Islam yang menjadi korban, termasuk ulama. Tentu ada pula pihak yang sebenarnya tidak bersalah, turut menjadi korban. Namun, PKI adalah pelaku utamanya, dan umat Islam menjadi korbannya. Posisi ini perlu kita tegaskan. Pasalnya, ada upaya pemutarbalikan sejarah, bahkan pengaburan. Seolah-olah PKI adalah korban, sementara pelakunya adalah ulama bersama TNI.

Tentu semua peristiwa politik di negeri ini tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik internasional saat itu, termasuk peran negara-negara Barat seperti Amerika, yang punya kepentingan besar yang jahat di negeri ini.

Ada satu hal yang perlu kita tegaskan kembali, bahwa Islamlah yang menjadi kekuatan utama kita saat menghadapi PKI yang memang mendapatkan 'ruang politik' yang leluasa pada era Soekarno. Bukan hanya melakukan propaganda Komunisme yang sesat dan anti agama, PKI juga melakukan tindakan-tindakan provokasi, adu domba, hingga pembunuhan.

Islam, dengan prinsip tauhid yang jelas-jelas mengakui keberadaan Allah SWT sebagai *Al-Khaaliq* dan *Rabb al-'alamiin*, telah menjadi penghalang utama PKI yang anti agama. Islam menjadi kekuatan negeri ini. Bukan hanya saat

menghadapi PKI pada era Orde Lama. Bisa disebut, hampir dalam sejarah perjuangan negeri ini, Islamlah yang menjadi kekuatan utama.

Pada era kolonialisme, Islam dengan prinsip jihad fi sabilillah menjadi faktor utama perlawanan terhadap penjajahan. Sebabnya, dalam Islam, negeri ini adalah negeri kaum Muslim yang harus dipertahankan!

Islam juga adalah agama yang mengharamkan diam terhadap segala bentuk kejahatan dan kezaliman, termasuk penjajahan. Sangat jelas dalam Islam bahwa wajib hukumnya melawan penjajahan kafir imperialis yang menduduki negeri ini, merampok kekayaan alama dengan rakus, menindas, bahkan melakukan pembantaian terhadap umat negeri ini.

Jihad dalam makna syariah, yakni berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah, adalah bagian dari ajaran syariah Islam yang wajib hukumnya. Kewajiban jihad dalam pengertian perang ini ditegaskan Allah SWT dalam al-Quran. Allah SWT, antara lain, berfirman (yang artinya): *Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, (tetapi) janganlah kalian melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* (TQS al-Baqarah [2]: 190).

Jihad fi sabilillah ini bahkan merupakan ajaran yang mulia. Allah SWT mempertanyakan mereka yang mengingkingkan masuk surga tetapi enggan berperang di jalan-Nya. Allah SWT berfirman

(yang artinya): *Apakah kalian mengira akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan belum nyata orang-orang yang sabar* (TQS Ali 'Imran [3]: 142).

Rasulullah saw. juga bersabda bahwa jihad adalah adalah puncak ajaran Islam. Sabda beliau, "...*Pokoknya perkara adalah Islam. Tiangnya adalah shalat. Puncaknya adalah jihad fii sabilillaah.*" (HR Ahmad dan at-Tirmidzi).

Beliau pun bersabda, "*Orang yang menjaga di tapal batas sehari semalam lebih baik daripada puasa dan shalat malam selama sebulan. Jika ia mati, mengalirlah (pahala) amal yang biasa ia kerjakan; ia diberi rezeki serta dilindungi dari adzab (siksa) kubur dan fitnahnya.*" (HR Muslim).

Ajaran Islam inilah yang menjadi kekuatan utama umat Islam melawan penjajahan!

Perjuangan meraih dan mempertahankan kemerdekaan juga tidak bisa dilepaskan dari ajaran Islam sebagai kekuatan utamanya. Perlawanan melawan kembalinya kolonial Belanda di Surabaya tidak bisa dilepaskan dari "Resolusi Jihad" KH Hasyim Asy'ari yang memerintahkan berperang melawan penjajah sebagai wajib hukumnya. "*Berperang menolak dan melawan pendjadjah itoe fardloe 'ain (jäng haroes dikerdjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata ataoe tidak) bagi jäng berada dalam djarak lingkaran 94 km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh. Bagi orang-orang jäng berada di loear djarak lingkaran tadi, kewadjiban itu djadi fardloe kifajah (jäng tjoekoep, kalaoe dikerdjakan sebagian sadja)...*"

Saat merumuskan bagaimana Indonesia ke depan setelah merdeka, para ulama pun berjuang keras untuk menjadikan Islam sebagai asas negara yang mengatur negeri ini. Saat itu, para ulama menentang asas sekuler yang ingin menjauhkan Islam dari negeri ini, yang diusulkan kelompok-kelompok sekuler.

Sayang, perjuangan menjadikan Islam sebagai asas negara ini digagalkan lewat 'intrik politik' pada era perumusan persiapan kemerdekaan Indonesia

yang ditandai dengan penghapusan Piagam Jakarta. Namun demikian, perjuangan terus, dilanjutkan dalam perjuangan politik di Dewan Konstituente tahun 1956-1959. K.H. Masjkur dari Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) saat itu dengan gamblang menjelaskan Islam sebagai *way of life*, bukan sekadar agama ritual dan memenuhi syarat sebagai sebuah negara modern. "*Memang sesungguhnya Saudara Ketua, unsur-unsur Islam bagi hidup dan penghidupan manusia tidak sadja mempunjai sjarat-sjarat dunia modern, tetapi djuga sudah diakui bahwa dunia Islam itu bukan semata-mata agama dalam arti ibadat sadja, tetapi suatu "way of life", suatu djalan hidup.*"

Keinginan yang tegas agar Islam dijadikan asas negara juga dinyatakan oleh KH Masjkur dengan sangat jelas: "*Bagi Nahdlatul Ulama (N.U.) dan kawan-kawan seideologi Islam, memperdjungkan Islam sebagai Dasar Negara adalah keharusan dan kewadjiban jäng mutlak.*"

Mengapa para ulama memperjuangkan Islam? Tentu karena hanya Islam inilah yang akan menyelamatkan negeri ini. Hanya Islam yang bisa membebaskan negeri ini dari penjajahan fisik maupun penjajahan politik, ekonomi, sosial budaya, yang masih berlangsung hingga kini. Karena itu sangat tidak masuk akal kalau saat ini ada upaya-upaya sistematis untuk menghalangi perjuangan umat Islam untuk menegakkan syariah Islam. Bahkan ada kriminalisasi perjuangan terhadap syariah Islam dengan menyebutnya sebagai radikal bahkan teroris. Tuduhan keji ini tentu akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Dengan syariah Islam inilah negeri ini akan bangkit dan maju, selamat dunia dan akhirat. Karena Islam inilah kita mulia! Sebagaimana pernyataan Khalifah Umar bin al-Khatthab ra., "*Sungguh, dulu kita adalah kaum yang hina. Lalu Allah memuliakan kita dengan Islam. Maka dari itu, jika kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, niscaya Allah bakal menghinakan kita.*"

*Allaahu Akbar!* [Farid Wadjudi]

# Opini

Pembaca

## PINJOL CEKIK WONG CILIK

**Hilmy Abu  
Fabian**  
(Indonesia  
Justice Monitor)

Heboh seorang mahasiswa UI membunuh juniornya. Terungkap, pelaku diduga terlilit pinjol dan iri dengan korban. Tersangka Altafasalya Ardника Basya alias AAB (23) akhirnya mengaku telah

membunuh adik tingkatnya di Universitas Indonesia (UI), Muhammad Naufal Zidan alias MNZ (19), karena ingin menguasai harta korban. Tersangka membunuh lalu mengambil barang korban karena terlilit utang pinjaman *online* (pinjol) dan harus membayar kos.

Kasus ini adalah fenomena gunung es. Banyak masalah yang dialami para nasabah yang gagal bayar. Banyak yang mulai tercekik. Sebagian menutupi utang pinjol dengan berutang pada pinjol lain. Ini yang membuat hidup mereka makin susah. Sebagian warga yang putus asa bahkan bunuh diri. Tercatat sudah ada 12 warga bunuh diri akibat tercekik utang pinjol.

Pinjol ribawi menjadi problem serius di negeri ini. Maraknya penyedia jasa pinjol tidak lepas dari kondisi masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Ada yang karena tekanan ekonomi. Ada pula yang memang untuk membiayai gaya hidup. Keadaan ini ditangkap oleh para pengusaha berotak kapitalis sebagai peluang investasi pinjol.

Jumlah orang yang terjerat pinjol semakin bertambah setiap tahunnya. Saat ini riba adalah bagian dari sistem ekonomi Kapitalisme. Para kapitalis, seperti para pemilik bank, menjadikan pinjaman sebagai investasi untuk memperkaya diri dengan mengeksploitasi ekonomi orang lain dengan pinjaman berbunga yang mencekik.

Masalah pinjol sebenarnya adalah praktik ribawi pada pinjol, baik yang ilegal maupun yang legal. Praktik pinjol yang berjalan selama ini mengandung unsur riba *naasi'ah*. Dalam skema pinjaman *online*, pihak OJK menetapkan bahwa penyedia jasa pinjol boleh memungut bunga pinjaman sampai batas tertentu.

Hukum riba adalah mutlak haram. Keharamannya berdasarkan nas-nas al-Quran dan as-Sunnah. Allah SWT berfirman (yang artinya) *Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba* (TQS al-Baqarah [2]: 275).



Solusi atas muamalah ribawi hari ini tidak hanya sebatas individu. Ini karena muamalah ribawi telah menjadi persoalan sistemik yang menjerat banyak pihak di negeri ini. Oleh karena itu Islam mewajibkan Negara untuk melindungi rakyat dari praktik muamalah ribawi. Masyarakat juga harus diingatkan agar tidak bergaya hidup konsumtif dan mudah berutang yang menyebabkan kesusahan. Negara wajib memberikan rasa aman dan nyaman untuk setiap warganya, termasuk aman karena kebutuhan pokok mereka terpenuhi. []

## KRITIK DIANGGAP HINAAN, REZIM WARAS?

**Pompy Syaiful**  
(Pengamat Medsos)



aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar Haris dalam diskusi daring *Crosscheck*

dengan tajuk 'Mengepung Rocky Gerung, Siapa Untung?' pada Minggu (6/8/2023)

menilai ada modus baru mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat, yaitu kritik terhadap pejabat dianggap sebagai sebuah fitnah dan hinaan. Modus itu sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Menurut dia, banyak kritik kemudian direspon dengan dianggap sebagai fitnah atau dianggap sebagai hinaan. Lalu dianggap itu berita bohong.

Sungguh miris jika kritik dianggap sebagai hinaan. Apalagi malah dianggap sebagai berita bohong. Isi kritik dianggap sebagai sebuah kebohongan, lalu visual kritiknya dianggap sebagai fitnah. Jadi ada dua materinya dan juga visualnya.

Modus baru tersebut dinilai merupakan konsekuensi dari pola kekuasaan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Imbasnya, kebijakan Pemerintah yang berkuasa hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan masyarakat luas.

Modus baru itu diduga muncul belakangan lantaran penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal karet yang dikenakan terhadap pengkritik untuk kepentingan orang banyak.

Tentu kita berharap yang kritis atau berseberangan dengan Pemerintah jangan dianggap sebagai musuh. Undang-undang yang kontroversial atau multitafsir itu seolah-olah tujuannya memenjarakan orang yang kritis atau orang yang berlawanan dari rakyat, kemudian membuat nyaman penguasa atau pejabat. Jika arahnya ke sana, ini tidak boleh terjadi.

Negara tidak boleh menempatkan rakyat sebagai musuh. Misalnya, yang mengkritik, yang tidak setuju lantas dianggap memusuhi. Intelektual kritis bukan musuh, tetapi warga negara yang peduli. Kalau ada salah, ada *restorative justice*.

Kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari ekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan pemerintah atau lembaga negara. Pada dasarnya, kritik dalam ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Saat ini tumbuh dan berkembang pula kualitas kontrol yang dihasilkan terhadap semua proses dan hasil pembangunan. Itu adalah hal yang wajar. Dengan fungsi itulah selayaknya kritik masyarakat tidak terbelenggu dengan ancaman delik dalam UU ITE maupun KUHP.

*Wallahu a'lam.* []



# MEMBACA ARAH DEMOKRASI INDONESIA

Muhammad Rahmat Kurnia

D

*Demokrasi Tanpa Demos.* Itu nama buku yang ditulis Wijayanto *et. al.* (2020). Istilah itu kini banyak dibincangkan. Demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat. *Kratos* berarti kekuasaan. Karena itu demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi tanpa *demos* berarti demokrasi tanpa rakyat. Rakyat tidak berkuasa.

Pada 9 dan 10 Agustus 2023, di daerah Patung Kuda, Jakarta terjadi demo buruh. Ribuan peserta aksi dari berbagai organisasi buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 15% tahun 2024. Para buruh juga menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang sarat dengan kepentingan oligarki. Mereka pun menuntut pencabutan UU Kesehatan, pencabutan UU pengembangan dan penyaluran sektor keuangan. Mereka juga menuntut Pemerintah untuk mewujudkan sistem jaminan sosial semesta sepanjang hayat.

Berbagai poster diusung. Di antaranya berbunyi “Undang-undang Cipta Kerja Mesin Pembunuh Rakyat”, “DPR Bosok. DPR Bosok. Aku ra popo. Aku ra popo. Ra popo ndasmu”, dan sebagainya. Aksi berjalan hingga malam hari.

“Penguasa kok *cuek* saja. Padahal mayoritas rakyat itu buruh,” kata Pak Dadan. “Presiden menganggap demo itu tidak ada. Alih-alih menemui aksi buruh, Presiden kok malah mengajak 20 artis menjajal LRT Jabodetabek,” tambahnya.

“Lebih mementingkan kekuasaannya.

Setelah menjajal LRT, Presiden malah bertemu dengan para pemimpin media massa di Istana Negara. Rakyat yang menuntut kebijakannya yang dirasa menzalimi mereka tak dianggap,” komentar Mas Rudi.

“Demokrasi di mulut, tapi otoriter dalam perilaku,” tambahnya.

Jauh sebelumnya, dalam “Resolusi Majelisenga 11 Mei 2023 Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB)”, Ketua Umum KSPSI Juhur Hidayat mengatakan, “Aliansi yang terdiri dari puluhan konfederasi dan federasi ini tidak akan pernah berhenti sebelum regulasi-regulasi yang sontoloyo, yang meminggirkan orang kecil itu dicabut.”

“Kita tidak mengkedeta, tidak makar, tidak apa-apa. Kita hanya menyatakan bahwa kita tidak setuju kebijakan itu,” tegasnya.

“Kalau kekuasaannya tidak terancam, demo akan dibiarkan. Namun, tetap dicuekin,” ujar Mas Rudi lagi.

Contoh lain, masyarakat paham bahwa Pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Namun, sejak lama sudah beredar isu penundaan Pemilu. Mentok terus. “Kini muncul gagasan itu dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR mengusulkan amandemen UUD untuk membuat aturan penundaan Pemilu di masa darurat,” ujar Pak Dadan lagi.

Memang, Wakil Ketua MPR Asrul Sani mengatakan, “Usulan itu tidak terkait penundaan Pemilu 2024” (9/8/2023). “Tapi, ‘kan tidak bisa omongan itu keluar dari konteksnya. Selama ini ada wacana menunda

Pemilu. Namun, mentok terus. Tiba-tiba, MPR mengusulkan amandemen penundaan Pemilu. Tak mungkin itu lepas dari penundaan Pemilu 2024,” Pak Dadan mengomentari lagi.

“MPR tidak mewakili rakyat,” tambahnya.

“Sekarang ini benar-benar demokrasi tanpa *demos*. *Ngaku* pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Faktanya, kekuasaan hanya di tangan segelintir partai politik dan oligarki,” tegas Mas Rudi.

Ungkapan itu ada benarnya. Bagi oligarki, demokrasi itu sangat menguntungkan. *Freedomhouse.org* edisi 3 Agustus 2015 menurunkan tulisan ‘Democracy is good for business’. “Tentu yang diuntungkan adalah bisnis oligarki, bukan UMKM,” ujar Mas Rudi kembali.

Suara-suara kritis yang mewakili suara hati rakyat pun dibungkam. Bahkan dijadikan tersangka. Sebut saja kasus Rocky Gerung (RG) baru-baru ini. “Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi, ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia mesti pergi ke China buat nawarin IKN. Dia mesti mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia *nggak mikirin* nasib kita,” ujar RG.

Ini sebenarnya inti dari ungkapan RG. Memang, dia menggunakan kata “baj\*\*\*\*n t\*\*\*\*l” yang dianggap menghina Presiden oleh para pendukung Presiden. “Kata itu sebenarnya digunakan Rocky untuk menjelaskan kebijakan Presiden,” ungkap Prof. Aceng.

“Kita harus lihat konteksnya,” ujar ahli forensik bahasa itu.

“Kalau Pak Moeldoko pasang badan untuk membela PG, saya pasang akal untuk membela RG,” ujar Prof. Din Syamsuddin.

Lepas dari itu semua, kini kasus RG ditangani Bareskrim Polri. “Semua Laporan

Polisi ditarik ke Mabes Polri karena obyek perkara dan terlapor semua sama. Dalam proses ambil-alih,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro (7/8/2023).

Adanya polemik terkait hal ini di tengah masyarakat menunjukkan bahwa apa yang diungkapkan RG setidaknya mewakili sebagian suara rakyat. Namun, suara itu dibungkam. “Ini juga realitas di tengah masyarakat yang menunjukkan demokrasi tanpa *demos*, ya ‘*kan?*” ungkap Pak Dadan menirukan Mas Rudi.

Itulah realitas demokrasi. Ke sanalah tampaknya demokrasi di Indonesia mengarah. Pertanyaan menarik, apakah ‘kehendak rakyat’ (*the will of people*) itu benar-benar ada? Seorang filosof dan ahli matematika bernama Marquis de Condorcet telah membuat suatu pembuktian matematika yang menyimpulkan bahwa menerima demokrasi secara penuh dan kehendak rakyat bukan hanya sulit, melainkan dalam faktanya mustahil (*impossible*) sebagaimana jumlah suara yang selalu tumbuh.

Selain itu, Mark Chou (2014) menulis buku *Democracy Against Itself*. Di antaranya disebutkan, “*By their nature, all democracies have the potential to destroy themselves*” (Secara alaminya, semua demokrasi memiliki potensi untuk menghancurkan dirinya sendiri).

Kalau demikian realitas demokrasi, kemana harus berpaling? Pada 19 Juli 2023, saya berkesempatan mengikuti agenda dialog tokoh di Jakarta. Mereka menyadari bahwa demokrasi saat ini demokrasi tanpa *demos*. Bahkan demokrasi akan menghancurkan dirinya sendiri. “Kita harus hijrah. Hijrah dari sistem kufur menuju sistem Islam,” tegas KH Rokhmat S Labib. Di dalam kitab fikih karya ulama Indonesia KH Sulaiman Rasyid disebutkan bahwa sistem Islam itu disebut *Khilafah*.

*Wallahu a'lam. □*

# MEWASPADAI KEBANGKITAN KEMBALI GERAKAN KOMUNIS DI INDONESIA

**Wahyudi Al Maroky**

*Pada masa Soekarno (Orde Lama), Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi partai legal yang ikut Pemilu. Pada era Orde Baru, PKI menjadi partai terlarang Pasca Pemberontakan G30S/PKI dengan keluarnya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Setelah Penguasa Orde Baru/Soeharto lengser, mulai tampak gerakan Komunisme untuk kembali eksis.*

*Pada era rezim Jokowi, hubungan Indonesia dengan Negara Komunis Cina semakin dekat. Bandul pemerintahan pun tampak bergerak dari Demokrasi-Kapitalisme ke arah Komunisme yang otoriter. Berbagai Perppu, Keppres dan Inpres serta kebijakan lain mulai tampak ke arah sana. Akankah gerakan Komunisme selangkah lagi kembali eksis di negeri ini?*

Publik dibuat resah dengan terbitnya Keppres Nomor 17 tahun 2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang TPP Non-Yudisial HAM Berat Masa Lalu. Keppres ini kemudian disusul dengan Inpres Nomor 2 tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023. Presiden memerintahkan 16 Kementerian dan 3 Lembaga Negara untuk melaksanakan rekomendasi TPP HAM. Yang menjadi kekhawatiran publik adalah ketika isu pelanggaran HAM ini digunakan oleh para keluarga dan ahli waris G30S/PKI mendapatkan pengakuan Negara dengan berbagai konsekuensinya.

Terbitnya Keppres 17 tahun 2022 dan Inpres 2 tahun 2023 ini tak lepas dari proses yang cukup panjang. Pada tahun 2002, Komnas HAM menyerahkan berkas perkara pro-justisia kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Berkas yang diserahkan pada tanggal 20 Juli 2002 ini kemudian dikembalikan oleh Kejagung pada 25 Oktober 2002 karena belum cukup bukti memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat untuk diajukan ke tahap penyidikan.

Selanjutnya, dalam kurun waktu 13 tahun, dari tahun 2002 sampai 2015, Komnas HAM kembali mengajukan 7 temuan Pelanggaran

HAM Berat kepada Kejaksaan. Namun, lagi-lagi berkas tersebut dikembalikan disebabkan belum cukup bukti memenuhi unsur Pelanggaran HAM Berat untuk diajukan ke tahap penyidikan. Dalam hal ini Komnas HAM terkesan tidak puas.

Komnas HAM kemudian mencoba lagi mengajukan berkas Pelanggaran HAM Berat pada 11 Desember 2018. Kali ini Wapres Jusuf Kalla saat itu menerima rekomendasi Komnas HAM yang isinya meminta agar Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk memulai proses penyidikan terhadap 10 berkas yang telah diserahkan oleh Komnas HAM sebelumnya. Wapres Jusuf Kalla berjanji akan menyerahkan berkas tersebut kepada Presiden Jokowi.

Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2019, Komnas HAM meminta Presiden untuk menerbitkan Keppres guna menguatkan kelembagaan. Namun, rekomendasi ini pun belum mendapatkan respon yang memadai sesuai rekomendasi Komnas HAM. Kejaksaan dan Komnas HAM dinilai saling lempar tanggung jawab. Persoalannya ada pada masalah pembuktian hukum.

Setelah melalui jalan panjang berliku untuk pembuktian secara hukum, pada tahun 2021 muncul gagasan Penyelesaian Non-Yudisial untuk pelanggaran HAM Berat. Upaya non-yudisial ini kemudian diikuti beberapa peristiwa penting.

Pada 27 September 2021 terjadi pembongkaran beberapa patung Pahlawan Nasional di Markas Komando strategis Angkatan Darat (Makostrad). Patung Pahlawan Nasional yang berjasa menumpas Pemberontakan G30S/PKI itu dibongkar dengan alasan untuk ketenangan lahir dan batin. Patung yang turut dibongkar antara lain: Patung Jend. AH Nasution, Jend. Soeharto dan Jend. Sarwo Edhi.

Pada September 2021 ini juga, dalam

diskusi “TNI vs PKI”, Mantan Panglima TNI Jend (Purn) Gatot Nurmantyo menduga ada penyusupan kembali simpatisan PKI ke tubuh TNI/Polri.

Selanjutnya Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres 4/2022 tentang 1 Maret Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Ini menyangkut peristiwa sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin Soeharto dan menunjukkan di mata internasional bahwa Indonesia masih berdaulat. Namun, uniknya nama Soeharto tidak muncul dalam Keppres tersebut. Justru nama yang muncul adalah HB IX, Jend. Soedirman, Bung Karno dan Hatta,

Setelah melalui proses panjang dan menemui jalan buntu itu, Presiden Jokowi menerbitkan Keppres. Pada tanggal 26 Agustus 2022, terbitlah Keppres Nomor 17 tahun 2022. Dengan terbitnya Keppres ini maka terbentuklah Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM (TPP HAM) Berat Masa Lalu. Tugas TPP HAM Berat Masa Lalu ini adalah: Mengungkap dan Mengupayakan Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Selanjutnya TPP HAM Berat Masa Lalu mengeluarkan beberapa rekomendasi. Salah satu rekomendasinya adalah Pemulihan Hak-hak Konstitusional. Hal ini dapat dimaknai bahwa para pelaku Gerakan Makar G30S/PKI diposisikan sebagai korban pelanggaran HAM dan mendapatkan pemulihan hak konstitusionalnya. Dengan mendapatkan kesamaan hak konstitusionalnya maka menjadi kekhawatiran bagi publik hal ini akan dijadikan senjata untuk membangkitkan kembali PKI.

Pada Januari 2023, setelah menerima laporan TPP HAM, Presiden Jokowi mengakui dan menyesali adanya pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Bahkan Jokowi pun segera mengeluarkan Inpres Nomor 2/2023. Isinya menginstruksikan 16 menteri dan 3 lembaga negara untuk melaksanakan rekomendasi TPP

HAM. Di antara 12 rekomendasi TPP HAM Berat Masa Lalu, salah satunya peristiwa 1965/1966.

### **Pengakuan Penyesalan atas Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu**

Upaya untuk mengubah posisi dari semula sebagai pihak yang terlibat G30S/PKI menjadi posisi sebagai korban pelanggaran HAM terus dilakukan. Upaya ini tampak keberhasilannya dengan diterbitkannya Keppres 17/2022 dan Inpres 2/2023 oleh Presiden Jokowi.

Upaya mendapatkan pengakuan Negara, bahwa dalam penumpasan gerakan makar G30S/PKI terjadi pelanggaran HAM, mendapatkan lampu hijau dari Presiden. Padahal sebelumnya hal ini menemui jalan buntu ketika laporan pelanggaran HAM itu diajukan melalui Kejaksaan Agung. Pada awal tahun 2023, Presiden Jokowi akhirnya memberikan pernyataan yang mengakui adanya pelanggaran HAM. Bahkan tak hanya pengakuan, Jokowi pun menyatakan penyesalannya.

“Dengan pemikiran yang jernih dan hati yang tulus saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat,” ujar Jokowi usai menerima laporan dari Tim PPHAM di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Jika kita dalam pernyataan Presiden Jokowi tersebut terdapat sedikitnya tiga makna penting: (1) posisi sebagai kepala negara; (2) merupakan pengakuan; (3) adanya penyesalan yang dilakukan dengan kesadaran dan hati yang tulus.

*Pertama:* Posisi pengakuan dilakukan dalam kapasitas sebagai kepala negara. Konsekuensinya, itu merupakan pernyataan resmi dari Negara.

*Kedua:* Pengakuan atas adanya pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Melalui pernyataan tersebut, Presiden Jokowi bertindak sebagai kepala negara yang mengakui adanya pelanggaran HAM. Konsekuensinya, Negara mengakui telah terjadi pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Termasuk di dalamnya peristiwa 1965-1966 yang merupakan peristiwa berdarah, pemberontakan G30S/PKI.

*Ketiga:* Pengakuan penyesalan. Setelah Jokowi mengakui bahwa ada pelanggaran HAM Berat Masa lalu, ia pun menyatakan penyesalannya. Ini pertanda ia tak setuju bahwa ada peristiwa pemberontakan PKI yang terjadi pada tahun 1965 itu.

Dengan penyesalan tersebut, Jokowi mengakui bahwa hal itu merupakan kelalaian atau kesalahan. Dengan pengakuan kesalahan itu maka Negara telah salah melakukan penumpasan G30S/PKI. “*Maafuum mukhaalafah*”-nya berarti mereka sebagai korban TPP HAM itu yang dianggap benar.

Kalau Negara mengakui salah maka maknanya semua yang dilakukan oleh TNI dan masyarakat (ulama dan umat) dalam menumpas G30S/PKI itu merupakan kesalahan. Kalau mereka dinyatakan sebagai korban, lalu bagaimana dengan Pahlawan Revolusi yang menjadi korban keganasan PKI?

### **Penyusunan Ulang Sejarah**

Sejarah sangat bergantung pada siapa penulisnya. Pada masa Orde Lama gagasan Komunisme mendapat ruang yang luas dari rezim Soekarno. Kala itu Soekarno mempopulerkan istilah NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunis). Hal ini berlangsung sampai meletusnya pemberontakan G30S/PKI. Lalu rezim Orde Baru hadir dan dengan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Isinya tentang: Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI); pernyataan PKI Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh

Wilayah Negara Republik Indonesia; larangan atas semua kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Ini berlangsung hingga rezim Orde Baru berakhir dan digantikan dengan Orde Reformasi.

Pada era Reformasi, utamanya pada masa rezim Jokowi, mulai tampak upaya-upaya untuk menulis ulang sejarah negeri ini. Saat yang sama ada upaya untuk mengaburkan sejarah kelam pemberontakan G30S/PKI. Hal itu mulai tampak melalui jalur formal dengan terbitnya Keppres dan Inpres sebagaimana uraian di atas.

Setelah rezim Jokowi mengakui ada korban pelanggaran HAM berat, maka dilanjutkan dengan menulis ulang sejarah versi baru. Inilah yang disebut sebagai penguburan dan pengaburan sejarah; mengganti tokoh-tokoh sejarah yang kontra terhadap Komunisme dengan tokoh-tokoh komunis. Tidak ada batasan yang pasti.

### Memulihkan Hak-Hak Korban

Memulihkan hak-hak korban ini tercakup dalam dua kategori, yakni hak konstitusional sebagai korban dan hak-hak sebagai warga negara.

Pemulihan hak konstitusional sebagai korban, antara lain; yang sebelumnya tidak boleh ikut memilih dalam Pemilu menjadi boleh ikut memilih dan dipilih. Sebelumnya, tidak boleh membuat partai maka sekarang menjadi boleh buat partai. Dll.

Adapun pemulihan sebagai hak warga negara maka memiliki kesetaraan sebagai warga negara yang pernah terlibat makar maupun yang tidak. Jika selama ini tidak mendapat kesetaraan sebagai warga negara maka kini semua menjadi boleh. Masuk menjadi polisi maupun tentara menjadi setara. Tak boleh ada kewaspadaan untuk meneliti

apakah ia bagian dari keluarga yang terlibat makar G30S/PKI atau tidak. Semua boleh-boleh saja.

Bahkan boleh mendapatkan kesamaan dalam hal beasiswa pendidikan atau menjamin keberlangsungan pendidikan yang layak bagi para korban, pemulihan ekonomi atau menjamin kesejahteraan bagi para korban, melindungi para korban dari berbagai bentuk ancaman dan penghinaan, dan lainnya.

Untuk tahap awal, Presiden Joko Widodo sudah memulai memberikan santunan kepada para korban dan ahli waris korban pelanggaran HAM usai peluncuran Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) di Rumoh Geudong, Gampong Bili Aron, Kabupaten Pidie, Aceh, Selasa (27/6/2023). Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial sebanyak 12 pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat yang terjadi di Indonesia dan dimulai dari Aceh sebagai titik *kick off* program tersebut.

Apakah pada Bulan September nanti para keluarga dan ahliwaris G30S/PKI juga akan mendapatkan santunan dari Presiden Jokowi? Biarlah waktu yang menjawabnya, juga sejarah yang mencatatnya.

### Pendataan Ulang Korban

Pemerintah akan melakukan pendataan kembali korban TPP HAM. Jika hal itu dimaksudkan untuk memberikan kompensasi dan memulihkan hak-hak korban agar tepat sasaran maka ini bisa dipahami publik. Meski demikian, publik juga tahu bahwa di era digital saat ini mestinya data itu sudah dimiliki oleh Negara. Pendataan ulang hanya akan menimbulkan kegaduhan baru. Apalagi jika ingin terjadi kesetaraan antar sesama warga negara. Ini justru bisa menimbulkan kecemburuan sesama anak bangsa.

## Menunaikan Kewajiban Negara Terhadap Korban

Negara menciptakan suasana kondusif sehingga tercipta harmonisasi dalam masyarakat yang bersifat kultural. Negara harus lebih berperan dan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada seluruh warga negara dan tidak terbatas pada korban pelanggaran HAM. Negara harus meningkatkan perannya untuk penguatan kohesi bangsa secara lebih luas pada berbagai sisi lainnya.

## Resosialisasi Korban

Adanya upaya memulihkan nama baik korban HAM di kancah masyarakat yang lebih luas. Tujuannya agar mereka dapat diterima di masyarakat yang lebih luas. Selain itu mereka juga diberi panggung dan kesempatan lebih dibandingkan rakyat lainnya agar mereka bisa lebih eksis di kehidupan nyata, di tengah-tengah masyarakat. Jika kebijakan semacam ini dilakukan, justru ini akan menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. Masyarakat akan kembali terluka.

## Kampanye Kesadaran Publik

Melakukan kampanye terhadap masyarakat agar timbul kesadaran publik bahwa mereka adalah korban dan harus dilindungi. Mengedukasi masyarakat terkait HAM agar menghargai satu dan lainnya. Menampakkan bahwa negara mengawal dan melindungi korban HAM. Menjadikan perilaku masyarakat standar dengan prinsip-prinsip HAM dalam keseharian.

## Membuat Kebijakan Reformasi Struktural dan Kultural

Melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi masyarakat dengan terus mendorong upaya untuk sadar HAM. Selain itu, untuk memperlihatkan kehadiran negara dalam upaya

pendampingan korban HAM.

Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya bersama untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Membuat kebijakan reformasi struktural dan kultural di tubuh TNI/Polri. Kebijakan ini dibuat khusus bagi TNI atau Polri agar tidak terjadi pelanggaran HAM serupa. Mendorong TNI/Polri agar dapat mengubah mindset untuk menjadi profesional, humanis dan lainnya yang terkait dengan HAM Berat.

## Memoriabilia Dokumen Sejarah

Membangun memoriabilia dokumen sejarah yang memadai serta bersifat peringatan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Yang menjadi masalah adalah ketika sejarah sudah dikaburkan dan dibalikkan, dari yang semula pelaku pemberontakan G30S/PKI dan kini menjadi korban HAM, maka pembuatan monumen pun akan bergeser dan berbalik. Monumen yang dulu sebagai pahlawan menumpas G30S/PKI kini jadi pelaku pelanggaran HAM maka harus dihapus dan dibuat baru. Misal Monumen Lubang Buaya tentu dianggap tidak relevan karena dianggap sebagai pelaku pelanggaran HAM sehingga harus dihapus dan dibangun yang baru.

## Pelebagaan dan Instrumental HAM

Upaya ini merupakan beberapa ratifikasi instrumen HAM Internasional seperti menyesuaikan dengan standar yang dibuat oleh PBB. Jika ada peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai maka harus di amandemen atau dibuat yang baru. Adanya gagasan membentuk BPIP, juga upaya mengubah dari Pancasila menjadi Trisila dan Eka Sila. Semua dapat diubah sesuai dengan maunya mereka.

*Wallahu a'lam bi ash-shawaab.* □



# BAHAYA KEPPRES 17/2022 & INPRES 2/2023

**Dr. Riyan, M.Ag.**

(Pengamat Politik Islam)

Presiden RI menerbitkan Keppres 17/2022 yang berisikan pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Manusia Yang Berat di Masa Lalu (selanjutnya disebut Tim PPHAM) pada 26 Agustus 2022. Kemudian disusul terbitnya Inpres 2/2023 yang berisikan Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat pada 15 Maret 2023.

Merujuk Keppres tersebut, penyelesaian nonyudisial adalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM tanpa melalui jalur hukum. Alih-alih mengadili pelaku pelanggaran HAM, metode ini justru menekankan pemulihan korban melalui berbagai bantuan material.

Penyelesaian non-yudisial itu ditujukan untuk tiga maksud. *Pertama*, melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat masa lalu. *Kedua*, merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya. *Ketiga*, merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran HAM yang berat tidak terulang lagi pada masa yang akan datang.

Sebagaimana dijelaskan dalam Keppres, rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarganya dapat diberikan dalam bentuk rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan

keehatan, beasiswa, dan rekomendasi lain untuk kepentingan korban atau keluarganya.

## Apa Itu Pelanggaran HAM Berat?

Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik, mental, penderitaan emosional dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pelanggaran HAM berat juga menyebabkan kerugian materiil bagi korbannya.

Penting dicatat, perumusan tentang pelanggaran HAM berat belum secara jelas ditetapkan dalam berbagai resolusi maupun deklarasi yang telah diadakan oleh negara-negara di dunia.<sup>1</sup>

Di Indonesia, pelanggaran HAM berat telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Pelanggaran HAM berat adalah segala bentuk tindak pelanggaran HAM berupa pembunuhan massal (*genosida*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan,

penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*). (Pasal 104 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999). Selain UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000, penanganan kasus pelanggaran HAM berat juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan beberapa undang-undang tertentu lainnya.

Menurut catatan Komnas HAM, ada sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Ada kasus pelanggaran HAM berat yang sudah terselesaikan dan ada juga yang belum terselesaikan.

Terkait pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum terselesaikan, Presiden Jokowi mengakui sejumlah pelanggaran HAM berat masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia. Ada 12 pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia yang diakui Jokowi. Berikut ini daftar pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia yang diakui Jokowi: (1) Peristiwa 1965-1966; (2) Penembakan Misterius 1982-1985; (3) Peristiwa Talangsari Lampung 1989; (4) Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis di Aceh 1998; (5) Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998; (6) Peristiwa Kerusakan Mei 1998; (7) Peristiwa Trisakti Semanggi 1 & 2 1998-1999; (8) Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999; (9) Peristiwa Simpang KAA di Aceh 1999; (10) Peristiwa Wasior di Papua 2001-2002; (11) Peristiwa Wamena Papua 2003; (12) Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003.<sup>2</sup>

## Menyoal Rekomendasi Komnas HAM

Yang menjadi persoalan penting adalah mengapa suatu peristiwa dikategori pelanggaran HAM berat dan yang lain tidak. Di sinilah rekomendasi Komnas HAM ke Presiden patut dikritisi. Contoh sederhananya, seperti mengapa di poin pertama dari 12 peristiwa yang dimasukkan pelanggaran HAM berat, adalah peristiwa 1965-1966 yang diklaim korbannya adalah anggota PKI dan simpatisannya? Kalau PKI

korban, maka pelakunya (umat Islam dan TNI) adalah penjahat? Bagaimana dengan korban pembantaian oleh PKI terhadap banyak tokoh umat Islam dan TNI sebelum 1965? Mengapa ketika PKI melakukan pembantaian kepada ulama dan tokoh Muslim di Madiun 1948 tidak dimasukkan sebagai pelanggaran HAM berat? Apa konsekuensi multi aspek bila kebijakan ini dipaksakan?

Ini dari sisi jenis pelanggaran HAM berat yang direkomendasi Komnas HAM. Selain itu, dari sisi cara penyelesaiannya, metode non-yudisial ini menuai banyak kritik. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), misalnya, melalui pernyataan resminya memandang bahwa pembedaan antara metode yudisial dan non-yudisial merupakan kamouflase dari lemahnya Negara untuk menindak para pelaku kejahatan kemanusiaan di Indonesia.

Kontras menilai metode ini tak lebih dari upaya Pemerintah untuk memperkuat impunitas dan mengabaikan hak-hak dasar korban. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik hukum dari ketentuan yang sudah ada dan sudah berjalan.<sup>3</sup>

## PKI pada 1965-1966 Korban atau Pelaku?

Jika kita mendalami berbagai peristiwa yang terkait dengan kudeta yang dilakukan oleh PKI (sebelum, saat dan sesudah) 30 September 1965, yang dikenal dengan Peristiwa G30S/PKI yang kemudian digagalkan oleh TNI dan umat Islam, berbuntut pada terjadinya polarisasi tajam antar kelompok (antara pro dan kontra PKI) karena ketidaktegasan Presiden Sukarno dalam bersikap terhadap kudeta PKI dan Komunisme.

## Konsekuensi

### 1. Aspek Sejarah.

Dari aspek sejarah, klaim bahwa PKI adalah korban pelanggaran HAM berat dan pelakunya adalah TNI dan umat Islam, sesungguhnya adalah upaya jahat untuk mengkaburkan sejarah bahkan menguburkan sejarah. Seolah mereka adalah



korban. Padahal mereka adalah pelaku. Jika diyakini klaim bahwa PKI adalah korban maka terkuburlah fakta bahwa mereka itu adalah pelaku.

Pendukung PKI dan Komunisme sedang melakukan apa yang disebut sebagai politik *"playing- victim"*. Mereka pelaku, tetapi teriak sebagai korban. Maling teriak maling. Pola kebohongan dan pemutarbalikan fakta inilah salah satu ciri pendukung PKI dan Komunisme. Andai pendukung PKI dan Komunisme adalah korban pelanggaran HAM berat, konsekuensi-nya TNI dan umat Islam adalah penjahat HAM berat. Ini jelas kesimpulan yang ahistoris (tidak berdasar fakta sejarah) dan tuduhan yang sangat keji.

Fakta sejarahnya, pendukung PKI dan Komunisme adalah pelaku kejahatan. Korbannya adalah TNI, umat Islam dan rakyat. Sejak kemunculannya, PKI dan Komunisme telah tiga kali melakukan kejahatan, pemberontakan dan kudeta pada tahun 1927, 1948, dan 1965.

### 2. Aspek Hukum.

Dari aspek hukum, andai pendukung PKI dan Komunisme diklaim sebagai korban, terbuka peluang para pelaku kejahatan akan dituntut oleh korban. Tentu menjadi jungkir balik logikanya. Para korban yang sesungguhnya, yaitu rakyat khususnya umat Islam dan TNI, akan dianggap sebagai pelaku kejahatan. Ini tentu hal yang harus dihentikan.

Bahkan implikasi lebih luas, TAP MPRS XXV/ MPRS/1966 yang berisi tentang *"Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme"*, berpotensi untuk dibatalkan karena dianggap tidak relevan. Alasannya, pendukung PKI dan Komunisme adalah korban, bukan pelaku kejahatan dan kudeta.

Munculnya produk hukum TAP MPRS XXV/

1966 ini adalah bukti faktual bahwa PKI dan pendukung Komunisme adalah pelaku kejahatan bukan korban.

### 3. Aspek Politik.

Adapun dari aspek politik, andai PKI dan Komunisme dianggap korban pelanggaran HAM berat, maka pemulihan dan pengembalian hak mereka menjadi terbuka. Padahal telah terbukti bahwa mereka pelaku dari pelanggaran HAM berat yang sesungguhnya dalam kasus pembantaian tahun 1948 dan pengkhianatan melalui kudeta 1965. Hak yang dipulihkan adalah hak sebagai korban dan hak politik sebagai warganegara. Lantas bagaimana hak dari korban yang sesungguhnya, yaitu hak umat Islam dan TNI yang sejak 1948 juga dibantai; yang pada tahun 1965, umat Islam, para ulama dan TNI menyabung nyawa dalam rangka penumpasan kudeta dan pemberontakan PKI; sementara ada adagium saat itu karena konflik dan kerusuhan yang ada di masyarakat saat itu *"kill or to be killed"*?

Jelas, konsekuensi terbitnya Keppres dan Inpres ini akan membangkitkan kembali komunisme (KGB/Komunisme Gaya Baru). Narasi kebohongan sangat dominan manakala mereka mengatakan bahwa PKI dan Komunisme adalah korban.

### Kejahatan Ideologi Komunisme Terhadap Kaum Muslim

Kejahatan Komunisme di berbagai belahan dunia, selain menimpa manusia secara umum, mereka juga melakukan berbagai kejahatan khususnya terhadap kaum Muslim.

Di Indonesia sendiri ada dua peristiwa yang menjadi gambaran kejahatan tersebut. Pemberontakan PKI Madiun 1948 dan Kudeta PKI 1965 yang telah memakan korban yang sangat banyak. Di Madiun, 1948, tak tanggung-tanggung, korban pembantaian PKI kala itu mencapai 1.920 orang. Padahal PKI hanya menduduki Madiun selama 13 hari saja, terhitung

sejak tanggal 18-30 September 1948. “Sesuai data resmi dari Kodim Madiun yang kita buat referensi pembuatan brosur bahwa PKI menguasai Madiun sejak 18 hingga 30 September 1948. Singkat namun ada ribuan korban yang berhasil dibinasakan dengan kejam,” ujar pengelola monumen lainnya, Tri Sugianto.<sup>4</sup>

Peristiwa kudeta 1965, PKI dan Komunisme juga telah membantai 6 jenderal dan 1 perwira. Sebelumnya mereka melakukan teror, agitasi, dan pembantaian di berbagai wilayah di Indonesia.<sup>5</sup>

Saat era Uni Sovyet yang dikuasai partai komunis, dari 15 negara federal yang menjadi bagian Uni Soviet, enam di antaranya memiliki penduduk mayoritas Islam. Keenam wilayah tersebut yakni Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kirgizstan, Turkmenistan dan Azerbaijan. Tak cuma itu, umat Islam di Uni Soviet juga ditemukan dalam jumlah besar di Idel-Ural, Kaukasus Utara, dan Tatarstan (saat ini Republik Tatarstan). Selama Stalin berkuasa, sebagaimana dikutip dalam buku *“The National Republics Lose Their Independence”* karya Helene Carrere d’Encausse, Tentara Uni Soviet menutup bahkan menghancurkan sejumlah masjid yang menjadi salah satu sarana dakwah. Sejumlah madrasah juga dihancurkan. Para ulama yang coba mempertahankan kultur Islam disiksa secara keji dan bahkan dibunuh. Pada Mei 1944, hampir 200 ribu Muslim Tatar Krimea dideportasi ke sejumlah negara bagian seperti Republik Kazakhstan, Republik Mari, Republik Uzbekistan, dan ke beberapa wilayah lain di negara-negara federal Uni Soviet. Sebagai pengaman, lebih dari 32 ribu Tentara Merah Uni Soviet dikerahkan. Menurut laporan *Time*, lebih dari 10 ribu Muslim Tatar Krimea meninggal dunia akibat kelaparan.<sup>6</sup>

Di Cina, sampai saat ini, Muslim Uighur mendapatkan perlakuan jahat dari rezim Komunisme. Human Right Watch memperkirakan 1 juta orang telah ditahan di 300 hingga 400 fasilitas penahanan di seluruh Xinjiang sejak tahun 2017. Pengadilan di wilayah tersebut diduga menjatuhkan “hukuman penjara

yang berat” tanpa adanya proses hukum. “Menurut statistik resmi, penangkapan di Xinjiang menyumbang hampir 21% dari semua penangkapan di Cina pada tahun 2017, meskipun orang-orang di Xinjiang hanya 1,5% dari total populasi,” kata laporan itu.

Bukti menunjukkan bahwa otoritas di Xinjiang telah menggunakan berbagai cara untuk merusak atau menghancurkan setidaknya dua pertiga masjid di Xinjiang. Otoritas lokal juga menerapkan jaringan pengawasan yang luas di seluruh wilayah dengan mengumpulkan sampel DNA, sidik jari, pemindaian mata, dan golongan darah penduduk Xinjiang yang berusia antara 12 dan 65 tahun.

Kepada *DW*, aktivis HRW Richardson mengatakan bahwa laporan tersebut menyoroti kebijakan Pemerintah Cina yang telah menasar warga Muslim Uighur dan minoritas Muslim Turki lainnya dalam beberapa tahun terakhir. “Kami sampai pada kesimpulan bahwa pelanggaran ini sesuai dengan definisi meluas dan sistematis,” tutur Richardson.<sup>7</sup>

## Kegagalan Komunisme dan Kapitalisme

Sebagaimana Komunisme yang telah gagal hingga bubarnya Uni Sovyet pada 1989,<sup>8</sup> dan di negara-negara komunis Eropa Timur, ideologi Kapitalisme pun terbukti gagal dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi manusia.

Kedua ideologi ini mengalami kegagalan karena keduanya dibangun di atas dasar yang batil. Tidak sesuai dengan fitrah manusia. Tidak sesuai dengan akal sehat. Tidak menenteramkan hati. Komunisme dibangun di atas dasar materialisme. Kapitalisme dibangun di atas dasar sekulerisme. Berikut ini fakta kerusakan yang terjadi ketika dunia saat ini dalam dominasi Kapitalisme.

Pada bidang ekonomi, fakta menunjukkan bahwa *“Capitalism isn’t working, another world is possible”*. Kapitalisme gagal membawa kesejahteraan untuk rakyat. Istilah “TINA” (*There Is No Alternative*) telah runtuh. Slogan ini



digaungkan sejak Presiden Reagan (1981-1989) bahwa satu-satunya alternatif untuk dunia adalah kapitalisme, liberalisme dan globalisasi.

Begitu dalamnya ketidakadilan karena gap kesenjangan ekonomi antara “*the have*” dan “*the have not*”. Perbandingannya, hanya 1 persen yang diuntungkan dengan penerapan Kapitalisme, sementara 99 persen adalah menderita kesengsaraan. Menurut laporan Badan Amal asal Inggris, Oxfam<sup>9</sup>, yang berjudul “*Time to Care*”, 1% orang terkaya di dunia memiliki lebih dari dua kali lipat kekayaan dari seluruh umat manusia. “Ketimpangan ekonomi telah menjadi di luar kendali, dengan 2.153 miliarder memiliki kekayaan lebih dari 4,6 miliar orang pada 2019,” tulis laporan tersebut, dikutip melalui *Bloomberg*, Senin (20/1/2020). Menurut *Bloomberg*, tiga orang terkaya di dunia telah mengumpulkan kekayaan total sebesar US\$231 miliar selama 1 dekade terakhir. Total kekayaan 20 miliarder teratas telah berlipat ganda dari US\$672 miliar

menjadi US\$1.397 miliar sejak 2012.<sup>10</sup>

Di bidang sosial, dalam statistik resmi AS (2017), per 100.000 penduduk, tingkat kejahatan dengan kekerasan dalam bentuk pembunuhan angkanya 5.3, perkosaan 41.7, perampokan 98, serangan yang diperparah 248.9, kejahatan kekerasan total 382.9. Kejahatan properti berupa perampokan 430.4, pencurian 1.694, pencurian kendaraan bermotor 237.4.<sup>11</sup>

Di bidang kesehatan, masih massifnya persebaran virus Covid-19 di seluruh dunia, telah menunjukkan kegagalan pencegahan dan penanganan sehingga membawa kematian manusia lebih dari 5.5 juta orang dan angka yang terjangkit lebih dari 343 juta orang (21/01/2022). Ironisnya, Kapitalisme menunjukkan bahwa yang diuntungkan secara materi dengan tingginya angka kematian tersebut adalah perusahaan-perusahaan farmasi dunia yang mendominasi produksi obat (vaksin). Belum lagi sebaran berbagai penyakit menular lainnya, seperti AIDS dll.

Di bidang pendidikan, Survei *NBC News Wall Street Journal* yang dilakukan 10 -14 Agustus 2019 menyimpulkan bahwa nilai-nilai yang dipandang penting oleh AS telah berubah selama dua dekade terakhir. Anak muda AS kini kurang mementingkan patriotisme, agama dan keinginan memiliki anak. Generasi muda AS lebih menghargai kerja keras, toleransi, keamanan finansial dan kepuasan diri. Hanya 30 persen yang menganggap agama sangat penting. Demikian pula tentang keinginan memiliki anak, hanya 43 persen mengatakan itu sangat penting. Perubahan pandangan generasi baru juga menunjukkan patriotisme bukan lagi hal penting, seiring 51 persen dari mereka tidak mendukung Kapitalisme.

Di kancah politik luar negeri, dalam rangka menerapkan Kapitalisme secara global, Amerika dan Barat menerapkan metode penjajahan (imperialisme), baik pola lama (melalui militer) maupun pola baru (neo imperialisme, melalui dominasi ekonomi dan budaya). Hasilnya kita

Menurut laporan Badan Amal asal Inggris, Oxfam<sup>9</sup>, yang berjudul “*Time to Care*”, 1% orang terkaya di dunia memiliki lebih dari dua kali lipat kekayaan dari seluruh umat manusia. “Ketimpangan ekonomi telah menjadi di luar kendali, dengan 2.153 miliarder memiliki kekayaan lebih dari 4,6 miliar orang pada 2019,” tulis laporan tersebut, dikutip melalui *Bloomberg*, Senin (20/1/2020).

bisa saksikan, Perang Dunia I menewaskan lebih dari 31 juta orang. Sebanyak 58 juta jiwa kehilangan nyawa dalam Perang Dunia II. Sebanyak 1.7 juta tewas dalam Perang AS melawan Uni Sovyet di Afghanistan, 1.5 juta tewas dalam Perang Vietnam. Belum lagi yang tewas dalam Perang Melawan Terorisme pasca Peristiwa 11 September. Korban akibat nafsu penjajahan Kapitalisme ini menelan ratusan juta yang meninggal, cacat permanen dan berbagai kerugian fisik dan psikis.

Kerusakan lingkungan bukanlah hal yang terpisah dari ekonomi-politik Kapitalisme. Energi-energi fosil, meski dengan daya rusak lingkungan yang sangat besar, dipilih karena dapat menekan ongkos produksi sekaligus dijadikan komoditi dalam Kapitalisme. Harga yang harus dibayar sangat besar, yaitu dengan pemanasan global. Sebelum Revolusi Industri angka emisi gas rumah kaca hanya 1 gigaton, lalu menjadi 46,6 juta gigaton pada 2015; atau sekitar 1,4 juta kg setiap detik. Efek rumah kaca memerangkap panas yang harusnya kembali ke luar angkasa. Panas ini kemudian menyebabkan es di kutub mencair sehingga membuat kenaikan permukaan air laut. Antara tahun 1992 sampai tahun 2011 Antartika telah kehilangan 76 milyar ton es tiap tahunnya. Sejak tahun 2012, pencairan lapisan es itu telah mencapai 219 milyar ton per tahun. Kenaikan permukaan air laut mengalami tambahan kenaikan setinggi 0,08 mm pertahun, yang terjadi setiap tahun sejak 1993.

### Keunggulan Islam dan Sistem Khilafah

Jadi, kemana kita akan berpaling dan menuju? Hanya satu jawabannya, Islam. Secara konsep (*fikrah, thought*) dan metode (*thariiqah, method*). Islam adalah agama yang unggul, tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi. Fokuslah hanya ke Islam Kaffah. Tidak ke kanan: kapitalisme-sekuler-demokrasi. Tidak ke kiri: komunisme-sosialisme-materialisme.

Secara historis, Islam dan Daulah Islam (Khilafah) telah membawa manusia dari berbagai

ras, suku, wilayah, berpindah dari kegelapan menuju cahaya tauhid. Secara empiris, lebih dari 1300 tahun, Khilafah telah membersamai peradaban Islam dan memberikan kesejahteraan, keadilan, dan keberkahan bagi umat manusia.

Karena itu umat Islam harus makin bersemangat dan terus istiqamah dalam menggelorakan dakwah secara intelektual, politik dan damai untuk melanjutkan kehidupan Islam, menjemput kemenangan dan kemerdekaan hakiki, menyatukan seluruh wilayah dunia dengan tegaknya Islam *kaaffah* dan Khilafah.

*Wallahu a'lam bi ash-shawab.[]*

### Catatan kaki:

- 1 Juanda, Ogiandhafiz (November 2019). "Pengadilan HAM di Indonesia: Evaluasi Terhadap Perlindungan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat" (PDF). Prosiding Seminar Nasional Viktimologi Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia: 67
- 2 <https://news.detik.com/berita/d-6510570/arti-pelanggaran-ham-berat-di-indonesia-dan-daftar-kasusnya>
- 3 <https://nasional.tempo.co/read/1676356/apa-itu-penyelesaian-pelanggaran-hak-asasi-manusia-nonyudisial>
- 4 <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4240313/kejam-begini-cara-pki-bantai-ribuan-tokoh-dan-ulama-di-madiun>
- 5 Peristiwa Kanigoro di Kediri, Jawa Timur, Peristiwa Bandar Betsi Sumatera Utara, Teror kepada ulama dan sastrawan dalam peristiwa Manifest Kebudayaan, dll.
- 6 <https://www.viva.co.id/militer/militer-dunia/1213741-peran-tentara-merah-hancurkan-islam-di-era-komunis-uni-soviet?page=2>
- 7 <https://www.dw.com/id/cina-melakukan-pelanggaran-sistematis-kepada-warga-uighur/a-57259176>
- 8 Sejak rezim komunis Stalin, Sebelum pembubaran Uni Soviet dan pengungkapan arsip, beberapa sejarawan memperkirakan bahwa jumlah yang dibunuh oleh rezim Stalin adalah 20 juta atau lebih. Setelah Uni Soviet bubar, bukti dari arsip Soviet dideklasifikasi dan peneliti diizinkan untuk mempelajarinya. Ini berisi catatan resmi 799.455 eksekusi (1921–1953), sekitar 1,7 juta kematian di Gulag, sekitar 390.000 kematian selama dekulikasi pemindahan paksa, dan hingga 400.000 kematian orang yang di deportasi selama tahun 1940-an, dengan total sekitar 3,3 juta korban tercatat secara resmi dalam kategori ini (Wikipedia, 2023).
- 9 Oxfam (2021). <https://ekonomi.bisnis.com/read/2020120/9/1192088/oxfam-ketimpangan-ekonomi-dunia-di-luar-kendali>
- 10 Free and Fair Trade, Global Agenda 2006, hal. 111.
- 11 Biro Statistik Amerika (2017). Kejahatan di Amerika Serikat menurut Volume dan Tingkat per 100.000 Penduduk, 1998–2017.

# SEJARAH KEBIADABAN KOMUNISME DI BERBAGAI NEGARA

**Hasbi Aswar**

Sejarah semua masyarakat yang ada sampai sekarang adalah sejarah perjuangan kelas. (*Manifesto Partai Komunis, 1848*).

Salah satu sejarah yang paling kelam di era modern adalah pembantaian yang dilakukan oleh gerakan komunis di berbagai negara dengan mengatasnamakan perubahan revolusioner. Gerakan ini lahir sebenarnya untuk memperjuangkan nasib para buruh yang tereksplotasi oleh para pemilik modal, kapitalis, yang dilegitimasi oleh negara. Paradigma perubahan dengan pertarungan antarkelas menjadikan pembunuhan, pembantaian dan penghancuran menjadi terlegitimasi secara ideologis. Sebabnya, menurut ideologi Komunisme, satu-satunya jalan perubahan adalah dengan mengubah struktur masyarakat dengan menggulingkan ideologi Kapitalisme bersama dengan para elit penyokongnya. Strategi ini diyakini sebagai bagian dari hukum sejarah umat manusia.

Menurut Prof. R.J. Rummel (1994), pada rentang waktu tahun 1900 sampai tahun 1987, Komunisme di berbagai negara seperti Uni Soviet, Kamboja, Cina, Kuba, Korea Utara dan Vietnam telah membunuh sekitar 110.000.000 orang baik dilakukan oleh kalangan pemerintah, kelompok pro pemerintah maupun gerakan militan komunis. Semua yang dibunuh itu adalah orang-orang yang dianggap pro kapitalis atau kontrarevolusi dari kalangan politisi, pengusaha, petani kaya dan pemilik lahan, militer, polisi dan

kelompok-kelompok anti Komunisme.<sup>1</sup>

## Komunisme Berdarah Soviet

Yang menjadi pionir dari ekspansi Komunisme adalah Uni Soviet setelah Revolusi Bolshevik tahun 1917. Pada era kepemimpinan Lenin dan Stalin, upaya penerapan Komunisme memakan banyak korban. Misalnya, tahun 1918-1922 era “Teror Merah Lenin”, adalah fase pembersihan kaum kapitalis dari kalangan pendukung Kekaisaran Tsar Rusia, kaum liberal, sosialis non-Bolshevik, para tokoh agama, *kulaks* (petani kaya) dan orang asing. Sekitar 200 ribu orang yang dianggap musuh ini dieksekusi mati, ditangkap, diinterogasi, ditahan, diadili atau dikirim ke penjara dan kamp kerja paksa. Pada era itu juga 11 juta meninggal karena kelaparan.

Tahun 1936-1938 pada era Stalin, pembersihan besar-besaran musuh komunis termasuk bersih-bersih internal partai komunis memakan korban 700.000-750.000 nyawa. Lebih dari satu juta orang tewas di kamp penahanan atau kamp kerja paksa (Gulag). Mereka yang disasar termasuk petani, etnis minoritas, seniman, ilmuwan, penulis, orang asing dan warga negara biasa yang dianggap kontrarevolusioner.<sup>2</sup>

Terhadap agama, sejak tahun 1917 pemberangusan terhadap symbol-simbol agama di Rusia secara massif dilakukan melalui penghapusan ajaran-ajaran agama di kurikulum sekolah, berlanjut dengan penghancuran gereja dan biara atau diubah menjadi toilet umum. Ribuan uskup, biarawan dan pendeta dibunuh secara sistematis atau dikirim kamp tahanan oleh Dinas Keamanan.<sup>3</sup>

Vladimir Lenin dalam sebuah pidatonya menyebutkan, sebagai pengikut Komunisme, moralitas seharusnya selalu tunduk pada kepentingan kaum pekerja, petani atau proletariat. Sementara, kelompok – kelompok borjuis termasuk kalangan agamawan, pemilik tanah mereka mengatasnamakan nilai-nilai ketuhanan untuk melakukan eksploitasi terhadap para pekerja. Oleh karena itu, menurut Lenin,

moralitas seperti ini harus ditolak.<sup>4</sup>

Seorang anggota polisi rahasia rezim Lenin menyatakan, Komunisme tidak melakukan serangan individual, tetapi kepada kaum borjuis. Nasib seseorang di negara komunis bergantung pada posisi mana dia berpijak.<sup>5</sup>

### Percobaan Gagal Komunisme Cina

Sejak revolusi komunis Cina tahun 1948, pemerintahan Mao Zedong/Mao Tse-Tung mendesain negara ini menjadi negara komunis melalui kebijakan kolektivisme ekonomi, yakni dengan penghapusan kepemilikan individu dan industrialisasi melalui kewajiban kerja untuk meningkatkan hasil pertanian dan industri di bawah kontrol partai komunis. Program ini dicanangkan oleh rezim melalui kebijakan Lompatan Jauh ke Depan periode tahun 1958 - 1961.

Kebijakan peningkatan pertanian dan industrialisasi ini gagal. Kelaparan menyebar, khususnya di pedesaan, mengakibatkan jutaan kematian. Warga bahkan terpaksa memakan kulit pohon dan kotoran. Di beberapa daerah bahkan sebagian menjadi kanibal, memakan daging manusia.

Petani yang gagal memenuhi kuota panen, yang berusaha melarikan diri, disiksa dan dibunuh bersama anggota keluarganya melalui pemukulan, mutilasi di depan umum, dikubur hidup-hidup, direbus dengan air mendidih, dan metode lainnya. Diperkirakan sekitar 30 hingga 45 juta kematian akibat kelaparan, eksekusi, penyiksaan, kerja paksa, dan bunuh diri karena putus asa di era ini.<sup>6</sup>

Penderitaan di bawah Komunisme berlanjut pada tahun 1966 – 1976. Tahun ini dikenal sebagai masa Revolusi Kebudayaan (*cultural revolution*), yakni upaya penghapusan besar-besar tradisi lama. Melalui kelompok Pengawal Merah (*Red Guards*) anak-anak muda dikerahkan untuk melakukan aksi-aksi teror dan anarkisme terhadap kalangan atau properti yang dianggap berseberangan dengan cita-cita Komunisme. Banyak sekolah, universitas dan gereja, kuil, perpustakaan, toko dan rumah

pribadi digeledah atau dihancurkan dengan mengatasnamakan revolusi tersebut. Banyak guru, intelektual dipersekusi bahkan dibunuh.

Saat Revolusi Kebudayaan ini berakhir tahun 1976, diperkirakan antara 500.000-2.000.000 orang meninggal, serta 36 juta orang dipersekusi atau dianiaya.<sup>7</sup>

Teror Revolusi Kebudayaan ini dicetuskan setelah Mao mendeklarasikan melalui media nasional *Harian Rakyat* untuk menyapu bersih orang-orang yang dianggap monster dan iblis. Nasib setiap orang berakhir di label: anda bagian dari Komunisme atau bukan.

### Genosida Komunisme di Negara Lain

Komunisme Kamboja berkuasa relatif singkat, yakni tahun 1975-1979, melalui kekuasaan Partai Khmer Merah (Khmer Rouge) yang dipimpin oleh Pol Pot. Dia mengambil-alih kekuasaan dan mencoba mengaplikasikan masyarakat agraris tanpa kelas di negara ini.

Metode yang digunakan adalah dengan memindahkan penduduk kota yang mapan ke desa-desa untuk ikut mensukseskan visi masyarakat agraris dengan dipaksa bertani dan membangun bendungan. Bank-bank ditutup. Pasar dan penggunaan uang dilarang. Namun, kebijakan ini malah melahirkan banyak penderitaan, kelaparan dan penyakit.

Selain itu, rezim Pol Pot juga melakukan pembersihan kepada orang-orang yang dianggap musuh seperti kelompok-kelompok agama Kristen, Budha dan Islam dan etnis minoritas. Umat Islam Cham dianggap paling menderita oleh genosida dengan jumlah korban 500.000 orang atau 70% dari total populasi Muslim Cham.

Selain itu kalangan profesional seperti guru, pengacara, dokter, dan pendeta menjadi target penangkapan dan pemusnahan rezim. Bahkan orang-orang berkacamata atau berbahasa asing akan menjadi sasaran teror oleh rezim ini. Secara keseluruhan sampai tahun 1979, jumlah korban rezim komunis Khmer Merah ini berjumlah antara 1,5 – 3 juta orang.<sup>8</sup>

Nasib yang sama menimpa masyarakat Korea Utara, di era Kim Il Sung (1948-1994) implementasi komunisme di negara ini membuat masyarakat terbagi dalam pro dan kontra komunis. Ribuan bahkan jutaan orang yang kontra dan kritis terhadap rezim ini dari kalangan intelektual, media, pemilik lahan akan diberangus, ditangkap, dibunuh, atau diisolasi di daerah terpencil yang miskin.

Di Vietnam Utara, sejak tahun 1940an, Komunisme juga memakan banyak korban khususnya terhadap kalangan pemilik lahan, petani yang kaya, kelompok oposisi dan orang-orang asing. Ratusan ribu orang yang dianggap berbeda kelas disiksa, dipenjara, bahkan dibunuh oleh rezim komunis Vietnam.<sup>9</sup>

Indonesia juga pernah merasakan pengalaman buruk dengan komunisme, gerombolan partai komunis di Indonesia terlibat beberapa pemberontakan dan memakan banyak korban baik santri maupun ulama termasuk pesantren dan masjid yang menjadi sasarannya. Untungnya, gerakan ini tidak sampai menjadi rezim yang berkuasa di Indonesia. Seandainya terjadi, Indonesia mungkin akan mengalami nasib yang sama dengan negara lain: dipecah-belah, persekusi, pembunuhan massal, intimidasi, pemenjaraan, isolasi, dan kerja paksa.

Dalam buku *Catatan Hitam Kriminalitas Komunisme* (1999) dijabarkan korban kebrutalan Komunisme di berbagai negara<sup>10</sup>:

1. Uni Soviet : 20 juta korban
2. Cina : 65 juta korban
3. Vietnam : 1 juta korban
4. Korea Utara : 2 juta korban
5. Kamboja : 2 juta korban
6. Eropa Timur : 1 juta korban
7. Amerika Latin : 150,000 korban
8. Afrika : 1,7 juta korban
9. Afghanistan : 1,5 juta korban.

Semua daftar kematian di negara-negara yang pernah dikuasai komunis adalah implementasi dari sebuah ideologi yang cacat yang menilai problem masyarakat dari persoalan kelas-kelas

sosial. Seolah-olah jika kelas hilang maka hilang pula penderitaan masyarakat. Memang, revolusi komunis ini terbangun dari kegagalan rezim sebelumnya untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan. Namun, dengan pemahaman yang keliru, alih-alih membawa kebaikan, malah menciptakan permusuhan di tengah-tengah masyarakat dan pembantaian terhadap orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah.

Kegagalan dari program Komunisme di negara-negara komunis itu membuat rezim-rezim politik setelahnya mengubah haluan meninggalkan resep dari ideologi yang bengis ini. Komunisme akhirnya menjadi salah satu penyumbang pembunuhan terbesar dalam sejarah umat manusia. □

### Catatan kaki:

- <sup>1</sup> R.J. Rummel, 'Murder by Communism', November 1993, <https://www.hawaii.edu/powerkills/COM.ART.HTM>.
- <sup>2</sup> 'Great Terror: 1937, Stalin & Russia', HISTORY, 4 October 2022, <https://www.history.com/topics/european-history/great-purge>.
- <sup>3</sup> Giles Fraser, 'Why the Soviet Attempt to Stamp out Religion Failed', *The Guardian*, 26 October 2017, sec. Opinion, <https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2017/oct/26/why-the-soviet-attempt-to-stamp-out-religion-failed>.
- <sup>4</sup> 'Lenin on the Komsomol', *Seventeen Moments in Soviet History* (blog), 27 August 2015, <https://soviethistory.msu.edu/1924-2/young-communists/young-communists-texts/lenin-on-the-komsomol/>.
- <sup>5</sup> David Satter, '100 Years of Communism—and 100 Million Dead', WSJ, accessed 1 August 2023, <https://www.wsj.com/articles/100-years-of-communism-and-100-million-dead-1510011810>.
- <sup>6</sup> Investopedia Team, 'Great Leap Forward: What It Was, Goals, and Impact', Investopedia, accessed 2 August 2023, <https://www.investopedia.com/terms/g/great-leap-forward.asp>.
- <sup>7</sup> Pankaj Mishra, 'What Are the Cultural Revolution's Lessons for Our Current Moment?', *The New Yorker*, 25 January 2021, <https://www.newyorker.com/magazine/2021/02/01/what-are-the-cultural-revolutions-lessons-for-our-current-moment>.
- <sup>8</sup> 'Cambodia', College of Liberal Arts, accessed 2 August 2023, <https://cla.umn.edu/chgs/holocaust-genocide-education/resource-guides/cambodia>.
- <sup>9</sup> '50 Years On, Vietnamese Remember Land Reform Terror', Radio Free Asia, accessed 2 August 2023, [https://www.rfa.org/english/news/vietnam\\_landreform-20060608.html](https://www.rfa.org/english/news/vietnam_landreform-20060608.html).
- <sup>10</sup> Stephane Courtois et al., *The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression* (Oxford University Press, 1999).



# MERDEKA

*"Allah Subhaanahu wa Ta'aala memerintahkan kami untuk membebaskan manusia dari memperhambakan diri kepada selain Allah dan melepaskan belenggu duniawi menuju dunia bebas, dan dari agama yang sesat menuju keadilan Islam."*

**D**i atas adalah pernyataan tegas Ruba'i menjawab pertanyaan Panglima Rustum, pemimpin pasukan Persia menjelang Perang al-Qadhisyah (15H - 636 M), tentang mengapa pasukan Islam masuk ke tanah Persia. Ruba'i bin Amir memang dikirim oleh panglima tentara Islam ketika itu, Saad bin Abi Waqqash, untuk menghadap panglima tentara Persia, Rustum.

Ketika Ruba'i masuk ke dalam perkemahan Panglima Rustum, ia hanya berpakaian sederhana. Dengan menunggang kuda pendek dan menyandang senjata serta perisai, ia masuk tanpa menghiraukan keadaan sekelilingnya, termasuk reaksi para pembesar Persia yang geram melihat kehadiran Ruba'i yang tak acuh kepada mereka.

Pernyataan Ruba'i itu menegaskan bahwa dorongan "ekspansi" Islam bukanlah bersifat material, sebagaimana yang dilakukan imperialis-kolonialis Barat ketika mereka merangsek masuk ke wilayah-wilayah jajahan

di Timur Tengah, Asia Selatan atau Asia Tenggara. Mereka berusaha keras menemukan daerah baru untuk mengeksploitasi hasil buminya tanpa sisa. Inilah semangat ekspansi demi "Gold, Glory and Gospel" (emas, kekuasaan dan agama).

Rustum, sang panglima dari sebuah negara adikuasa kala itu, mungkin menduga tentara Islam memiliki motif yang kurang lebih sama dengan Persia ketika menaklukkan daerah-daerah baru. Rustum kecele. Ruba'i justru memberikan perspektif baru tentang dorongan ekspansi Islam, yaitu tauhid.

Misi Islam adalah menyeru seluruh manusia pada tauhid dengan jalan dakwah dan jihad. Dakwah adalah mengubah manusia, pikiran, perasaan dan perilakunya; dari jahiliah ke Islam; sekaligus mewujudkan pola hubungan antarmanusia berdasarkan hukum Allah dan memerdekakan manusia dari pengaruh *thaaghuut*.

Pada masa Rasulullah saw., *thaaghuut* adalah berhala-berhala yang disembah di seputar Ka'bah. Kini, *thaaghuut* telah berubah wajah (meski hakikatnya sama), menjadi ideologi-ideologi yang bersumber pada filsafat materialisme, yang mengingkari kedaulatan Allah, beserta segenap turunannya berupa sistem hukum, politik, ekonomi, sosial dan

## Catatan Dakwah

budaya.

Inilah kemerdekaan hakiki dalam pandangan Islam. Seseorang atau masyarakat baru bisa dikatakan benar-benar merdeka ketika ia bisa tunduk sepenuhnya pada seluruh perintah dan larangan Allah serta melepaskan diri dari belenggu sistem yang bertentangan dengan tauhid seraya menegakkan sistem Islam. Al-Quran menyebut misi Islam mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Makanya, tidak ada negeri yang dikuasai Islam berubah kusam, sengsara, mundur dan terbelakang. Spanyol dan beberapa negeri Eropa lain, misalnya, justru mencapai kemajuan ketika berada di bawah kekuasaan Islam, saat belahan dunia lain sedang mengalami masa kegelapan.

Sebaliknya, kolonialisme Barat, juga Timur, selamanya menyebarkan kehajilahan dan

kolonialisme Barat, juga Timur, selamanya menyebarkan kehajilahan dan kerusakan. Al-Quran menyebutnya *dzulumaat* (kegelapan). Di bidang aqidah, mereka menyebarkan filsafat materialism. Di bidang pemikiran menyebarkan sekularisme dan liberalism. Di bidang politik menyebarkan demokrasi machiavelistik yang menghalalkan segala cara guna meraih kekuasaan. Di bidang ekonomi menyebarkan tatanan ekonomi Kapitalisme yang eksploitatif. Di bidang budaya menyebarkan amoralisme. Di bidang militer menyebarkan peperangan, adu domba dan pertentangan.

kerusakan. Al-Quran menyebutnya *dzulumaat* (kegelapan). Di bidang aqidah, mereka menyebarkan filsafat materialism. Di bidang pemikiran menyebarkan sekularisme dan liberalism. Di bidang politik menyebarkan demokrasi machiavelistik yang menghalalkan segala cara guna meraih kekuasaan. Di bidang ekonomi menyebarkan tatanan ekonomi Kapitalisme yang eksploitatif. Di bidang budaya menyebarkan amoralisme. Di bidang militer menyebarkan peperangan, adu domba dan pertentangan.

++++

Jadi, sudahkah negeri ini benar-benar merdeka? Secara fisik militer, Indonesia memang telah merdeka dari penjajah sebagaimana dinyatakan dalam Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945. Namun, setelah tujuh puluh lima tahun lebih berlalu, apakah kita telah benar-benar merdeka secara hakiki? Jawabannya bergantung pada apa pengertian kita tentang penjajahan dan apa itu merdeka.

Dalam kitab *Mafaahim Siyaasiyah*, dikatakan penjajahan sesungguhnya tidaklah benar-benar berakhir. Kapitalisme akan selalu berupaya menyebarkan paham dan mempertahankan pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia. Metode atau *thariiqah*-nya melalui penjajahan (*isti'maar*), berupa penguasaan (pengendalian) dan dominansi di bidang politik, ekonomi, sosial pendidikan, budaya dan hankam.

Pada masa Perang Dunia I dan II, persisnya setelah payung Dunia Islam, Khilafah Utsmani runtuh pada tahun 1924, yang dilakukan negara imperialis adalah penjajahan militer. Negeri Islam yang semula utuh bersatu menjadi terpecah-pecah. Sebagiannya lama sebelum itu malah sudah diduduki oleh penjajah. Di antaranya, Aljazair oleh Prancis, Libya oleh Itali, Irak, India, Palestina, Yordania, Mesir dan kawasan

Teluk dikuasai Inggris dan sebagainya.

Kini setelah wilayah-wilayah itu merdeka, Barat tetap berusaha menjajah dengan cara yang baru. Di bidang ekonomi, penjajahan dilakukan melalui peminjaman dana. Dengan dalih membantu negara berkembang, termasuk Indonesia, mereka meminjamkan uang dalam jumlah besar. Belakangan terbukti hutang tersebut bukan mengentaskan kemiskinan, melainkan malah menambah miskin. Barat lewat berbagai institusi-institusi yang mereka bentuk seperti IMF, World Bank dan sebagainya, memaksakan kemauan politiknya atas suatu negara, baik secara langsung maupun tidak. Maka dari itu, negeri-negeri itu menjadi tidak merdeka secara politik. Penjajahan ekonomi juga dilakukan dengan berbagai aturan yang mereka paksakan, seperti ide pasar bebas dengan WTO-nya. Juga melalui program-program yang memuluskan penguasaan sumberdaya ekonomi seperti program privatisasi. Akibatnya, sekalipun secara fisik Indonesia merdeka, secara politik dan ekonomi terjajah.

Di bidang kebudayaan, globalisasi informasi yang ditimbulkan oleh kemajuan luar biasa di bidang teknologi informasi bak pisau bermata dua. Satu sisi menguntungkan, tetapi di sisi lain terjadi pula gelombang arus budaya Barat (westernisasi) ke negeri-negeri Islam. Itu semua sangat berpengaruh pada cara berpikir, pemihakan, keprihatinan dan perilaku kaum Muslim. Inilah penjajahan di bidang budaya.

Di bidang hukum, tak terhitung jumlahnya hukum dan perundang-undangan negeri Muslim, termasuk Indonesia, yang masih bersumber dari Barat. Kita bangga terbebas dari penjajahan Belanda, tetapi masih menggunakan undang-undang buatan Belanda? Itu berarti, secara tidak langsung kita menyelesaikan berbagai masalah di negeri yang mayoritas Muslim ini dengan cara penjajah. Penjajah memang telah lama pergi, tetapi ternyata mereka masih tetap bercokol dalam

wajah yang berbeda.

++++

Menjadi kewajiban kaum Muslim secara bersama, untuk bertafakur menyertai rasa syukur, dengan melihat realitas yang ada di negeri kita di segala bidang. Sudahkah semua sistem yang mengatur kehidupan umat di segala bidang ditegakkan di atas prinsip tauhid? Juga, sudahkah hakikat dan prinsip-prinsip kemerdekaan hakiki menurut ajaran Islam seperti yang dikemukakan oleh Ruba'î bin Amir tadi telah kita dapatkan?

Jika belum, menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki itu. Jika perjuangan dulu bertujuan untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan fisik, kini diperlukan perjuangan baru untuk membebaskan umat dari penjajahan ideologi sekuler, hukum jahiliah, ekonomi kapitalis, budaya dan segenap tatanan yang tidak islami.

Di sinilah pentingnya spirit hijrah untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki harus terus digaungkan. Hijrah secara maknawi dikatakan oleh para ulama sebagai meninggalkan apa yang dilarang Allah. Secara *syar'î* hijrah adalah keluar dari negeri kafir kepada negeri iman, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dan para Sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah.

Dengan dua pengertian hijrah tadi, jelaslah bahwa tujuan hijrah tak lain adalah untuk mewujudkan ketaatan sepenuhnya kepada Allah. Ketaatan itu tampak dalam penerapan syariah secara *kaaffah* baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan masyarakat dan negara sedemikian sehingga terwujud rahmat bagi sekalian alam.

Tanpa itu, selamanya kita akan terus terjajah dan tenggelam dalam lumpur kehinaan. Tidak ada lagi kemuliaan Islam dan ummatnya (*'Izz al-Islam wa al-Muslimiin*). *Na'udzubillaah min dzaalik.* □

# BAGAIMANA SPIRIT ISLAM MELAWAN PENJAJAHAN?

## Soal:

Bagaimana spirit perlawanan Islam terhadap penjajahan? Bisa dijelaskan, bentuk-bentuk perlawanan Islam terhadap penjajahan, baik fisik maupun non-fisik?

## Jawab:

Penjajahan di dunia bisa dipilah menjadi dua. *Pertama*, penjajahan fisik. *Kedua*, penjajahan non-fisik. Penjajahan fisik dilakukan dengan pendudukan (*ihtilaal*); dengan menduduki wilayah, menguasai sumberdaya alam, menundukkan sumberdaya manusianya, kemudian mengontrol kekuasaan militer, politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Penjajahan non-fisik dilakukan melalui pemikiran, pendidikan, budaya, dan *soft power* yang lainnya. Biasanya dilakukan dengan menggunakan strategi dan agen. Strategi ini merupakan *usluub*, sedangkan agen merupakan *wasilah*-nya. Mereka ditanam di semua sektor; mulai dari sektor politik, pemerintahan, militer, ekonomi, budaya, agama, hukum dan sebagainya.

Karena itu meski secara *de jure* negeri-negeri kaum Muslim sudah dinyatakan merdeka, secara *de facto* ternyata masih tetap terjajah. Secara *de jure* penjajahan fisik tampak tidak ada. Ini karena mereka telah meninggalkan negeri kaum Muslim. Namun, secara *de facto* pemikiran, *mindset* dan cara pandang penjajah itu tetap dipertahankan oleh koloni penjajah ini. Bahkan tidak malu, mereka mengundang penjajah itu untuk menganggangi dan mengeruk negerinya,



Diasuh oleh:

KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca *al-wa'ie*, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

dengan menggunakan berbagai istilah yang menipu, “investasi”, atau “negara donor”, dan sebagainya.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana spirit perlawanan Islam terhadap segala bentuk penjajahan ini? Jawabannya terletak pada spirit *ubudiyah* (penghambaan), yang terpatri para kalimat, “*Laa ilaaha illaa-Llaah, Muhammad Rasuulu-Llaah*” (Tidak ada yang berhak disembah, dan dijadikan tempat mengabdikan diri, kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah).

Penjajahan, baik fisik maupun non-fisik, sesungguhnya merupakan manifestasi dari *isti'baad* (perbudakan), yaitu menjadikan manusia sebagai hamba manusia. Karena itu Islam telah mengharamkan penjajahan. Allah SWT berfirman:

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾

*Sungguh Aku adalah Allah. Tidak ada tuhan yang lain, selain Aku. Karena itu sembahlah Aku (QS Thaha [1]: 14).*

Imam ath-Thabari menjelaskan:

“*Innanii Anaa Allaah* (Sungguh Aku adalah Allah).” Maknanya: Allah menyatakan, “Sungguh Akulah Tuhan Yang berhak disembah.” Tak ada penghambaan kecuali kepada Dia. Tidak ada satu pun tuhan, kecuali Aku. Karena itu janganlah kalian menyembah yang lain, selain Aku. Sungguh tidak ada yang berhak menjadi tempat menghambakan diri, yang boleh dan layak dijadikan sembah, selain Aku. “*Fa'budnii* (Karena itu sembahlah Aku).” Maknanya: Allah menyatakan, “Murnikanlah ibadah hanya kepada-Ku, bukan sesembahan lain, selain Aku.”<sup>1</sup>

Kalimat Tauhid itu telah terpatri di dalam hati setiap orang Islam. Hanya saja, refleksi dari kalimat tauhid itu ada yang kuat, ada yang tidak, bergantung pada kejernihan pemahaman masing-masing. Jika tauhid mereka murni dan jernih, kemudian pemahaman yang terbentuk dari sana juga jernih, maka tauhid itu akan membangkitkan perlawanan mereka. Inilah yang tampak dari kalimat Rub'i bin 'Amir kepada Rustum:

اللّٰهُ ابْتَعَثْنَا لِنُخْرِجَ مِنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى  
عِبَادَةِ اللّٰهِ، وَمَنْ ضَيَّقَ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، وَمَنْ جَوَّرَ  
الْأَدْيَانَ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، فَأَرْسَلْنَا بَدِينَهُ إِلَى خَلْقِهِ  
لِنُدْعُوهُمْ إِلَيْهِ، فَمَنْ قَبِلَ ذَلِكَ قَبَلْنَا مِنْهُ وَرَجَعْنَا عَنْهُ،  
وَمَنْ أْبَى قَاتَلْنَاهُ حَتَّى نَفِيءَ إِلَى مَوْعِدِ اللّٰهِ

*"Allah telah mengirim kami untuk membebaskan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan diri kepada manusia menuju penghambaan diri kepada Allah; dari sempitnya dunia menuju dunia yang luas; dari kezaliman agama-agama yang ada menuju keadilan Islam. Lalu Dia mengirim kami dengan mengemban agama-Nya ini kepada seluruh makhluk-Nya agar kami bisa mengajak mereka memeluknya. Siapa saja yang menerima agama ini, kami pun menerima pengakuannya dan akan membiarkan dirinya. Namun, siapa saja yang tidak mau, kami pun akan memerangi dirinya sehingga kami bisa memenuhi apa yang telah Allah janjikan."*<sup>2</sup>

Dengan spirit tauhid itu, seorang Muslim akan mempunyai 'izzah (kehormatan dan kemuliaan). Tidak ada siapapun yang boleh menghina dan menginjak-injak kehoramatannya. Allah SWT berfirman:

﴿وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا  
يَعْلَمُونَ﴾

Kalimat Tauhid itu telah terpatri di dalam hati setiap orang Islam. Hanya saja, refleksi dari kalimat tauhid itu ada yang kuat, ada yang tidak, bergantung pada kejernihan pemahaman masing-masing. Jika tauhid mereka murni dan jernih, kemudian pemahaman yang terbentuk dari sana juga jernih, maka tauhid itu akan membangkitkan perlawanan mereka.

*Hanya milik Allah, Rasul-Nya dan kaum Mukmin kemuliaan itu. Namun, kaum munafik tidak mengetahuinya (QS al-Munafiqun [1]: 8).*

Darah, harta dan kehormatan mereka pun wajib dijaga dan dipertahankan hingga nyawa taruhannya. Karena itu Nabi saw. bersabda:

«فِيَّانَ دِمَاءِكُمْ، وَأَمْوَالِكُمْ، وَأَعْرَاضِكُمْ، وَأَبْشَارِكُمْ،  
عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا،  
فِي بَلَدِكُمْ هَذَا»

*Sungguh darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian dan kulit kalian merupakan kesucian bagi kalian, sebagaimana kesucian hari kalian ini, pada bulan kalian ini dan di negeri kalian ini (HR al-Bukhari dan Muslim).*

Bahkan kaum Muslim yang mati karena mempertahankan agama, harta dan



kehormatannya dinyatakan oleh Nabi saw. sebagai syahid:

«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

Siapa saja yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Siapa saja yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia syahid. Siapa saja yang terbunuh karena membela darahnya, maka dia syahid. Siapa saja yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia syahid (HR at-Tirmidzi).

Karena itu Islam telah menetapkan jihad sebagai metode baku untuk mengemban dan mempertahankan Islam. Allah berfirman:

«وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ»

Selama kaum Muslim masih mempunyai akidah Islam yang terpatri dengan kokoh di dalam jiwanya, dan jernih, sehingga pemahamannya mengkristal di dalam dirinya, maka selama itu mereka tidak akan bisa dijajah. Hanya saja, kaum kafir tahu, bagaimana caranya menjajah dan menguasai kaum Muslim, yaitu menggunakan antek-antek mereka, kaum munafik, yang bisa mereka beli.

Perangilah mereka [kaum kafir] itu hingga tidak ada lagi fitnah [kekufuran] dan agama ini semuanya menjadi milik Allah (QS al-Anfal [8]: 39).

Jihad adalah mengerahkan seluruh daya dan upaya dalam perang fisik melawan kaum kafir untuk menegakkan kalimah Allah, baik dengan harta, pemikiran maupun yang lain. Jihad, dalam pandangan Islam, ada yang bersifat ofensif, seperti penaklukan, dan hukumnya fardhu kifayah. Ada juga yang bersifat defensif, untuk mempertahankan agama, harta, kehormatan, dan lain-lain, dan hukumnya fardhu ain.

Selama kaum Muslim masih mempunyai akidah Islam yang terpatri dengan kokoh di dalam jiwanya, dan jernih, sehingga pemahamannya mengkristal di dalam dirinya, maka selama itu mereka tidak akan bisa dijajah. Hanya saja, kaum kafir tahu, bagaimana caranya menjajah dan menguasai kaum Muslim, yaitu menggunakan antek-antek mereka, kaum munafik, yang bisa mereka beli. Melalui mulut dan tangan merekalah para penjajah itu akhirnya bisa menguasai dan menjajah negeri-negeri kaum Muslim, seperti saat ini.

Karena itu, Islam satu-satunya kekuatan di muka bumi ini yang tak bisa dikalahkan oleh musuh, khususnya negara-negara kafir penjajah Barat. Karena kesadaran itulah mereka menaklukkan kaum Muslim dengan menaburkan racun, yang meracuni pemikiran kaum Muslim, sehingga melemahkan kekuatan mereka, termasuk spirit perlawanan Islam yang terpatri di dalam jiwa mereka.

Wallahu a'lam. []

Catatan kaki:

- 1 Ibn Jarir a-Thabari, Tafsir at-Thabari, Q.s. Thaha: 14.
2 Ibn Jarir a-Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, Juz III/ 520; Ibn Katsir, al-Bidayah wa an-Nihayah, Juz VII/39.

# 'IBÂD AR-RAHMÂN: TERDEPAN DALAM KEBENARAN

**Irfan Abu Naveed**

Umat Islam adalah umat terbaik (QS Ali 'Imran [3]: 110). Kebaikannya mencakup sifat terdepan dalam kebaikan dan kebenaran. Hal itu tersurat *nan* tersirat dalam doa yang diajarkan dalam al-Quran; yang diperkenalkan sebagai doa *'Ibâd ar-Rahmân* (hamba-hamba Allah Yang Maha Pengasih), dalam potongan doa (*iqtibâs*) dari al-Quran:

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ  
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾

*Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi kaum yang bertakwa (QS al-Furqan [25]: 74).*

Menariknya, potongan ayat di atas, bagian dari perincian sifat-sifat *'Ibâd ar-Rahmân* (hamba-hamba Allah yang shalih) yang mengandung petunjuk-petunjuk agung: *Pertama*, doa ini mengajarkan kedekatan dengan Allah. Artinya, seseorang wajib dekat dengan Allah, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan diri dan orang-orang terdekatnya. Doa ini harus dipanjatkan dengan *qalbu* yang khushyuk, dekat dengan Allah. Ini ditandai dengan lafal *rabbânâ*, yang tidak didahului oleh *harfan-nidâ'* (semisal lafal: *yâ*). Demikian sebagaimana diuraikan Prof. Dr.

Aiman Amin 'Abdul Ghani dalam *Al-Kâfi fi al-Balâghah*.

*Kedua*, doa ini mengajarkan sifat peduli, mengajak sebanyak-banyaknya orang dalam doa yang penuh dengan kebaikan. Ini ditandai dengan bentuk *nahnu* (kami) yang disisipkan dalam kata-kata ganti dalam doa, bukan lagi berbicara *anâ* (keakuan). Ini menegaskan egosentrisme pada keshalihan diri sendiri. Doa agar diri, keluarga bahkan masyarakat bahagia dengan ketaatan pada-Nya. Ini sebagaimana diuraikan Syaikh Ali ash-Shabuni dalam *Shafwat al-Tafâsîr* (II/340): “Maknanya: Jadikanlah kebahagiaan dan kesenangan untuk kami, pada istri-istri dan anak-anak, dengan berpegang teguh senantiasa menaati-Mu dan beramal untuk meraih keridhaan-Mu.”

*Ketiga*, Doa ini mengajarkan mulianya cita-cita yang tinggi (*'uluww al-himmah*), menjadi insan terdepan dalam kebenaran. Ini karena lafal *"imâm[an]"* menunjukkan pribadi yang diikuti. Ada *ma'mûm* di belakangnya yang meneladani ketakwaannya kepada Allah. Syaikh Ali ash-Shabuni mengungkapkan: Maknanya, agar Allah menjadikan kita teladan yang diikuti oleh orang-orang yang bertakwa; golongan yang mengajak pada kebenaran; golongan yang menunjuki orang-orang yang mencari jalan petunjuk. Ibn 'Abbas ra. dalam *atsar*-nya menyifati:

«أئمة يقتدى بنا في الخير»

“Para pemimpin yang diikuti dalam kebaikan.”

Menariknya, dalam doa ini terkandung *qashr* (pengkhususan), bahwa kita hanya meminta dijadikan teladan terdepan bagi kaum yang bertakwa, bukan teladan keburukan bagi kaum yang durhaka dengan kedurhakaannya.

Tingginya cita-cita dan upaya (*himmah*) itu sendiri menjadi ciri tingginya keimanan. Dalam *atsar*-nya Ali bin Abi Thalib ra. bertutur:

«عَلُوُّ الْهِمَّةِ مِنَ الْإِيمَانِ»

“Tingginya cita-cita adalah bagian dari keimanan.”

Mereka adalah golongan yang Allah sifati dalam ayat lanjutan:

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً  
وَسَلَامًا ﴿٢٣﴾ خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

mereka yang disifati dengan sifat-sifat mulia *'Ibâd ar-Rahmân* menggapai derajat yang tinggi, karena kesabaran mereka menjalankan syariah Allah. Mereka mendapati penghormatan dan ucapan selamat dari para malaikat yang mulia.

Mereka itulah orang yang diganjar dengan martabat yang tinggi (dalam surga) karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itulah sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman (QS al-Furqan [25]: 75-76).

Maknanya, mereka yang disifati dengan sifat-sifat mulia *'Ibâd ar-Rahmân* menggapai derajat yang tinggi, karena kesabaran mereka menjalankan syariah Allah. Mereka mendapati penghormatan dan ucapan selamat dari para malaikat yang mulia. Demikian sebagaimana firman-Nya:

﴿جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾

(yaitu) Surga *'Adn* yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang shalih dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak-cucunya. Para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu (QS al-Ra'd [13]: 23).

### Renungan: Golongan Penjegal Dakwah Bakal Binas

Karakter *'Ibâd ar-Rahmân* yang mulia, berbeda dengan karakter mereka yang terpedaya dengan dunia. Mereka tuli dan buta ketika diperingatkan Allah dengan ayat-ayat-Nya. Allah menyifati *'Ibâd ar-Rahmân*:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾

(*'Ibâd ar-Rahmân*) adalah orang-orang yang jika diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta (QS al-Furqan [25]: 73).

Menafsirkan ayat ini, Syaikh Ali al-Shabuni dalam *Shafwat at-Tafâsir* (II/340) menjelaskan: Maknanya, jika telah diperingatkan dengan ayat-ayat al-Quran, dan dimunculkan rasa takut dengannya, maka mereka tak akan berpaling darinya. Mereka mendengarkan dengan seksama dan *qalbu* yang peka. Adapun golongan yang tuli dan buta dari peringatan-Nya, jelasnya menggambarkan sifat-sifat kaum yang durhaka, di antaranya al-'Ash bin Wa'il dan Abu al-Asyad bin Kaldah.

Al-'Ash bin Wa'il *la'natullaahi 'alayhi*, ketika ditagih hutang oleh Khabbab bin al-Art ra., malah berbicara mengolok-olok, dengan berkata, "Demi Tuhan. Aku tidak akan membayarmu sebelum kamu kafir kepada Muhammad." Lalu Khabbab berkata, "Tidak. Demi Allah. Aku tidak akan kafir kepada Muhammad saw. sampai kamu mati pun, kemudian kamu dibangkitkan." Al-'Ash bin Wa'il mengatakan, "Kalau demikian, biarlah saya mati, lalu saya dibangkitkan dan kamu datang kepadaku, karena saat itu aku mempunyai harta dan anak, dan aku akan membayarmu."

Kemudian turunlah ayat:

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا  
 ﴿١٩﴾ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٢٠﴾ كَلَّا  
 ﴿٢١﴾ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿٢٢﴾

Apakah kamu telah melihat orang yang kafir pada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan, "Pasti aku akan diberi harta dan anak." Adakah ia melihat yang ghaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah? Sekali-kali tidak. Kami akan menulis apa yang ia katakan. Benar-benar Kami akan memperpanjang azab untuk dirinya (QS Maryam [19]: 77-79).

Jangankan di akhirat, di dunia saja ia mati dalam kebinasaan, dengan penyakit

mematikan.

Adapun Abu al-Asyad bin Kaldah adalah orang angkuh. Dia mengaku mengeluarkan harta yang banyak untuk memusuhi Rasulullah saw. Dia berkata dengan *riya* 'dan *sum'ah*: "Aku telah mengeluarkan harta yang sangat banyak untuk memusuhi Muhammad saw."

Apakah harta bendanya tersebut membuahkan kebaikan? Tidak. Justru Allah menyifati pengakuannya—yang mengeluarkan harta—dengan sifat menghancurkan harta secara sia-sia:

﴿يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا﴾

Dia mengatakan, "Aku telah menghabiskan harta yang banyak." (QS al-Balad [90]: 6).

Menariknya, Imam Syihabuddin al-Alusi (w. 1342 H) dalam tafsirnya (XXX/136) menjelaskan: "Tujuan dari perkataannya itu bahwa harta yang ia keluarkan untuk pamer dan *sum'ah*, dimana perbuatan mengeluarkan harta diungkapkan (dalam ayat) dengan *ihlâk* (merusak harta), untuk menonjolkan tidak adanya kepedulian (pada harta), dan bahwa ia tidak melakukan demikian demi mengharapkan manfaat, seakan-akan ia menjadikan harta benda yang banyak itu hilang." Hilang tak bernilai karena tidak meninggalkan jejak kebaikan. Mahabener Allah Yang berfirman:

﴿فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ

فَيَمُكُّ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾

Buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia akan tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan (QS ar-Ra'd [13]: 17).

Wallahu a'lam bi ash-shawaab. []



# WOMEN, PEACE AND SECURITY

## WOMEN, PEACE AND SECURITY DAN KEPENTINGAN PENJAJAHAN BARAT

**Fatma Sunardi**

**A**ri ini menjadi Muslimah harus kritis. Termasuk kritis terhadap setiap narasi dan program yang diuruskan atas nama kepentingan perempuan. Salah satunya adalah isu perdamaian dan keamanan atau *Women, Peace and Security* (WPS).

Semua program WPS berangkat dari kerangka global. Dikatakan kerangka global karena datang dari Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) S/RES/1325 seputar wanita, perdamaian dan keamanan. WPS diadopsi oleh DK PBB pada 31 Oktober 2000, usai mengulang resolusi sebelumnya.[1]

Dikuatkan oleh program mencegah ekstremisme dan terorisme (*preventing violent extremism/PVE and countering terrorism*) dan SDGs tujuan ke-16, mereka mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses

keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Seruan PBB ini mendapat respon ASEAN dengan mengadopsi Rencana Aksi ASEAN pada 22 Oktober 2020. Tujuannya untuk memposisikan WPS sebagai pendekatan multilateral untuk perdamaian dan keamanan regional dan global yang berkelanjutan.[2]

Indonesia telah mendahului inisiatif ASEAN dengan mengadopsi Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, selanjutnya disingkat RAN P3A-KS, dengan nama PerPres No. 18 tahun 2014 tentang RAN P3AKS. Ini adalah produk kontekstualisasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan.[3]

Selain Resolusi DK PBB 1325 dan turunannya, ada kerangka kerja global berpengaruh lainnya terkait WPS. Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing (1995), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) PBB, adalah pendahulu agenda WPS. CEDAW membahasakan bahwa keterlibatan perempuan dalam konflik adalah bagian dari merealisasikan kesetaraan gender.

Singkat cerita, Program WPS bagian dari agenda besar PBB, yakni perdamaian dan menguatkan kesetaraan gender atas nama Hak-Hak Perempuan.

### Melestarikan Penjajahan

Bicara perdamaian tidak bisa dilepaskan dengan munculnya PBB pasca Perang Dunia ke-2 (PD II) dan kepentingan Amerika Serikat (AS). Sebagai pemenang PD II, AS memiliki ambisi yang didorong oleh ideologi Kapitalisme, yakni menyebarkan Kapitalisme dengan metode penjajahan (*imperialism*).

Namun, tekanan global mengharuskan AS mengubah cara penjajahan: dari kolonialisme menjadi neo-imperialisme. Dalam Kitab *Mafaahim Siyaasiyyah li Hizbi at-Tahriir*, Syaikh

Taqiuddin an-Nabhani mendefinisikan neo-imperialisme sebagai upaya memaksakan dominasi politik, ekonomi dan budaya kepada negara lain.

Neo-imperialisme memaksa AS untuk tidak tampil di panggung global sebagai kekuatan militer agresif dan ekspansif yang memaksa negara lain. Karena itu gagasan pembentukan PBB diusulkan. Dr. Stephen Wertheim, Sejarahwan AS, Wakil Direktur Riset dan Kebijakan Quincy Institute for Responsible Statecraft, Research Scholar, Columbia University, dalam bukunya berjudul *Tomorrow, the World: The Birth of US Global Supremacy*, menyatakan bahwa pemerintahan Roosevelt, dan sebagian besar elit lainnya, menilai PBB terutama sebagai sarana untuk memproyeksikan kekuatan AS secara global—dengan cara yang dianggap sah oleh publik Amerika dan komunitas internasional. Caranya dengan menyediakan sarana untuk mengelola opini publik dan memproyeksikan kekuatan militer. PBB telah menjadi alat bagi AS bahkan Barat untuk merealisasikan dominasi (penjajahan)-nya.

Dalam praktiknya penjajahan Barat telah memunculkan konflik, baik konflik antar negara-negara besar karena berebut pengaruh dan sumber daya alam (SDA), maupun konflik karena respon ketertindasan pihak yang dijajah. Kita bisa melihat konflik Ukraina dan Rusia, perebutan pengaruh antara Rusia dan AS beserta NATO. Kita juga melihat muncul konflik antara penduduk lokal dan korporasi (yang dibekingi negara besar) memperebutkan tanah, dan tempat hidup mereka yang dirampas oleh korporasi tambang, seperti kasus konflik warga Morowali Sulawesi Tengah dengan PT Gunbuster Nickel Industri (GNI).

Di sisi lain, umat Islam melakukan perlawanan politik atas penjajahan Kapitalisme dengan mengajak internal umat untuk kembali pada tatanan Islam. Umat juga merespon dengan *jihad* di daerah-daerah yang di situ kepentingan negara-negara imperialis sudah sampai pada merampas secara fisik tanah-tanah umat Islam,

seperti yang terjadi di Irak, Afghanistan, Suriah dan beberapa tempat di Afrika.

Alhasil, dunia sedang tidak aman, penuh konflik bahkan peperangan karena kerakusan negara-negara kapitalis. Semua konflik ini memunculkan banyak korban dari kematian hingga pengungsi. Bahkan jumlah kematian akibat konflik pada 2022 catat rekor tertinggi selama abad ke-21, dengan angka mencapai 238 ribu orang. Biaya pembunuhan massal dengan berbagai dalih dan kepentingan itu menelan sekitar 13% dari produk domestik bruto global. Data itu dipaparkan *Global Peace Index (Indeks Perdamaian Global/GPI)* yang dirilis Juni 2023 oleh Institute for Economics and Peace (IEP).

Barat yang dipimpin AS telah gagal mewujudkan dunia yang aman dan damai. Demi menjaga dominasi penjajahannya, Barat ingin meredam konflik dengan memainkan slogan perdamaian dan keamanan. Lalu digagaslah program global dengan inti isu perdamaian dan keamanan dengan melibatkan perempuan dengan nama *women, peace and security (WPS)*.

### Melibatkan Perempuan

Saat ini Barat sedang menghadapi isu keamanan yang paling rumit, yakni masalah kebangkitan Islam ideologis dan konflik-konflik akibat kegagalan Kapitalisme memberikan kesejahteraan dan keadilan. Konflik jenis yang ke-2 lebih dominan dan dibingkai dalam satu narasi 'radikalisme dan ekstrimisme'. Solusi yang ditawarkan dalam isu radikalisme dan ekstrimisme adalah sikap toleran pada perbedaan, anti kekerasan dan program pemberdayaan perempuan. Pelibatan perempuan dalam isu perdamaian dan keamanan/WPS akan memberikan manfaat bagi Barat.

Barat menganggap perempuan sebagai faktor kunci pengambilan keputusan di komunitas mereka dalam mencegah, mengatasi dan menyelesaikan konflik. Termasuk dalam isu penyebaran ekstremisme. "*Pekerjaan kami adalah untuk mengangkat suara perempuan dan*

*memberdayakan mereka untuk mencegah ekstremisme,”* kata Hanny Cueva Beteta, Penasihat Regional UN Women untuk Pemerintahan, Perdamaian dan Keamanan di Asia Pasifik.

Perempuan selalu dinarasikan pihak yang punya kemampuan menjaga perdamaian. Karena itu, menurut Barat, perempuan perlu didorong untuk ikut dalam Program WPS demi berperan sama dengan laki-laki. Tidak ada diskriminasi gender.

Program WPS akan menguatkan pemikiran gender yang batil dan mengalihkan akar masalah konflik sesungguhnya, yakni bahwa perdamaian tidak akan terwujud selama penjajahan Barat masih berlangsung. Kaum Muslimah harus mewaspadai ajakan mereka.

Barat ingin merebut potensi besar Muslimah karena dia adalah ibu generasi Muslim, pengemban dakwah dan politisi Muslim. Mereka adalah faktor penting bagi umat. Mereka turut mengajak umat agar selalu terikat pada Islam dan mewujudkan kepemimpinan yang menjaga umat dan melayani tuntutan hidup mereka berdasarkan syariah Islam.

Karena itu Barat selalu mengincar para Muslimah atas nama kepentingan perempuan. Tentu agar potensi besar mereka tidak lagi untuk Islam, tetapi untuk kepentingan Barat. Allah SWT mengingatkan kita agar berhati-hati terhadap jebakan kaum kafir dan memerintahkan kita agar konsisten dalam ber hukum pada syariah-Nya: *Hendaklah kalian memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Berhati-hatilah kalian terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kalian dari sebagian apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah Allah turunkan), maka ketahuilah bahwa Allah berkehendak menimpakan musibah (azab) kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sungguh kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik* (TQS al-Maidah [5]: 49).

Sikap Muslim dan Muslimah jelas tidak boleh

mengikuti narasi Barat meskipun itu dibungkus dengan isu perdamaian dunia. Ingatlah bahwa perdamaian dunia yang sesungguhnya akan lahir ketika Islam diterapkan. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kalian damaikan antara keduanya! Namun, kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kalian perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kalian berlaku adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil* (TQS al-Hujurat []: 9).

### Khatimah

Makin jelas, narasi WPS diarsurkan demi kepentingan penjajahan Kapitalisme sekaligus mencegah lahirnya aspirasi Islam politik di tengah-tengah umat. Para Muslimah adalah aset berharga. Dari Muslimah akan terlahir generasi umat yang sholih yang akan berjuang demi cita-cita Islam. Muslimah juga para politisi dan pengemban dakwah di tengah-tengah umat untuk mengajak umat melakukan perubahan menuju masyarakat islami. Semua potensi ini harus dijaga agar tidak dibajak demi kepentingan Kapitalisme.

Karena itulah, spirit dasar Islam, yakni dakwah dan amar makruf nahi mungkar, harus terus digalakkan demi menghadang penderasan narasi batil itu. Kritis dan tegas akan pelanggaran hukum syariah harus menjadi tabiat seorang Muslim. Seluruh komponen umat berkewajiban untuk mencerdaskan mereka, melepaskan mereka dari sihir ide-ide kufur dan menyadarkan umat bahwa setiap ide yang bukan berasal dari Islam pasti akan menghancurkan mereka.

*Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []*

### Catatan kaki:

1. <https://web.archive.org/web/20060929013821/http://www.un.org/News/Press/docs/2000/20001031.sc6942.doc.html>
2. <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/ASEAN-UN-POA-2021-2025-final.pdf>
3. <https://wps-indonesia.com/deskripsi-ran-p3aks/>

# CENDERUNG KEPADA ORANG ZALIM

## Soal:

Saya ingin bertanya: Mengapa tidak boleh cenderung kepada orang zalim (atau seseorang yang punya kekuasaan, pengaruh dan potensi-potensi yang bermanfaat, baik dia munafik atau fasik atau bahkan kafir), meminta harta atau pertolongan dari dia sehingga seorang Muslim dapat berjihad melawan agresor atau supaya untuk menolong agamanya?

## Jawab:

Seolah dengan ucapan “cenderung kepada orang zalim” itu Anda menunjuk pada firman Allah SWT:

﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾

*Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kalian disentuh api neraka. Sekali-kali kalian tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan (QS Hud [11]: 113).*

Jelas dari ayat yang Anda isyaratkan, haram cenderung kepada orang zalim. Lalu bagaimana Anda bertanya tentang kebolehan hal itu?!

Dinyatakan di *Tafsir al-Qurthubî* untuk ayat ini sebagai berikut:

Di dalamnya ada empat masalah: *Pertama*, firman Allah “*wa lâ tarkanû* (Janganlah kalian cenderung).” *Ar-Rukûn* adalah hakikat

penyandaran, ketergantungan, diam dan ridha pada sesuatu. Qatadah berkata, “Maknanya: Janganlah kalian senang kepada mereka dan jangan kalian menaati mereka.”

Ibnu Juraij berkata, “Maknanya: Janganlah kalian cenderung kepada mereka.”

Abu al-‘Aliyah berkata, “Maknanya: Janganlah kalian meridhai perbuatan mereka.”

Semuanya berdekatan maknanya.

*Kedua*, firman Allah SWT “*ilâ al-ladzîna zhalamû* (kepada orang-orang zalim).” Dikatakan: yakni para pengikut kesyirikan. Dikatakan: yakni bersifat umum mencakup mereka dan orang-orang yang banyak bermaksiat, seperti firman Allah SWT:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَعُدَّ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

*Jika kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Jika setan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), janganlah kamu duduk bersama orang-orang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu) (QS al-An'am [6]: 68).*

Telah dijelaskan sebelumnya. Ini adalah yang shahih dalam makna ayat tersebut. Ayat tersebut menunjukkan agar meninggalkan para penganut kekufuran dan

kemaksiatan baik pelaku bid'ah dan selain mereka. Sebabnya, persahabatan dengan mereka adalah kekufuran atau kemaksiatan. Alasannya, persahabatan itu tidak terjadi kecuali karena kasih sayang.

*Ketiga*, firman Allah SWT “*fatamassakum an-nâru* (menyebabkan kalian disentuh api neraka)”. Maknanya, yakni membakar kalian karena bergaul dan bersahabat dengan mereka dan cenderung kepada mereka atas keberpalingan mereka dan menyetujui mereka dalam perkara mereka.

Jelas dari tafsir ayat ini bahwa cenderung kepada orang zalim hukumnya adalah haram tanpa keraguan, baik orang zalim itu kafir atau Muslim yang bermaksiat. Cenderung kepada orang zalim dengan kasih-sayang kepada dia, menaati dia, cenderung kepada dia, bersandar kepada dia, memuji dia dan diam atas

Jelas dari tafsir ayat ini bahwa cenderung kepada orang zalim hukumnya adalah haram tanpa keraguan, baik orang zalim itu kafir atau Muslim yang bermaksiat. Cenderung kepada orang zalim dengan kasih-sayang kepada dia, menaati dia, cenderung kepada dia, bersandar kepada dia, memuji dia dan diam atas kezalimannya ... dsb, semua itu terderivasi di bawah sikap cenderung dan itu haram dengan ayat yang mulia itu.

kezalimannya ... dsb, semua itu terderivasi di bawah sikap cenderung dan itu haram dengan ayat yang mulia itu.

Kemudian orang zalim itu, sesuai pertanyaan Anda, kadang dia seorang penguasa kafir dan kadang seorang penguasa (Muslim) yang bermaksiat atau orang munafik yang memerintah dengan selain Islam sebagaimana kondisi para penguasa kaum Muslim hari ini.

*Pertama*: Jika penguasa itu kafir, maka meminta tolong kepada dia secara *syar'î* tidak boleh meskipun itu dengan mengambil harta dari dirinya untuk melakukan jihad. Sebabnya, mengambil harta dari dia tanpa diragukan lagi mengantarkan pada sikap menjadikan dia memiliki kekuasaan atas pihak yang mengambil harta dari dirinya. Perkara ini dapat disaksikan dan diindera, khususnya ketika masalahnya berkaitan dengan faksi-faksi dan milisi-milisi yang berperang. Sebabnya, mereka menjadi tergadai pada negara-negara yang mendanai dan keputusannya terampas. Hal itu karena siapa yang memiliki pengetahuan paling sedikit dengan kenyataan perkara itu, niscaya dia memahami bahwa negara-negara itu bukanlah memberi sedekah. Setiap harta yang diberikan oleh negara di dunia kepada pihak yang bukan rakyatnya tidak lain bertujuan untuk merealisasi tujuan-tujuan tertentu miliknya. Bagi mereka tidak penting kemaslahatan pihak yang diberi bantuan. Pengambilan harta dari negara-negara asing kafir oleh individu, kelompok dan milisi untuk jihad dan memerangi agresor tentu saja merupakan keterikatan kepada pihak asing dan bunuh diri politik. Ini akan membuat orang kafir memiliki kekuasaan terhadap kaum Muslim. Padahal Allah SWT berfirman:

﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

*Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada kaum kafir untuk memusnahkan kaum Mukmin (QS an-Nisa' [4]: 141).*

*Kedua:* Jika penguasa itu adalah orang Muslim yang bermaksiat, semisal fakta para penguasa saat ini di negeri kaum Muslim, maka mereka juga sama saja. Mereka tidak akan memberikan harta kepada suatu pihak luar kecuali untuk merealisasikan tujuan-tujuan tertentu. Pada galibnya tujuan ini bagian dari rencana yang dirumuskan oleh negara-negara kafir. Sebabnya, para penguasa kaum Muslim adalah agen negara-negara penjajah kafir. Oleh karena itu, pihak yang terikat dengan seorang penguasa di negeri kaum Muslim serta menerima bantuan dan dukungan dari dirinya maka dia menjadi alat di tangan penguasa itu yang dia arahkan sesukanya. Tidak jauh dari kita apa yang dapat kita saksikan di negeri Syam berupa keterikatan banyak faksi dan organisasi kepada dana politik kotor yang diberikan kepada mereka oleh negara-negara Kawasan. Belum lagi pujian-pujian yang diarahkan oleh pihak-pihak yang mengambil bantuan itu kepada penguasa zalim, loyalitas kepada mereka, memoles citra mereka dan tidak menyatakan pengingkaran terhadap mereka...dll. Semua itu tak diragukan lagi adalah haram. Sebabnya, hal itu mengantarkan pada pengabaian hak dan tujuan kaum Muslim dan menjadikan pihak pengambil harta sebagai pembantu untuk orang zalim dan pengkhianat ummat dan agamanya.

*Ketiga:* Selain itu, jihad di jalan Allah dan menolong agama itu tidak dengan meminta bantuan dari penguasa kafir atau penguasa zalim. Sebabnya, para penguasa kafir itu adalah musuh kaum Muslim. Mereka adalah orang-orang yang wajib bagi umat untuk berjihad melawan mereka dan memerangi mereka. Tidak terbayangkan bahwa jihad melawan mereka itu dengan mengambil bantuan dan harta dari mereka. Ini adalah kontradiksi yang jelas. Sebaliknya, jihad dan menolong agama adalah dengan bersandar kepada umat serta menjadikan umat sebagai sumber kekuatan dan

Kemudian, para penguasa zalim di negeri kaum Muslim, mereka itu adalah alat di tangan kaum kafir. Jadi bagaimana terbayangkan seorang Muslim mengambil dari mereka bantuan dan harta untuk memerangi kaum kafir dan menolong agama, selama mereka adalah alat di tangan kaum kafir musuh-musuh umat, menimpakan kepada umat siksaan yang pedih dan memerangi para mujahid yang benar dan para pengemban dakwah yang mukhlis?!

pemberian.

Kemudian, para penguasa zalim di negeri kaum Muslim, mereka itu adalah alat di tangan kaum kafir. Jadi bagaimana terbayangkan seorang Muslim mengambil dari mereka bantuan dan harta untuk memerangi kaum kafir dan menolong agama, selama mereka adalah alat di tangan kaum kafir musuh-musuh umat, menimpakan kepada umat siksaan yang pedih dan memerangi para mujahid yang benar dan para pengemban dakwah yang mukhlis?!

*[Dikutip dari Jawab-Soal Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah pada 23 Dzul Hijjah 1444 H/11 Juli 2023 M]*

#### Sumber:

<https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/89834.html>

<https://www.facebook.com/HT.AtaabuAlrashtah/posts/828230945530943>

# MENANAMKAN IDEOLOGI ISLAM DALAM KELUARGA

Najmah Saidah

**K**eluarga adalah penyatuan dua insan yang memiliki tujuan, visi dan misi bersama untuk menjalani hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Islam sebagai *diin* sempurna memiliki konsep mengenai keluarga dengan sangat khas dan istimewa. Keluarga bahkan memiliki peran utama yang tidak bisa dianggap remeh. Dari sanalah dasar pembentukan karakter anak akan terbentuk. Keluarga adalah tempat pertama dan utama seseorang dididik dan dibesarkan.

Agar pernikahan yang dijalani membawa pada tujuan, visi, dan misi yang diharapkan Islam, maka ideologi Islam harus dijadikan sebagai dasar dan fondasi bagi institusi kecil ini. Ideologi Islam haruslah menjadi pijakan dasar bagi pasangan suami istri, yang kemudian akan ditanamkan kepada anak-anaknya kelak.

Apalagi dalam situasi hari ini. Saat ini ideologi Kapitalisme demikian mencengkeram negeri ini dan ancaman ideologi Sosialisme-komunis masih terus mengintai keluarga Muslim dari berbagai sisi. Karena itu setiap Muslim harus terus waspada terhadap bahaya kedua ideologi ini.

Di sinilah pentingnya ayah-bunda untuk terus mengkaji Islam dan menanamkan ideologi Islam sejak dini kepada anak-anaknya agar tidak terjebak pada ideologi Kapitalisme ataupun Sosialisme-komunis yang dikemas sangat apik

oleh musuh-musuh Islam.

## Pentingnya Penanaman Ideologi Islam dalam Keluarga

Keluarga memiliki peran strategis dalam proses pendidikan anak, bahkan umat manusia. Keluarga lebih kuat pengaruhnya dari sendi-sendai yang lain. Pasalnya, sejak awal masa kehidupannya seorang manusia lebih banyak mendapatkan pengaruh dari keluarga. Ini karena waktu yang dihabiskan di keluarga lebih banyak daripada di tempat-tempat lain.

Pada hakikatnya pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan sepanjang hayat. Pembinaan dan pengembangan kepribadian serta penguasaan *tsaqafah* Islam dilakukan melalui pengalaman hidup sehari-hari dan dipengaruhi oleh sumber belajar dalam keluarga, terutama ayah-bundanya.

Keluarga adalah madrasah atau tempat pembelajaran anggota-anggotanya, terutama pendidikan yang dilakukan orangtua kepada putra-putrinya. Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

*Wahai orang-orang yang beriman!  
Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari  
api neraka yang bahan bakarnya adalah  
manusia dan batu (QS at-Tahrim [66]: 6).*

Karena itu para orangtua harus memberikan pembelajaran dan pendidikan Islam agar anggota keluarga menjadi orang-orang yang berilmu dan bertakwa. Anak-anak tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga harus menjadi pribadi yang shalih, penyejuk pandangan dan hati kedua orangtua dan masyarakatnya.

Pendidikan Islam sejak dini dalam keluarga akan tertanam secara kuat di dalam diri seorang anak. Sebabnya, pengalaman hidup pada masa-masa awal umur manusia akan membentuk ciri-ciri khas, baik dalam tubuh maupun pemikiran, yang bisa jadi tidak ada yang dapat mengubahnya sesudah masa itu.

Karena itu penanaman ideologi Islam harus kita mulai sejak dini kepada anak-anak kita. Dengan itu ideologi Islam akan dijadikan sebagai bekal dan pijakan oleh mereka dalam mengarungi kehidupannya. Tentu kita pun harus terus belajar Islam hingga akhir hayat dan menyampaikannya kepada anak-anak kita saat kebersamaan mereka. Dengan begitu mereka selalu menjadikan ideologi Islam sebagai landasan dalam berperilaku dan mengarahkan kecenderungan mereka. Dengan itu pula terbentuk *syakhshiyah islaamiyah* (kepribadian islami) yang mumpuni.

## Beberapa Cara

Ada beberapa hal yang bisa kita upayakan. Di antaranya:

### 1. Menanamkan akidah Islam sejak dini.

Islam mengajarkan kepada kita agar menjadikan akidah Islam sebagai benteng yang melindungi keluarga kita dari pemikiran-pemikiran dan ideologi kufur yang bertentangan dengan Islam, seperti Kapitalisme dan Sosialisme-komunisme. Dengan itu akan terwujud iman yang kokoh dalam diri anggota keluarga Muslim. Ini akan

melindungi mereka dari berbagai pemikiran, budaya dan gaya hidup kufur yang rusak dan merusak yang disodorkan ideologi kufur tersebut.

Menanamkan akidah Islam sejak dini kepada anak-anak adalah tugas utama orangtua. Tentu agar terwujud keimanan yang kokoh pada diri mereka. Orangtualah yang akan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya sendi-sendi agama pada diri anak-anak. Rasulullah saw. bersabda: *"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu dan bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi."* (HR Bukhari).

Dengan iman yang kuat, setiap anggota keluarga akan memahami bahwa tujuan hidupnya semata untuk beribadah kepada Allah SWT. Tidak mudah terbujuk oleh segala sesuatu yang Allah larang.

Selain itu dengan penanaman akidah pada anak, anak akan mengenal betul siapa Allah, Penciptanya Yang Maha Pengatur, juga mengenal Muhamad saw. sebagai utusan Allah, serta mencintai al-Quran dan meyakini seluruh isinya.

### 2. Menjelaskan hanya ideologi Islam yang benar.

Kita harus menjelaskan kepada anak-anak kita bahwa ideologi Islam adalah istimewa. Sebabnya, hanya Islam yang ideologi benar. Islam satu-satunya ideologi yang bersumberkan wahyu Ilahi, datang dari *Al-Khalik al-Mudabbir*, Penggenggam jagatraya beserta isinya.

Ideologi Islam merupakan jalan terang yang telah Allah berikan, yang mendapat jaminan langsung dari sang Pencipta. Ini berbeda dengan ideologi lain, yaitu Kapitalisme dan Sosialisme-komunisme yang merupakan buatan manusia yang hanya berlandaskan hawa nafsu semata dan pastinya lemah dan terbatas. Allah SWT telah menjelaskan bahwa

hanya hukum-Nya yang baik (Lihat: QS al-Maidah [5]: 50).

### **3. Mengungkapkan fakta sejarah bahwa ideologi Islam mensejahterakan umat manusia.**

Kita juga harus mengungkap keunggulan ideologi Islam secara faktual kepada anak-anak kita sehingga mereka semakin yakin. Sesungguhnya ideologi Islam telah menorehkan tinta emas sejarah peradaban umat manusia ketika diterapkan selama berabad-abad lamanya. Banyak bukti historis menunjukkan kemajuan peradaban Islam mulai dari bidang politik, ekonomi hingga sains dan teknologi.

Islam telah mampu mensejahterakan, memberikan rasa nyaman dan kebahagiaan bagi umat manusia. Bahkan peradaban Islamlah yang memberikan sumbangsih besar atas kemajuan Barat saat ini. Robert Briffault, dalam

Kita pun harus menjelaskan bahwa ideologi selain Islam adalah ideologi yang bertentangan dengan Islam sehingga harus ditolak. Kita juga harus menjelaskan bahwa Kapitalisme dan Sosialisme-komunisme adalah ideologi yang rusak dan cacat dari akarnya. Tidak sesuai dengan akal dan fitrah manusia.

*The Making of Humanity*, menyatakan, “Seluruh segi kemajuan peradaban di Eropa secara pasti dapat ditelusuri akarnya dari peradaban Islam. Peradaban Islamlah yang telah menghidupkan energi yang menggerakkan peradaban modern.”

### **4. Menjelaskan ideologi Kapitalisme dan Sosialisme bertentangan dengan Ideologi Islam dan harus ditolak.**

Kita pun harus menjelaskan bahwa ideologi selain Islam adalah ideologi yang bertentangan dengan Islam sehingga harus ditolak. Kita juga harus menjelaskan bahwa Kapitalisme dan Sosialisme-komunisme adalah ideologi yang rusak dan cacat dari akarnya. Tidak sesuai dengan akal dan fitrah manusia.

Ideologi Kapitalisme lahir dari akidah sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan serta menjadikan manfaat sebagai asasnya. Kebebasan menjadi hal yang diagung-agungkan oleh ideologi ini dan materi menjadi tujuannya. Ini semua yang menjadi biang keladi kerusakan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam saat ini. Fakta-fakta yang menimpa umat Islam saat ini pun menjadi bukti tak terbantahkan yang harus kita jelaskan kepada anak-anak kita.

Demikian pula cacatnya ideologi Sosialisme-komunisme. Ideologi ini meniadakan peran Sang Pencipta dalam kehidupan manusia serta tidak mengakui kehidupan sebelum dan sesudah dunia. Ini menjadi bukti bahwa ideologi ini tidak sesuai dengan akal dan fitrah manusia dan harus ditolak.

### **5. Membiasakan anak terikat dengan syariah Islam.**

Anak harus dikenalkan dengan syariah Islam sejak dini, sebagaimana Hadis Nabi saw., “Perintahlah anak-anakmu agar mendirikan shalat tatkala mereka telah berumur tujuh tahun, dan pukullah karenanya tatkala mereka telah berumur sepuluh tahun.”

Mulailah dengan membiasakan menjalankan shalat dan ibadah lainnya, menjelaskan tentang *ahkaamul-khamsah*, diiringi dengan mengenalkan hukum-hukum syariah lainnya seperti cara berpakaian sesuai syariah, larangan mencuri, mengambil hak orang lain dan sebagainya.

Demikian halnya berkaitan dengan akhlak seperti berbakti kepada ibu bapak, sayang kepada orang lain, jujur, berani karena benar, bersabar, tekun bekerja dan sebagainya. Dibarengi pula dengan mengajarkan adab dalam Islam seperti makan dengan tangan kanan, berdoa sebelum dan sesudah makan, menjaga kebersihan, mengucapkan salam, tidak menyakiti hewan dan sebagainya.

#### 6. Membiasakan anak menghadiri majelis ilmu hingga mereka paham Islam kaaffah.

Pemikiran dan pemahaman yang lahir dari ideologi Kapitalisme terus disebarkan dengan bahasa yang indah. Padahal itu semua adalah racun berbalut madu. Di sinilah pentingnya keluarga Muslim membina diri dengan pemahaman dan *tsaqaafah* Islam. Dengan itu mereka tidak akan mudah terjebak kepada pemikiran dan perilaku yang menyimpang.

Langkah yang paling mudah untuk mewujudkan ini semua adalah dengan istiqamah menghadiri majelis-majelis ilmu yang membahas tentang Islam *kaaffah*, lalu dipahami dan didakwahkan ke tengah-tengah umat. Ini semua akan menjadi benteng yang kokoh agar tetap teguh di jalan Islam.

#### Butuh Sistem Politik yang Kondusif

Akhirnya, hal penting lainnya yang tidak bisa kita abaikan dalam penanaman ideologi Islam kepada keluarga kita adalah adanya peran sistem yang mendukung. Bagaimanapun kuatnya kita memproteksi keluarga dengan ide-ide Islam dan pembinaan yang intensif kepada

anak-anak kita, jika sistem yang berlaku di tengah kehidupan keluarga itu tidak menggunakan aturan-aturan Islam, maka sulit bagi bangunan keluarga yang kukuh itu bisa bertahan.

Gempuran dari luar akan senantiasa menghadang, baik pemikiran-pemikiran yang bertentangan yang bisa mempengaruhi perilaku dan moral anggota keluarga maupun rintangan berupa kesulitan ekonomi yang berdampak pada sulitnya pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik anggota keluarga. Dari sinilah biasanya muncul tindak kriminalitas dan penyimpangan sosial lainnya.

Untuk itu, penataan kehidupan yang benar berkaitan dengan semua urusan masyarakat sangat diperlukan. Dengan sistem politik Islamlah semua ini bisa terwujud. Sistem politik Islam memiliki kemampuan untuk memberikan solusi atas semua persoalan, baik persoalan individu, keluarga, maupun masyarakat. Sistem Islam mampu membendung serangan musuh-musuh Islam dan menjaga masyarakat agar tetap dalam keimanan dan tatanan yang sesuai dengan aturan Islam. Hal ini dilakukan dengan penerapan aturan Islam secara *kaaffah*, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang baik, damai, dan sejahtera; yang dipenuhi dengan ampunan dan keridaan Allah SWT.

Di bawah naungan syariah Islam, akan ringan beban orangtua dengan menyediakan pendidikan islami yang berkualitas dengan cuma-cuma, membendung semua ideologi rusak masuk ke tengah-tengah umat.

Oleh karena itu, mari seluruh keluarga Muslim yang diberkahi Allah SWT menguatkan tekad dan bergandengan tangan bersama mengembalikan tegaknya aturan Islam sehingga tercapai kebahagiaan hakiki dalam naungan Khilafah Islamiyah.

*Wallahu a'lam bi ash-shawaab. []*

# Pelayanan Khilafah Utsmaniyah Terhadap Masjid al-Haram

Ada banyak artefak sejarah dari periode Ottoman (Khilafah Utsmaniyah) di Aula Pameran Ka'bah, di mana artefak bersejarah milik Masjid al-Haram dipamerkan yang dibuat oleh Ottoman.

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/dunya/endulusdeki-islam-eserleri/2>



Di ruang pameran di Makkah terdiri dari tujuh bagian. Ada artefak sejarah yang berharga seperti gembok dan kunci Ka'bah milik periode Khalifah Abdulhamid II dan peti di dalam Ka'bah.



Selain Saluran Air Hacer-ül Esved milik periode Sultan Murad, artefak dari berbagai periode Ottoman seperti Minbar Alemi, Alur Ka'bah yang dilapisi emas, dan Menara Bulan Sabit menarik perhatian.



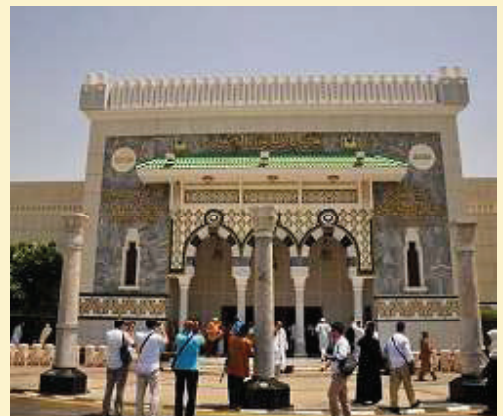
Lengkungan Gerbang Safa dari tahun 1576 juga dipajang di ruang pameran. Gerbang Minbar menonjol di antara artefak sejarah yang merupakan pusaka nenek moyang kita.



Di aula, tempat karya-karya dari periode para Sahabat juga dipamerkan, ada potongan kolom dari periode Abdullah Bin Zubayr.



Di ruang pameran, terdapat karya-karya penting seperti mulut sumur zamzam, Gapura Ka'bah yang terbuat dari campuran emas dan perak, pijakan berusia 200 tahun dengan roda terpasang sehingga mudah dibawa-bawa, kandang heksagonal dari Maqam. Ibrahim, pintu Masjid an-Nabawi.



Museum Ka'bah di Makkah Al Mukarromah



## LINTAS DUNIA

### Saudi Hamburkan Miliaran Dolar untuk Layani Musuh Islam

Aktivis Hizbut Tahrir Bassam al-Maqdisi menyatakan Kerajaan Arab Saudi (KAS) menghamburkan miliaran dolar untuk melayani musuh Islam.

“Arab Saudi menghambur-hamburkan miliaran dolar untuk berbagai kesepakatan, perjanjian dan festival. Semuanya dilakukan hanya untuk hal-hal yang rusak dan merusak, serta tidak berguna, baik bagi kaum Muslim pada umumnya maupun bagi masyarakat Najd dan Hijaz pada khususnya. Semua itu hanya untuk melayani musuh-musuh Islam dan untuk memerangi agama Allah SWT,” ujarnya seperti diberitakan *hizb-ut-tahrir.info*, Kamis (27/7/2023).

Hal itu dia nyatakan saat merespon rencana KAS menggelar konser musik terbesar Azimuth

di antara Pegunungan Al-Ula pada 21-22 September 2023; juga berbagai kesepakatan, perjanjian, serta festival yang terus digencarkan setelah Putra Mahkota Muhammad bin Salman menjadi penguasa *de facto* Saudi dengan Visi 2030-nya.

Menurut Bassam, pertanyaan yang tidak boleh diabaikan oleh orang waras dan berakal adalah berapa banyak uang yang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna seperti itu?!

“Berapa banyak perusahaan musikal Barat dan non-musikal, serta mereka yang disebut penyanyi terkenal, yang akan dibayar. Seolah-olah mereka akan dituangkan di bawah kakinya untuk menyenangkan kaum kafir, apakah mereka perusahaan Amerika atau Eropa?!” tegasnya.

Dengan demikian, ujar Bassam, Saudi akan berada di bawah naungan Komisi Pariwisata KAS, seperti seorang hamba yang sangat patuh terhadap negara-negara kafir, yang tidak menyimpang dari perintah tuannya satu inci pun.

“Yang paling buruk dari semua ini adalah festival yang merusak ini, serta berbagai kegiatan dekadensi moral yang disajikan sebagai bagian dari Visi 2030 Muhammad bin Salman,” tegasnya.

Para penguasa seperti mereka itu, jelas Bassam, tidak layak kecuali untuk dicabut dan digulingkan dari kekuasaannya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya penguasa.

Kemudian, ia pun mengutip sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Muslim, yang artinya, “Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian; kalian mendoakan kebaikan atas mereka dan mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Sebaliknya, seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Kalian melaknati mereka dan mereka melaknati kalian.”

### Pajak Besar Dianggap Solusi Kenya, Padahal Sebaliknya

Terkait kenaikan pajak secara drastis



meningkatkan semua spektrum ekonomi setelah RUU Keuangan disahkan dan menjadi undang-undang di Kenya. Anggota Kantor Media Hizbut Tahrir di Kenya Ali Omar menyatakan,

“Pemerintahan Kenya Kwanza percaya, mengumpulkan pajak yang besar adalah solusinya, namun hasilnya di lapangan berbeda dari kesuraman retorika politik.” Demikian sebagaimana dilansir *Mediaumat.id*, Rabu (12/7/2023).

Karena, jelasnya, pengangguran akan meningkat. Kemiskinan akan meningkat juga. Gagal bayar atas pinjaman juga akan meningkat karena beban keuangan akan menyulitkan individu untuk membayar dan menghormati utang.

Hal ini pada gilirannya, prediksi Ali, akan mendistorsi pasar modal karena sebagian besar orang akan menimbun uang tunai dalam deposito tetap daripada berinvestasi di pasar.

“Transaksi komersial sebagai unit ekonomi akan mencapai titik terendah. Akibatnya, banyak yang akan membingkai ulang pengeluaran untuk mencapai dasar-dasar dan pembayaran tagihan utilitas yang besar,” sebutnya.

### Tidak Punya Pilihan.

Menurut Ali, perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara Kapitalisme membuat pemerintah Kenya Kwanza tidak punya pilihan, terutama setelah utang nasional yang sangat besar mencapai hampir 70 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB).

Lebih buruk lagi, lanjutnya, semua properti publik seperti listrik, minyak, dll dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari kesengsaraan rakyat.

“Pajak yang tinggi dan privatisasi properti publik memang telah membuat tagihan utilitas publik menjadi beban keuangan tanpa belas kasihan sama sekali,” tegasnya.

### Menghambat Produksi.

Ali juga menyebut, perpajakan pada dasarnya menghambat produksi, suatu solusi yang diyakini kapitalisme karena kelangkaan sumberdaya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan di benak Ali, “Mengapa pajak merupakan solusi untuk ekonomi yang merupakan dasar mata pencaharian? Kekurangan dalam sistem membuatnya terkapitasi dalam mengelola urusan rakyat. Mengapa pendapatan pajak telah diupayakan berkontribusi terhadap PDB?”

“Jawabannya sederhana: semua yang bersifat publik telah dibuat privat, sehingga meninggalkan warga negara untuk belas kasihan perusahaan yang tujuan utamanya adalah keuntungan,” tegasnya.

### Islam.

Berbeda dengan Kapitalisme yang menyengsarakan manusia, Islam yang merupakan rahmat dari Pencipta manusia, kehidupan dan alam semesta, jelas Ali, berdiri sebagai bukti sejarah tentang bagaimana umat manusia diangkat dari belenggu perbudakan ribawi dan entitas politik pada zaman mereka menuju masyarakat fungsional yang tinggi yang memberantas kemiskinan dan membuat mata pencaharian mudah dicapai tanpa batasan dari negara khilafah yang berjalan di atas metode kenabian, tetapi menjadi fasilitator utama untuk kehidupan yang terhormat.

Ali pun membacakan firman Allah SWT dalam QS al-Hasyr ayat ke-7, yang artinya: *Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya. [Joy dan Tim]*



## Ustadz H.M. Ismail Yusanto: **TETAP WASPADAI KOMUNISME**

### Pengantar Redaksi:

Pemerintah belum lama ini mengeluarkan Keppres dan Inpres terkait HAM. Sejumlah pihak mencurigai Keppres dan Inpres tersebut ada kaitannya dengan PKI/Komunisme di Indonesia. Benarkah demikian? Apa sebenarnya inti dari keputusan tersebut? Apa motif dan latar belakangnya? Apa pula target dan tujuannya?

Untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas, kali ini *Redaksi* mewawancarai Cendekiawan Muslim **Ustadz H.M. Ismail Yusanto**. Berikut hasil wawancaranya.

**Ustadz, Pemerintah mengeluarkan Keppres dan Inpres terkait HAM yang disebut banyak pihak ada kaitannya dengan PKI/Komunisme di Indonesia. Benarkah demikian? Apa sebenarnya inti dari keputusan tersebut?**

Betul. Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia

yang Berat Masa Lalu, juga Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat, yang selanjutnya disebut Tim Pemantau PPHAM.

Penerbitan Keppres 17 Tahun 2022 dan

Inpres No 2 Tahun 2023 dimaksudkan untuk menginventarisir peristiwa pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Indonesia dan merumuskan upaya penyelesaiannya secara non-yudisial, termasuk di dalamnya upaya pemulihan hak korban dan kompensasinya.

Sampai di sini, sekilas mungkin orang akan menilai semua itu sebagai upaya yang baik dan patut untuk mendapatkan dukungan. Hanya soalnya adalah, apakah rumusan dan pelaksanaannya benar-benar dilakukan secara obyektif, faktual dan proporsional. Faktanya, tidak semua peristiwa pada masa lalu yang dinilai banyak pihak sebagai pelanggaran HAM Berat seperti peristiwa Tanjung Priok 1984, tewasnya 700 lebih petugas KPPS tahun 2019, dan peristiwa KM-50 tahun 2020, serta Tragedi Poso dan Ambon serta masih banyak lagi lainnya, tidak masuk di dalam daftar. Di urutan nomer 1 justru tercantum pelanggaran HAM Berat antara tahun 1965 – 1966. Jelas menilik tahunnya, ini tak mungkin tidak terkait dengan G30S/PKI.

Benarkah peristiwa tahun itu sebagai pelanggaran berat HAM? Bukankah peristiwa 1965-1966 itu intinya tak lain adalah pemberontakan PKI melalui Gerakan 30 September 1965 atau dikenal dengan G-30-S-PKI? Jika demikian keadaannya, lalu di mana yang dimaksud pelanggaran HAM berat itu? Siapa korbannya. Siapa pula pelakunya?

### **Lalu apa konsekuensi dari keputusan tersebut?**

Peristiwa 1965-1966 dimasukkan sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat dalam Inpres No 2 Tahun 2023 itu memiliki makna bahwa Pemerintah pada waktu itu (dalam hal ini TNI/ABRI) telah melakukan pelanggaran HAM berat dan korbannya adalah anggota PKI. Siapa lagi yang dimaksud dengan peristiwa 1965 – 1966 jika bukan peristiwa terkait PKI?

Jelas sekali, ini persoalan besar. Hal ini

bertentangan dengan fakta sejarah. Justru PKI-lah yang pada waktu itu secara biadab telah melakukan pembunuhan terhadap 6 Jenderal dan beberapa perwira TNI/ABRI lainnya, sebagai bagian dari pemberontakan (kup) yang mereka lakukan. TNI/ABRI memang kemudian melakukan penumpasan terhadap anggota PKI yang telah memberontak dengan cara begitu rupa. Ini merupakan kewajiban TNI/ABRI sebagai aparat pertahanan dan keamanan demi menyelamatkan negara. Fakta-fakta yang terungkap dalam pengadilan militer atas pejabat dan tokoh yang terkait dengan PKI juga membuktikan hal itu.

Selanjutnya, hal ini membawa konsekuensi, yang melakukan pelanggaran HAM harus dinyatakan bersalah dan korbannya harus mendapatkan rehabilitasi. Di situlah mengapa penyesalan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 11 Januari 2023 atas pelanggaran HAM berat pada masa lalu, termasuk peristiwa tahun 1965 – 1966, dinilai banyak pihak sebagai permintaan maaf pada PKI. Jika para korban akan diberi pemulihan atau rehabilitasi sosial dan ekonomi, maka hal ini dinilai juga merupakan pemberian kompensasi kepada anggota PKI. Meski hal ini tidak disebut secara verbal, makna substansinya ke arah sana.

Jadi sangat wajar jika tindakan Pemerintah ini kemudian mendapat kritikan sangat keras dari banyak pihak sebagai sebuah keputusan irrasional dan ahistoris, dan melanggar undang-undang. Pasalnya, sesuai Tap MPRS/XXV/1966, PKI merupakan partai terlarang. Jika tindakan ini dilanjutkan, akan terjadi pemutarbalikan fakta sejarah yang bukan saja bakal melukai TNI/ABRI, melainkan juga para ulama dan umat Islam serta masyarakat luas mengingat kekejaman dan kebiadaban PKI pada masa lalu.

### **Apa kira-kira latar belakang/motif keputusan tersebut?**

Sekilas ini hanya soal hukum dan atau soal

kemanusiaan belaka. Namun, jika dikaji dengan benar, patut diduga hal ini tidak sekadar dilatar belakangi oleh persoalan tersebut, tapi lebih oleh persoalan politik, bahkan ideologi.

Secara hukum yang disebut peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM, khususnya peristiwa tahun 1965 – 1966, telah dinyatakan oleh Kejaksaan Agung sebagai tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Mengapa terus saja dipersoalkan jika tidak ada motif lain di belakang itu semua?

**Setiap keputusan biasanya ada rentetan peristiwa yang mendahuluinya. Bagaimana kronologi terkait terbitnya Keppres dan Inpres 12 Pelanggaran HAM, termasuk peristiwa tahun 65-66?**

Secara kronologis, putusan ini boleh disebut diawali oleh langkah Komnas HAM ketika pada 20 Juli 2002 menyerahkan berkas perkara *pro justitia* peristiwa pelanggaran HAM tahun 1965 – 1966 kepada Kejaksaan Agung. Lalu oleh pihak Kejaksaan pada 25 Oktober

tahun yang sama, berkas itu dikembalikan dengan alasan belum cukup bukti memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sepanjang tahun 2002 hingga tahun 2015 ada 7 berkas perkara pelanggaran HAM berat dari Komnas HAM juga dikembalikan oleh Kejaksaan dengan alasan serupa.

Mentok dengan pendekatan *pro justitia*, pada 18 Desember 2018 Komnas HAM meminta Presiden Jokowi untuk membuka penyelesaian non-yudisial atas apa yang disebut oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu. Permintaan ini pada 26 Agustus 2022 dipenuhi Presiden melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu, disingkat Tim PPHAM. Dalam Keppres itu, Tim ini disebut bertugas melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komnas HAM sampai dengan tahun 2020, lalu merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya; dan merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Pemulihan yang dimaksud mencakup rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa, dan/atau rekomendasi lain untuk kepentingan korban atau keluarganya.

Lalu pada 15 Maret 2023 Presiden menerbitkan Inpres Nomer 22 Tahun 2023, yang isinya perintah Presiden kepada 16 kementerian dan 3 lembaga untuk melaksanakan rekomendasi Tim PPHAM itu, yang intinya memulihkan hak korban dan mencegah agar pelanggaran serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Kontroversi penerbitan Keppres dan Inpres ini dibumbui oleh sejumlah drama. Di

Secara hukum yang disebut peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM, khususnya peristiwa tahun 1965 – 1966, telah dinyatakan oleh Kejaksaan Agung sebagai tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Mengapa terus saja dipersoalkan jika tidak ada motif lain di belakang itu semua?

antarnya, pada 27 September 2021 terjadi pembongkaran patung AH Nasution, Soeharto dan Sarwo Edhi di Markas Kostrad. Lalu pada 24 Februari 2022 terbit Keppres Nomer 2 Tahun 2022 yang menetapkan 1 Maret 1949 sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Sebelumnya, tanggal itu disebut sebagai Serangan Umum 1 Maret dengan tokoh sentral Soeharto. Dalam Keppres itu, nama Soeharto tidak disebut sama sekali. Semua ini memberi kesan kuat, bahwa rezim sekarang hendak menghilangkan andil AH Nasution, Soeharto dan Sarwo Edhi dalam sejarah Kostrad yang memang ketika itu berperan besar dalam penumpasan G30SPKI. Soeharto juga disisihkan dalam sejarah 1 Maret 1949.

**Atas keputusan tersebut direkomendasikan untuk mengambil langkah-langkah. Salah satunya pengakuan penyelesaian pelanggaran HAM. Bagaimana menurut Ustadz?**

Rekomendasi itu sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pada 11 Januari 2023 Presiden menerima laporan TPP HAM. Presiden telah menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM berat pada masa lalu itu. Sejauh penyesalan terhadap 11 pelanggaran HAM berat yang disebut oleh TPP HAM, di antaranya Kasus Penembakan Misterius (Petrus), Kasus Talangsari, Lampung, Peristiwa Rumoh Geudong, Aceh, Kerusuhan Mei 1998, Peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2, Pembunuhan Dukung Santet, dan lainnya tentu tak masalah. Namun, dengan penyesalan itu, berarti Presiden menyesalkan juga peristiwa yang terjadi pada tahun 1965 – 1966, yang dalam daftar pelanggaran HAM berat masa lalu versi TPP HAM ada di nomer 1.

**Termasuk juga rekomendasi penyusunan ulang sejarah. Apa**

**konsekuensinya?**

Ya. Rekomendasi ini jelas memantik kontroversi. Kita memang memerlukan penulisan sejarah yang benar dan yang obyektif. Faktanya memang banyak penulisan sejarah pada masa lalu yang mengandung nuansa pengaburan bahkan penguburan sejarah, seperti tidak ditulisnya Resolusi Jihad, juga pengaburan peran Sarikat Islam dalam kebangkitan nasional dan peran KH Ahmad Dahlan serta Muhammadiyah dalam merintis pendidikan modern di Indonesia. Nah, dalam konteks sejarah peristiwa 1965 – 1966, ada asumsi yang sudah ditetapkan lebih dulu, bahwa ada pelanggaran HAM berat di sana. Soalnya, jika benar ada pelanggaran HAM berat dalam peristiwa itu, lalu siapa yang layak disebut pelaku dan siapa pula korbannya?

**Selain itu, rekomendasinya juga memulihkan hak-hak korban. Bagaimana menurut Ustadz?**

Dalam Keppres Nomor 17 Tahun 2022 memang direkomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya mencakup rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan dan beasiswa. Sampai di sini, seolah tak ada masalah. Padahal, menyangkut peristiwa 1965 – 1966, ada dua persoalannya penting: *Pertama* seperti sudah disebut tadi, siapa yang dimaksud sebagai korban dan siapa yang dimaksud sebagai pelaku? Jika yang dimaksud korban adalah PKI dan pelakunya adalah TNI/ABRI tentu jadi masalah besar. *Kedua*, apa yang dimaksud dengan kata-kata ‘dan/atau rekomendasi lain untuk kepentingan korban atau keluarganya’. Kalimat ini membuka 1001 macam kemungkinan langkah, di antaranya pemulihan hak politik. Jika benar, ini tentu mengundang masalah besar, karena berarti memungkinkan PKI hidup lagi secara politik.

**Siapa atau kelompok mana yang**

## diuntungkan dengan keputusan ini?

Tak lain tentu saja kelompok sekuler-sosialis-komunis, termasuk di dalamnya kelompok yang amat membenci Islam. Mereka tahu, Islamlah yang selama ini menghalangi terwujudnya cita-cita mereka: Masyarakat Komunisme. Kelompok ini diduga keras ada di dalam kekuasaan rezim saat ini. Ini bisa dilihat dari cepatnya mereka mengambil langkah terkait soal ini. Beberapa bulan setelah Presiden Jokowi dilantik pada Oktober 2014, persisnya pada 17 Juni 2015, beberapa orang mengajukan uji materi UU 26 Tahun 2000, menyangkut frasa kurang lengkap. Frasa inilah yang selama ini dituding sebagai biang dari dikembalikan selalu oleh Kejakugung berkas pro justisia peristiwa pelanggaran berat HAM. Jika ditilik, semua langkah non-yudisial itu dilakukan pada tahun segar, yakni tahun 2022 dan 2023, seolah tak hendak kehilangan momentum kekuasaan yang mereka tahu tak lama bakal berakhir pada 2024

## Ustadz, bisa dijelaskan bagaimana bahaya PKI bagi negeri ini?

Secara ideologi, PKI pastilah komunis. Dari segi paham, ia pasti akan makin menjauhkan umat dari Islam. Ketika umat jauh dari Islam, maka pasti pula kehidupan pribadi dan keluarga umat Islam juga akan jauh dari Islam. Kehidupan masyarakat dan negara juga akan diatur dengan sistem Sosialisme-komunisme. Hasilnya, pastilah kekacauan dan penderitaan seperti yang saat ini dialami oleh negara komunis seperti Kuba dan Korea Utara.

Secara politik, sebagaimana terjadi di banyak negara, kekuatan politik komunis amatlah kejam. Sejarah negeri ini telah membuktikan hal itu. Ribuan orang dibantai oleh mereka.

Lebih jauh harus diwaspadai kemungkinan Indonesia menjadi negara komunis, sesuai dengan Road Map 50 Tahun China Raya tahun 1980 yang lalu. Cina boleh jadi akan melakukan *soft invation* melalui program BRI (Belt Road

and Initiative) ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Menurut rancangan itu, ditargetkan tahun 2030 Indonesia akan sudah menjadi negara protektorat Cina, bahkan menjadi Indocina yang berhaluan komunis.

## Apa yang harus dilakukan oleh Umat Islam terkait keluarnya Keppres dan Inpres terkait pelanggaran HAM ini?

Sejauh menyangkut peristiwa yang disebut dari nomer 2 hingga nomer 12 dalam daftar pelanggaran HAM berat masa lalu, kita tentu tak masalah. Bahkan mestinya masuk juga peristiwa Tanjung Priok, Poso, Ambon, KM 50, tragedi KPPS dan lainnya. Namun, menyangkut peristiwa 1965 – 1966 yang disebut di nomer 1 dalam daftar itu, umat Islam harus ekstra waspada. Jangan sampai langkah ini menjadi pintu berkembangnya kembali Komunisme di Indonesia, baik dalam wujud kembalinya PKI maupun dalam bentuk lain.

Namun demikian, jangan sampai juga gegara isu ini umat tersimpangkan perhatiannya terhadap bahaya sekularisme – kapitalisme – liberalisme yang hari ini nyata-nyata tengah mencengkeram negeri ini. Jangan sampai umat memandang seolah bahaya itu hanya ada dalam ideologi sosialisme – komunisme dengan segala wajah dan bentuknya, sedangkan kapitalisme – liberalisme tidak.

Bagaimana caranya agar umat bisa memiliki dobel kesadaran semacam itu? Jika, dan hanya jika umat memiliki kesadaran politik Islam. Ketika umat menjadikan Islam sebagai satu-satunya landasan dalam berpikir dan bertindak, dari situ umat akan tahu, bahwa apapun selain Islam tak layak diikuti dan harus diwaspadai karena pasti akan membawa kemudharatan. Al-Quran menyebutnya sebagai sesat (*dhillu*) dan celaka (*yasqaa*). Di situlah pentingnya melalui dakwah ditanamkan pemahaman Islam yang benar ke dalam diri umat. []

# SEJARAH MERAH KOMUNISME DI INDONESIA

(Ragam Kejahatan PKI Terhadap Islam & Kaum Muslim di Negeri Ini)

*Salman Iskandar*

**M**enyoal keberadaan Komunisme dan PKI di negeri ini, yang terbayang dalam ingatan mayoritas di antara kita adalah kengerian, kebiadaban dan pembantaian! Tidak salah memang. Fakta sejarah di negeri ini telah membuktikan bahwa Komunisme dan PKI identik dengan penculikan, pemberontakan dan revolusi berdarah! Bahkan identitas dan karakteristik Komunisme dimana pun sama saja.

Semuanya bermula dari celoteh 'Nabi' Komunis sendiri, Karl Heinrich Marx, dalam *Das Manifest der Kommunistischen Partei* (1848). Dia menulis, "Pertarungan kapitalis dengan proletar merupakan pertentangan kelas terakhir yang akan mengakhiri proses dialektis; yaitu terbentuknya masyarakat komunis yang tidak mengenal adanya kelas (*classes society*); masyarakat dibebaskan dari keterikatannya dengan milik pribadi, tidak ada eksploitasi, penindasan & paksaan. Anehnya, masyarakat komunis itu harus dicapai dengan kekerasan & paksaan. *Force is the midwife of every old society pregnant with a new one ...* Kekerasan

adalah bidan untuk setiap masyarakat lama yang hamil tua dengan masyarakat baru."

Teori revolusi sosial ala Marx ini pernah dijalankan oleh kaum revolusioner Marxist pada era Kekhalifahan Utsmani, saat Sultan Abdul Hamid II (1876-1909) berkuasa. Partai Dashnak dan Huncak yang berideologi ekstrem kiri itu hendak memisahkan Armenia dari kuasa pemerintahan Islam dengan serangkaian pemberontakan dan pembunuhan terhadap diri Sultan dan keluarganya melalui teror bom di Istanbul. Namun, usaha orang-orang komunis tersebut gagal total. Bahkan mereka ditumpas habis oleh Khalifah.

Saat itu Sultan Abdul Hamid II menyatakan bahwa ideologi Komunisme tidak hanya membahayakan umat Islam, tetapi juga membahayakan kemanusiaan. Sultan pun memberikan peringatan keras bahwa ideologi tersebut akan sangat destruktif jika berhasil menumbangkan kekuasaan.

Peringatan Khalifah Utsmani tersebut terbukti saat Partai Bolshevijk berhasil menumbangkan Kekaisaran Rusia dalam

revolusi berdarah 1917. Tidak hanya keluarga Tzar Nicholas Romanov II yang dibinasakan. Rakyat tak bersalah pun menjadi korban pembantaian. Tercatat lebih dari 20 juta jiwa binasa imbas dari Revolusi Bolshevik ini. Fakta mengerikan ada di Kota Tashkent. Terdapat sekira dua juta kuburan, korban massif dan struktural ketika Bolshevik menjajah Turkestan Timur, Uzbekistan kini!

Nah, bagaimana dengan Komunisme di negeri ini? *Sami mawon*. *Gada* bedanya. Kiprah PKI sejak awal kemunculannya di Indonesia selalu memosisikan diri berhadapan-hadapan: *vis a vis* dengan Islam dan umatnya.

### Sejarah Kelahiran PKI

Saat bergulir kebijakan *Ethische Politiek* Gubernur Jenderal Willem Idenburg pada era kepemimpinan Queen Wilhelmina van Oranje, di negeri ini telah lahir banyak kaum terpelajar hasil didikan kolonial dalam bidang edukasi yang difasilitasi Kementerian Pendidikan, Keagamaan & Kesenian, Mr. Josephus Hendricus Abendanon. Mereka yang terdidik dengan ide-ide liberal dan modernis netral agama itu mulai bersikap kritis terhadap kezaliman kuasa kolonial. Di antara sikap kritisnya itu mereka membentuk organisasi pergerakan di banyak tempat mereka bernaung, termasuk juga di instansi tempat mereka bekerja. Di antaranya, pada 1905 kaum pekerja yang terdidik dan kritis itu membentuk Staat Spoor-Bond, serikat buruh kereta api di Semarang. Berikutnya, pada 1908 mereka pun membentuk Perkumpulan Pegawai Spoor dan Trem (*Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel-VSTP*), serikat buruh kereta api yang jauh lebih militan daripada SS-Bond. Mereka memperjuangkan hak-hak buruh KA yang kerap tertindas oleh kesewenang-wenangan penguasa kolonial dalam menentukan upah, tarif dan penghargaan kepada para pekerja.

Pada saat yang sama, kesadaran politik dan

sikap perlawanan kaum Muslim di negeri ini mulai mengemuka sejak berdiri organisasi pergerakan Islam, seperti Djami'atoel Chair, al-Irsyad, Persjarikatan Moehammadijah, dan terutama Sjarikat Islam (SI) yang embrionya bermula sejak 1905 saat berdirinya Rekso Roemekso di Surakarta. Pergerakan SI yang bersimpati kepada Kekhalifahan Utsmani, bahkan secara terang-terangan mengambil ideologi Pan-Islamisme saat Natico SI di Kota Bandung pada 1916 jelas sangat membahayakan bagi kuasa pemerintahan kolonial Hindia Belanda saat itu.

Oleh karena itu, pihak kolonial sedapat mungkin berusaha untuk meredam bahkan menghancurkan potensi ancaman tersebut dengan melumpuhkan keberadaan Sjarikat Islam dalam pergerakannya. Di antara usahanya itu, pemerintah kolonial mengundang sosok Henk Sneevliet untuk datang ke Indonesia. Sosok aktivis kiri yang pernah bergabung dalam *Sociaal Democratische Arbeid Partij* (Partai Buruh Sosial Demokrat) dan memimpin pemogokan kaum buruh Belanda lewat federasi serikat buruh ini tiba di Batavia pada akhir 1913.

Tidak sampai setahun, pada Mei 1914, Sneevliet mendirikan *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV) atau Pergerakan Sosial Demokrat di Hindia. Kemudian pada 1916, dia bergabung dengan VSTP di Semarang. Sneevliet berkawan akrab dengan para aktivis VSTP, seperti Semaun, Darsono, Alimin Prawirodirdjo dan Tan Malaka yang juga menjadi anggota Sjarikat Islam di Semarang sejak 1915. Henk Sneevliet mengajak Semaun cs untuk juga aktif dalam ISDV. Dia menawarkan jalan baru perjuangan melawan kezaliman kolonial Belanda dengan ide-ide revolusioner Marxist yang dia propagandakan lebih rasional dan radikal dibandingkan dengan jalan perjuangan Sjarikat Islam.

Henk Sneevliet membina dan mengkader

Semaun cs agar bisa menginfiltrasi dan melumpuhkan Sjarikat Islam dari dalam sebagaimana rencana pihak kolonial. Terbukti, Semaun cs kerap berpolemik dengan para aktivis SI. Dia bahkan berani mengkritisi dan menentang keputusan H.O.S. Tjokroaminoto sebagai ketua CSI (Centraal Sjarikat Islam). Di antaranya saat SI mendesak pembentukan Indie Werbaar (Pertahanan Hindia) kepada pihak kolonial untuk mengantisipasi kecamuk Perang Dunia I (1914-1918).

Sneevliet dan pihak kolonial juga menentang keras pidato politik Tjokroaminoto terkait *Zelfbestuur* (*self government*) atau kehendak berpemerintahan sendiri (baca: merdeka berdasarkan Islam) pada 17 Juni 1916. Sneevliet mengalihkan semangat perjuangan kemerdekaan itu dengan upaya pemberontakan melalui pemogokan massal di Kota Surabaya yang jadi kediaman Tjokroaminoto. Sebelumnya, Sneevliet pun telah menyusupkan kader ISDV, yakni Mr. J.A. Brandsteder ke dalam Angkatan Laut Belanda di Pelabuhan Surabaya, Ir. Adolf Baars dan Van Burink ke kalangan PNS berkebangsaan Belanda.

Rencana Sneevliet tersebut menemukan momentumnya saat terjadi Revolusi Bolshevik 1917 di Rusia. Dia meyakini bahwa revolusi kaum komunis sepanjang September-Oktober 1917 tersebut bisa diikuti di Indonesia. Karena itu bersama Semaun cs, dia membentuk 'Pengawal Merah' sebanyak 3.000 orang. Kemudian, pada akhir 1917, ISDV memberontak di Surabaya & membentuk Dewan Soviet. Pemberontakan dan pemogokan yang diam-diam diskenariokan gagal oleh Sneevliet dan pihak kolonial ini berimbas kepada para demonstran, pemogok dan aktivis pergerakan di Surabaya yang langsung digebuk penguasa. Bahkan bukan hanya aktivis ISDV yang digebu, para aktivis Sjarikat Islam dan pergerakan Islam lainnya pun digaruk pihak kolonial. Melalui aksi Sneevliet, pemerintah

kolonial Belanda berhasil membelah dan melumpuhkan Sjarikat Islam dari dalam! Mereka punya alasan logis untuk membekuk SI atas keterlibatan kader-kadernya dalam pemberontakan gagal tersebut.

Pasca pemberontakan pada akhir 1917 itu, Sneevliet pergi meninggalkan Indonesia, balik kembali ke negeri Belanda pada awal 1918. *Hidden agenda*-nya sukses memecah Sjarikat Islam sekaligus melumpuhkan jalan perjuangannya. Semaun cs pun terkena delik aturan disiplin partai yang diusulkan KH Agus Salim dan H. Abdoel Moeis kepada H.O.S. Tjokroaminoto. Mereka dikeluarkan dari SI dan memilih aktif dalam ISDV dengan nama Sjarekat Rakjat. Kemudian, pada 23 Mei 1920, Semaun cs mengganti nama Sjarekat Rakjat-ISDV dengan nama baru yang bernuansa kebangsaan, Persjarikatan Kommunist di Hindia. Kelak, persjarikatan ini dikenal dengan nama PKI (Partai Komunis Indonesia).

### Serangan PKI Terhadap Ajaran Islam

Pergerakan kaum komunis dan PKI di negeri ini tidak hanya menginfiltrasi dan melumpuhkan SI dari dalam. Mereka juga kerap melakukan pemogokan massal di berbagai kota di era kolonial untuk melumpuhkan perekonomian mereka. Di antaranya, pada 1922 terjadi pemogokan pegawai pegadaian. Kemudian pada 1923 terjadi pemogokan buruh kereta api. Puncaknya, pada 1926 PKI kembali memberontak kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tanpa ampun, kali ini pihak kolonial menumpas pemberontakan ini dengan tindakan refresif. Mereka menangkap kaum pemberontak dan menginternir mereka ke Boeven Digoel, Papua. Namun, bukan hanya aktivis komunis yang dibuang sebagai Digoelist. Semua aktivis pergerakan digaruk habis, terutama para aktivis pergerakan Islam yang dinilai kolonial jauh lebih berbahaya daripada PKI pemberontak tersebut!

Selama menjalani pembuangan tersebut, kaum komunis sering berpolemik dengan para aktivis Islam yang sama-sama jadi interniran Digoelist. Mereka menyerang ajaran Islam yang mereka anggap tidak relevan dengan perjuangan kemerdekaan, menyia-nyikan waktu dengan ritual yang *unfaedah* bagi revolusi. Mereka bahkan menyerang ibadah haji ke Tanah Suci sebagai pemborosan dan justru memperkaya para penguasa feodalis di Arabia.

Bahkan sebenarnya, serangan kaum komunis anti Islam itu berlangsung sejak awal terbentuknya ISDV. Mereka sering menggugat para aktivis SI yang bersimpati dengan Khilafah Utsmaniyah, kerap bersilaturahmi dengan Konsulat Utsmani di Batavia, bahkan mengusung Pan Islamisme Utsmani sejak 1916. Sikap PKI seperti itu sejalan dengan kebijakan Komintern yang mengutuk Pan Islamisme di dunia internasional. Mereka menolak *doctrine* agama (terutama syariah Islam) dalam aktualisasi kehidupan. Bagi para pemuja Marxisme-Leninisme ini, ajaran agama adalah candu kehidupan. Mereka menganggap bahwa agama (terutama Islam) bisa memabukkan pemeluknya hingga diam tak bergerak dalam revolusi, terpedaya dalam gurita Kapitalisme. Agama mutlak harus dihancurkan dan ditiadakan. Oleh karena itu, sungguh pantas Joseph Stalin sempat menghardik Tan Malaka saat kader Sneevliet dari ranah Minang itu mengapresiasi semangat Pan Islamisme dalam pidatonya di sidang umum Komintern di Moskwa, November 1922. Bagi Stalin dan Komintern, siapapun yang mengusung Pan Islamisme dianggap sebagai antek Turki atau budak Ottoman.

Pelecehan, penghinaan ataupun perundangan terhadap ajaran Islam dan para pemeluknya semakin menggila sejak PKI mendapat karpet merah dilibatkan aktif ikut membentuk kabinet pemerintahan Nasakom dengan *guided democracy* 1960-1965 Orde

Lama-nya Bung Karno. Islam semakin disudutkan. Ajarannya distigmatisasi. Tokoh-tokohnya dikriminalisasi. Kelompok organisasi dan partai politiknya dibekukan dan dibubarkan. Bahkan para ulama dan aktivis Islam pun dijuluki sebagai kaum reaksioner, intoleran dan anti-revolusi. Ajaran Islam dilecehkan dengan ungkapan *Islam Sontoloyo* dan *Ijo loyo-loyo. SubhaanLaah...*

### Serangan PKI Terhadap Tokoh-Tokoh Politik Islam

Fakta yang nyaris tak pernah diungkap ke atas panggung sejarah bangsa ini adalah tipudaya kaum komunis saat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Mereka sedari awal memang memilih politik non kolaboratif saat menghadapi pendudukan balatentara Nippon dai Nihon di negeri ini dengan alasan bahwa Komunisme berseberangan ekstrem dengan Fasisme Chauvinisme Jepang. Namun, fakta historis membuktikan, saat Nippon tiba, mereka malah kabur ke Aussie bersama serdadu Belanda. Mereka yang tidak sempat melarikan diri, orang-orang PKI itu, bergerak di bawah tanah!

Tibalah saat Nippon memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari kepada bangsa Indonesia. Nippon pun mengizinkan para aktivis pergerakan untuk membentuk Dzukuritsu Zyunbi Tzocakai dan Dzukuritsu Zyunbi Inkai serta menghasilkan konstitusi dan naskah proklamasi pada 22 Juni 1945 dengan nama Piagam Djakarta. Namun, para pengusung Komunisme itu tetap menolak apapun hasil dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan tersebut, termasuk rencana Nippon untuk menyerahkan kuasa kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945. PKI menolak keras apapun yang difasilitasi dan dijanjikan pemerintahan pendudukan Nippon tersebut.

Oleh karena itu, saat orang-orang komunis

mengetahui kabar Nippon menyerah kepada pihak Sekutu sejak jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, mereka segera mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa skenario Nippon. Melalui para pemuda kiri, seperti Soekarni, Wikana dan Chaerul Saleh, mereka menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menegosiasikan ulang konstitusi dan naskah proklamasi kemerdekaan, PKI khawatir dengan klausul “negara berdasarkan atas dasar ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja”.

Lobi, diplomasi dan negoisasi itu pun ditindaklanjuti dengan pertemuan mendadak berikutnya di rumah dinas Laksamana Muda Tadashi Maeda. Tiga perwakilan Nasionalis Sekuler; Soekarno, Hatta dan Ahmad Soeardjo menyusun naskah proklamasi baru dan mengabaikan naskah proklamasi otentik Piagam Djakarta yang susah payah dirumuskan dan dikompromikan antara aktivis Islam dan Nasionalis Sekuler sejak pembentukan Panitia Sembilan pada 1 Juni 1945. Para pemuda komunis itu memaksakan kehendaknya kepada para aktivis Nasionalis Sekuler itu karena dinilai lebih aspiratif dan apresiatif jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh Islam di Panitia Sembilan yang dinilai konservatif dan tidak akomodatif.

Bukan hanya itu, para pemuda kiri juga berani menipu dan memperdaya Hatta pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, hanya beberapa jam setelah proklamasi kemerdekaan. Mereka diutus oleh Sam Ratulangi, Johannes Lattuharhary dan I Ketut Pudja yang tetap merasa khawatir jika Toedjoeh Kata dalam Piagam Djakarta 22 Juni 1945 akan ditetapkan sebagai konstitusi negara proklamasi dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan (Dzukuritsu Zyunbi Inkai) pada esok paginya, 18 Agustus 1945. Para pemuda aktivis kiri, yang dikenal sebagai Mahasiswa Prapatan 10

itu, mengaku-aku sebagai Opsir Kaigun Nippon yang mewakili Indonesia Timur di hadapan Hatta. Sang Proklamator pun membenarkan begitu saja tanpa mau repot melakukan klarifikasi. Akhirnya, Toedjoeh Kata itu pun dihapuskan saat Pantja-Sila dan UUD 1945 ditetapkan sebagai konstitusi negara.

Simbiosis mutualism kaum nasionalis sekuler, non-Muslim dan orang-orang komunis untuk menghapuskan Syariat Islam pun berjalan sempurna. Tidak hanya konstitusi yang disekularisasi. Para aktivis Islam dan tokoh umat yang memperjungkan Islam dan syariahnya kerap dijuluki sebagai mabok agama, fanatik buta, penghamba ajaran dan peradaban onta. Bahkan hanya untuk mengembalikan Toedjoeh Kata Piagam Djakarta ke dalam konstitusi saat berlangsung sidang Konstituante 1957 saja, para aktivis Islam dijuluki kadrun anti-Pancasila oleh D.N. Aidit, ketua CC PKI.

Pada saat tokoh umat dan kaum Muslim teralienasi oleh kediktatoran demokrasi dipimpin Nasakom, di antara tokoh Islam, seperti Buya Natsir dan Syafruddin Prawiranegara bergabung ke dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Bukittinggi sebagai bentuk antithesis terhadap pemerintahan pusat di Jakarta yang terkooptasi oleh kepentingan PKI. Imbasnya, PKI mem-*bully* Natsir dan partainya, Masyumi, sebagai antek nekolim, kontra revolusi dan anti Nasakom yang di-*simplicity* sebagai anti-Pancasila dan anti-Soekarnoisme. PKI menuntut rezim Orde Lama agar segera menangkap Buya Natsir dan para pengikutnya, sekaligus membubarkan Partai Masyumi. Para aktivis Islam pun dijeruji besi tanpa sidang pengadilan. Mereka dituduh makar, memberontak dan anti-pemerintah.

Serangan PKI tidak hanya kepada tokoh-tokoh politik Islam, namun juga kepada lawan-lawan kepentingan ideologisnya. Di antaranya

saat Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra)—badan *underbouw* PKI yang bergerak dalam dunia seni, sastra dan budaya—menyerang dan mengganyang para seniman, sastrawan dan budayawan yang tidak sekubu dengan Lekra PKI. Orang-orang komunis itu menyerang para budayawan seperti Taufik Ismail, Mochtar Lubis dan Rendra yang mendirikan Manikebu (Manifestasi Kebudayaan) yang bersikap kritis terhadap kediktatoran Orde Lama. Lekra tidak hanya menyuarkan larangan karya kreatif para aktivis Manikebu, tetapi sampai membreidel hingga membakar hangus buku-bukunya. Para pemuda komunis yang bergabung dalam Pemuda Rakyat pun suka meneror dan mengintimidasi tokoh-tokoh Manikebu saat bersua di jalan, bahkan menyeretnya ke hotel prodeo. Mereka mendakwa tokoh Manikebu sebagai antek nekolim dan budaya Barat. Kejahatan yang dilakukan kaum komunis saat itu terekam dengan runut dan runtut di dalam buku *Prahara Budaya* karya Taufik Ismail.

## Pembantaian Terhadap Ulama dan Umat Islam

Kejahatan dan kekejian yang dilakukan kaum komunis dan PKI terhadap ulama dan umat Islam sudah bermula sejak awal berdiri Republik ini. Pasca kemerdekaan diproklamasikan, mereka membentuk laskar merah dan laskar hitam dengan maksud menciduk mantan kolaborator Nippon dan memburu para pangreh pengabdikan kolonial Belanda. Terbukti dengan kasus tewasnya Si Jalak Harupat, Otto Iskandar Dinata, yang hilang diculik laskar hitam saat perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Demikian pula nasib penyair Amir Hamzah beserta keluarga besarnya dari Kesultanan Siak Sri Inderapura yang dibantai habis kaum komunis di Riau. Begitupun dengan trah Mataram di Kasunanan Surakarta yang diburu orang-orang komunis untuk dibunuh. Bahkan keluarga RA Kartini yang menjadi bupati Tegal pun tak luput diperdaya, dilecehkan dan

dipermalukan dengan mengaraknya di jalanan sambil ditelanjangi dan dikarungi goni. PKI menyatakan itu sebagai bentuk penghakiman atas feodalisme Jawa.

Saat terjadi pemberontakan PKI Front Demokratik Rakyat dalam Madiun Affair 1948, Moenawar Moesso dan Amir Sjarifuddin, mereka membantai dan mengusir umat Islam yang ada di Madiun, menyerang dan membakar rumah-rumah penduduk aktivis Masyumi dan Nahdlatul Ulama di Madiun, Magetan, Ponorogo, dan kota-kota disekitarnya. Masjid-masjid dan pondok-pondok pesantren diserang, dijarah dan dibakar. Para kiai dan santri-santrinya yang membela diri dan melawan langsung dihabisi, bahkan dikubur hidup-hidup. Ladang pembantaian seperti di pabrik dan gudang gula di Gorang Gareng, Magetan jadi kolam darah, saksi sejarah kebiadaban PKI terhadap para ulama dan umat Islam

Peristiwa mengengaskan kembali terjadi menjelang kudeta Gestapu Gestok 1965. Aksi-aksi sepihak PKI melalui Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Pemuda Rakyat kerap meneror warga dan menyerang pondok-pondok pesantren ketika mereka menyerobot paksa tanah milik pondok yang mereka juluki sebagai setan-setan desa. Demikian pula para ulama pimpinan pesantren dan tokoh umat yang distigmatisasi sebagai kapbir (kapitalis birokrat). Penjarahan dan pembunuhan banyak terjadi di pelosok negeri.

Kekejian dan kejahatan apa lagi yang harus dinarasikan? Dimana pun mereka berada, kaum merah komunis itu tak peduli jiwa manusia karena yang mereka pedulikan adalah dialektika materialism dan revolusi menuju masyarakat diktator ploretariat. Semoga umat tidak mudah lupa. PKI dan Komunisme adalah bahaya laten bagi Islam dan kaum Muslim dimana pun berada. Ya Allah, saksikanlah.

*Wallaaahu a'lam bi ash-shawaab.* □

# EKONOMI SOSIALISME VERSUS EKONOMI ISLAM

ideologi Sosialisme-Komunisme berkembang pesat pada era Uni Soviet (1922-1991). Melalui partai komunis, ideologi ini menyebar di berbagai belahan dunia. Beberapa negara bahkan bertransformasi menjadi negara komunis, seperti yang terjadi di Cina dan Kuba. Namun, sebagian negara lainnya mampu bertahan dari tekanan ideologi itu. Meskipun begitu, pada masa itu, ideologi Sosialisme-Komunisme cukup populer di kalangan masyarakat, termasuk di negara-negara Muslim.

Beberapa pemikir Muslim bahkan mengagumi sosok Karl Marx dan ideologinya. Contohnya adalah Haji Misbach (1876–1926). Ia dikenal sebagai tokoh Sarekat Islam Merah—pecahan organisasi Sarekat Islam—yang mempropagandakan Komunisme. Ia mengatakan, *“Bagi mereka yang menyebut dirinya Muslim, tetapi tidak setuju dengan Komunisme, saya bersedia mengatakan bahwa mereka bukanlah Muslim sejati, atau tidak sepenuhnya memahami posisi Islam.”*<sup>1</sup>

## Sosialisme-Komunisme

Sosialisme adalah ideologi yang berkebalikan dengan Kapitalisme. Dalam definisi kaum

Marxis, Kapitalisme merupakan bentuk kontrol tertentu atas kekuatan produksi, termasuk kepemilikan dan kendali atas alat-alat produksi oleh sektor swasta; kepemilikan tenaga kerja oleh individu secara legal; dan alokasi input dan output produksi melalui mekanisme pasar. Kapitalisme juga melibatkan pembagian kelas antara kapitalis (pemilik modal) dan pekerja (tenaga kerja). Mereka membentuk hubungan khusus dan mempengaruhi pasar tenaga kerja dan perusahaan.<sup>2</sup>

Sosialisme berakar dari bahasa Latin *“sociare”* yang berarti menggabungkan atau berbagi. Istilah terkait adalah *“societas”*. Maknanya adalah persahabatan dan persekutuan serta kesepakatan sukarela antara orang-orang bebas.<sup>3</sup>

Sosialisme merupakan sebuah sistem ekonomi dan ideologi yang menitikberatkan pada kepemilikan masyarakat secara kolektif atas alat-alat produksi. Ini berbeda dengan kepemilikan pribadi yang dominan dalam Kapitalisme. Dalam ekonomi sosialis, pengaturan kegiatan ekonomi dilakukan melalui perencanaan kolektif, bukan berdasarkan mekanisme pasar yang biasa dijumpai dalam sistem kapitalis. Tujuan

utamanya adalah mengarahkan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi.<sup>4</sup>

Karena itu doktrin Sosialisme bertentangan dengan Kapitalisme yang menekankan nilai moral individu dan menganggap orang bertindak secara terisolasi satu sama lain. Para pemikir sosialis mengkritik individualisme ini karena dianggap gagal mengatasi masalah sosial selama Revolusi Industri, seperti kemiskinan, penindasan dan ketidaksetaraan kekayaan yang luas. Sosialisme dianggap sebagai alternatif dari individualisme liberal dengan mengedepankan kepemilikan bersama atas sumberdaya.<sup>5</sup>

Seiring perkembangannya, terdapat sejumlah aliran pemikiran utama dalam ideologi Sosialisme. Ada Sosialisme Utopis, Sosialisme Anarkis, Sosialisme Demokratik dan komunisme. Salah satu varian yang paling menonjol adalah Sosialisme Marxis. Ini yang sering disebut sebagai Komunisme.

Sistem Sosialisme-Marxisme adalah sistem yang berdiri di atas asas yang menafikan eksistensi tuhan. Pemikiran Sosialisme-Komunisme berdiri atas dasar materialisme-dialektis dan materialisme-historis. Materialisme dialektis merupakan konsep yang menyatakan bahwa alam, manusia dan kehidupan merupakan materi yang berkembang secara internal sehingga tidak ada pencipta dan yang diciptakan

Ketika ditanya tentang Komunisme dan apa yang membedakan Komunisme dari Sosialisme, Lenin menjawab bahwa Komunisme adalah “bentuk sosial yang lebih tinggi” dibandingkan dengan Sosialisme. Sosialisme adalah bentuk pertama dari masyarakat baru (Komunisme).<sup>6</sup>

Lenin mengartikan Sosialisme sebagai tahap antara Kapitalisme dan Komunisme. Pernyataan ini merupakan respon dari kritikan kaum Marxis karena dianggap tidak mampu mewujudkan pemikiran Komunisme ala Karl Marx.

Setelah Revolusi Bolshevik tahun 1917, perbedaan antara Komunisme dan Sosialisme semakin jelas. Ketika itu Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia pada tahun 1918 berganti nama menjadi Partai Komunis Seluruh Rusia. Komunisme kemudian ditafsirkan secara khusus sebagai Sosialisme yang mendukung politik dan teori Bolshevisme, Leninisme, Marxisme–Leninisme.<sup>7</sup>

### Pandangan Islam

Ada beberapa aspek yang dapat menjelaskan mengapa sistem Sosialisme-Komunisme, termasuk dalam aspek ekonominya, bertentangan dengan Islam sehingga haram diadopsi oleh baik secara personal maupun secara kolektif dalam institusi negara.

*Pertama:* Sistem Sosialisme-Marxisme adalah sistem yang berdiri di atas asas yang menafikan eksistensi tuhan. Pemikiran Sosialisme-Komunisme berdiri atas dasar materialisme-dialektis dan materialisme-historis. Materialisme dialektis merupakan konsep yang menyatakan bahwa alam, manusia dan kehidupan merupakan materi yang berkembang secara internal sehingga tidak ada pencipta dan yang diciptakan.<sup>8</sup>

Kesimpulan ini sejalan dengan pernyataan Stalin yang mengutip pemikiran Marx dan Engels: “Pandangan materialistik terhadap

alam hanya berarti memahami alam apa adanya, tanpa campuran dari luar.”

Ia juga mengutip pandangan Lenin yang berkomentar mengenai pandangan materialis dari filsuf kuno Heraclitus, yang berpendapat: “Dunia, segalanya dalam satu, tidak diciptakan oleh Tuhan atau manusia, tetapi merupakan nyala hidup yang sistematis dan secara sistematis mati.”

Lenin berkomentar: “Ini adalah sebuah penjelasan yang sangat baik tentang dasar-dasar materialisme dialektis.”<sup>9</sup>

Bahkan Karl Marx secara terbuka mengkritik agama yang dia sebut sebagai candu. *“Agama adalah tangisan makhluk yang tertindas, hati dari dunia yang tanpa belas kasihan, dan jiwa dari kondisi yang tanpa jiwa. Agama adalah candu bagi rakyat. Penghapusan agama sebagai kebahagiaan maya bagi rakyat adalah tuntutan untuk kebahagiaan sejati mereka...”*<sup>10</sup>

Karena itu, menurut Bukharin & Preobrazhensky, agama dan Komunisme tak bisa berdampingan, baik secara teoretis maupun praktis. Tugas Partai Komunis adalah membuat kebenaran ini dimengerti oleh sebanyak mungkin kalangan massa pekerja. Agama dianggap sebagai salah satu alat paling kuat yang dimiliki para penindas untuk mempertahankan ketidaksetaraan, eksploitasi dan ketaatan hina dari para pekerja.<sup>11</sup>

Secara spesifik Lenin menyatakan kritiknya terhadap agama: *“Marxisme adalah materialisme. Oleh karena itu, ia bermusuhan dengan agama seperti materialisme para Ensiklopedis Abad Kedelapan Belas atau Materialisme Feuerbach. Hal ini di luar keraguan... Kita harus melawan agama. Itulah dasar dari semua materialisme dan oleh karena itu dari Marxisme.”*<sup>12</sup>

Materialisme adalah konsep yang batil. Ini karena ia berasumsi bahwa materi, termasuk alam semesta, manusia dan kehidupan, terjadi hanya melalui perkembangan materi itu sendiri

tanpa membutuhkan yang lain. Hizbut Tahrir, dalam berbagai terbitannya, telah mengkritik sosialisme-Komunisme dan juga konsep materialisme.<sup>13</sup>

Secara ringkas, kritik tersebut menyatakan bahwa materi pada kenyataannya adalah makhluk yang terbatas dan membutuhkan pihak lain, baik yang bersifat materi maupun yang berada di luar materi. Oleh karena itu, materi tidak dapat menciptakan dirinya sendiri maupun hal lainnya. Transformasi materi memerlukan campur tangan dari aspek lain. Materi juga tidak dapat melampaui aturan atau sifat-sifat yang ada padanya. Misalnya, untuk air menjadi uap dan mendidih, ia membutuhkan panas. Namun, agar mencapai titik didih, air membutuhkan tingkat panas tertentu, yang semuanya berada di luar kendali materi itu sendiri. Dengan demikian materi adalah makhluk yang diciptakan oleh Pencipta yang tidak terbatas dan tidak membutuhkan yang lain, yaitu Allah SWT.

*Kedua:* Pemikiran ekonomi Sosialisme, yang merupakan turunan dari materialisme-dialektis dan materialisme-historis, bertentangan dengan Islam. Salah satu ide paling mendasar dalam sistem Sosialisme mengenai kepemilikan adalah penghapusan kepemilikan barang. Namun, para pemikir Sosialisme berbeda dalam batasan barang yang harus dihapuskan.

Sosialisme-Komunisme memandang penghapusan kepemilikan pribadi. Marx dan Engels berkata: *“Teori komunis dapat diringkas dalam satu kalimat: penghapusan kepemilikan pribadi.”*<sup>14</sup>

Kemudian, pada masa pemerintahan Bolshevik di Uni Soviet, Lenin menginterpretasikan ajaran Marx dengan menghapuskan kepemilikan alat-alat produksi, seperti tanah, pabrik dan tambang, yang digunakan untuk menghasilkan profit; namun membiarkan kepemilikan barang-barang untuk keperluan pribadi, seperti kendaraan pribadi.

Pada tahun 1918, Lenin mengeluarkan dekret untuk menasionalisasi pabrik-pabrik besar. Pasal 22 Kode Sipil menyebutkan jenis properti tertentu seperti industri berat, transportasi dan konstruksi umum ditetapkan sebagai milik negara. Adapun bangunan yang tidak dikelola oleh negara, uang, barang-barang berharga seperti emas dan perak, serta barang-barang keperluan rumah tangga dan pribadi bisa dimiliki secara pribadi (Pasal 54).

Kemudian, Kode Tanah yang dikeluarkan pada 1922 menghapus kepemilikan pribadi atas tanah dan sumberdaya alam lainnya (pasal 1).<sup>15</sup>

Namun, setelah terjadi protes dan kelangkaan pangan, perdagangan swasta diizinkan dalam batas tertentu, dan perusahaan kecil yang jumlah pegawainya tidak melewati jumlah yang ditetapkan negara tidak dinasionalisasi.<sup>16</sup>

Pemikiran tersebut jelas bertentangan dengan sifat dasar manusia. Pasalnya,

Konsep tersebut bertentangan dengan Islam. Islam mengatur kepemilikan dan tidak mencabut kepemilikan atau membatasi kuantitasnya. Pembatasan kepemilikan di dalam Islam hanya berkaitan dengan caranya, bukan dengan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Dengan itu produktivitas dan kegiatan manusia tetap dapat berkembang.

kepemilikan barang merupakan bagian dari naluri manusia untuk mempertahankan diri yang tidak bisa dipisahkan. Mencoba mencabutnya hanya akan menyebabkan kecemasan dan penderitaan.<sup>17</sup>

Hal ini terilustrasi pada kebijakan Stalin yang menerapkan kolektivisasi pertanian dan pengendalian produksi pangan. Stalin berusaha menggabungkan banyak petani kecil menjadi kolektif pertanian negara untuk meningkatkan produksi dan mengendalikan sumber daya pertanian. Namun, kebijakan ini ditentang sehingga Stalin menggunakan cara brutal untuk mengambil alih tanah, hewan ternak dan hasil panen petani. Petani tidak diizinkan menyimpan atau menjual hasil panen mereka sendiri. Akibatnya, persediaan makanan yang seharusnya mencukupi malah berkurang. Kolektivisasi ini menyebabkan kelaparan yang mengakibatkan kematian yang mencapai hampir enam juta jiwa pada tahun 1931-1933, terutama terjadi di Ukraina dan Kazakhstan.<sup>18</sup>

Konsep tersebut bertentangan dengan Islam. Islam mengatur kepemilikan dan tidak mencabut kepemilikan atau membatasi kuantitasnya. Pembatasan kepemilikan di dalam Islam hanya berkaitan dengan caranya, bukan dengan jumlah barang dan jasa yang diproduksi. Dengan itu produktivitas dan kegiatan manusia tetap dapat berkembang. Di dalam Islam juga diatur secara tegas pengaturan kepemilikan barang dan jasa dibagi menjadi yaitu kepemilikan individu, kolektif dan negara. Ada barang yang masuk dalam harta milik umum seperti barang tambang yang depositnya besar; barang vital yang sangat dibutuhkan oleh publik, seperti air, api dan padang gembalaan; serta barang yang secara natural tidak bisa dikuasai, seperti laut, sungai dan teluk.

Negara di dalam Islam tidak boleh melakukan perampasan kepemilikan individu untuk diubah menjadi milik umum atau milik negara lewat nasionalisasi. Negara, misalnya,

tidak dapat menyita tanah pertanian milik seseorang, kecuali ia melentarkannya lebih dari tiga tahun. Industri-industri yang tidak masuk dalam kepemilikan umum, seperti industri pakaian, makanan dan kendaraan haram untuk dinasionalisasi.

*Ketiga:* Konsep Sosialisme-Komunisme bertentangan dengan metode Islam dalam memecahkan masalah. Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Kapitalisme menjadikan fakta sebagai sumber hukum, sementara Komunisme mengambil solusi berdasarkan konklusi hipotetik yang dikhayalkan terjadi pada masalah yang dihadapi. Islam mengambil solusi dalam bentuk hukum-hukum syariah dari dalil-dalil syariah. Sebaliknya, Kapitalisme dan Sosialisme-Komunisme bukanlah hukum syariah, melainkan bagian dari sistem kufur. Menghukumi sesuatu dengan sistem tersebut berarti berhukum dengan hukum selain Allah SWT. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tidak halal bagi setiap Muslim. Karena itu orang yang mengambil Kapitalisme dan Sosialisme-Komunisme, namun jika tidak mengimaninya, dikategorikan sebagai orang fasik. Namun, jika ia mengimani bahwa sistem tersebut merupakan hukum yang benar, sementara hukum Islam tidak sesuai dengan kondisi saat ini serta tidak mampu menjadi solusi ekonomi modern, maka ia menjadi kafir.<sup>19</sup>

Alhasil, sistem Sosialisme-Komunisme dipandang bertentangan dengan akidah Islam karena konsep materialisme dialektis yang menafikan eksistensi Tuhan. Demikian pula aturan-aturan turunannya, seperti pembatasan kepemilikan. Ia tidak hanya bertentangan dengan fitrah manusia, tetapi juga bertentangan dengan hukum-hukum Islam.

Dengan demikian, sistem Sosialisme-Komunisme haram dan tidak cocok untuk diterapkan di manapun di bumi ini. Satu-satunya sistem yang dianggap layak bagi umat

Islam dan manusia adalah sistem yang berasal dari Allah SWT, Tuhan Yang Mahaadil dan Mahabijaksana. Sistem Islam telah mengatur segala aspek kehidupan secara rinci, termasuk dalam aspek ekonomi.

*Wallahu a'lam bi ash-shawaab. [Muis]*

### Catatan kaki:

- <sup>1</sup> H.M. Misbach. (1925). Islamisme dan Komunisme. <https://www.marxists.org/history/indonesia/1925-MisbachIslamism.html>
- <sup>2</sup> Stanford Encyclopedia of Philosophy (2019). *Socialism*. <https://plato.stanford.edu/entries/socialism/>
- <sup>3</sup> Andrew Vincent (2010). *Modern Political Ideologies*. Wiley-Blackwell. hal. 83.
- <sup>4</sup> Internet Encyclopedia of Philosophy. *Socialism*. <https://iep.utm.edu/socialis/#SH1a>
- <sup>5</sup> Marvin Perry et al. (2009). *Western Civilization: Ideas, Politics, and Society – From 1600*. Vol. 2 (Ninth ed.). Boston: Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, hal. 540
- <sup>6</sup> Paresh Chattopadhyay (1991). Economic Content of Socialism in Lenin: Is It the Same as in Marx? *Economic and Political Weekly*, PE2-PE8.
- <sup>7</sup> Donald F. Busky (2000). *Democratic Socialism: A Global Survey*. Connecticut: Praeger.
- <sup>8</sup> Ghanim Abduh (1963). *Naqdu al-Isytirakiyyah al-Markisiyyah*. Hizbut Tahrir, hal. 6.
- <sup>9</sup> J. V. Stalin (1938). *Dialectical and Historical Materialism*. <https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1909/may/13.htm>
- <sup>10</sup> Karl Marx (1843). *A Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right*. <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/intro.htm>
- <sup>11</sup> Nikolai Bukharin & Evgeni- Preobrazhenski- (1920). The ABC of Communism: a Popular Explanation of the Program of the Russian Communist Party of the Bolsheviks. *Pb.: State Publishing House*.
- <sup>12</sup> Vladimir Ilyich Lenin (1909). *The Attitude of the Workers' Party to Religion*. <https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1909/may/13.htm>
- <sup>13</sup> Lihat: Ni"âm al-Islâm, Al-Ni"âm al-Iqticâdy fi al-Islâm, al-Syakhsiyah al-Islâmiyyah, al-Siyâsah al-Iqticâdiyyah al-Mutslâ, dan Naqu al-Isytirâkiyyah al-Markisiyyah.
- <sup>14</sup> Karl Marx & Frederic Angels (1848). *Manifesto of the Communist Party*. <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/index.htm>. Diakses 3 Agustus 2023
- <sup>15</sup> V. N. Bandera (1963). The New Economic Policy (NEP) as an economic system. *Journal of Political Economy*, 71(3), 265-279.
- <sup>16</sup> Stephen Lovell (2009). *The Soviet Union: A very short introduction* (Vol. 207). Oxford University Press, USA, hal. 60-61
- <sup>17</sup> Taqiyuddin al-Nabhâny (2004). *Al-Ni"âm al-Iqticâdy fi al-Islâm*. Beirut: Darul Ummah, hal. 46.
- <sup>18</sup> Stephen Lovell (2009). *The Soviet Union*, hal. 65.
- <sup>19</sup> Taqiyuddin al-Nabhâny (2004). *Al-Ni"âm al-Iqticâdy fi al-Islâm*, hal. 52.

# TOBAT

**S**ETIAP manusia tentu ingin masuk surga. Persoalannya, surga tak diberikan kepada semua orang. Surga hanya diberikan kepada orang-orang yang taat. Bukan kepada para pelaku dosa dan maksiat. Tak terbayangkan orang bisa masuk surga jika ia memiliki banyak dosa dan tak segera bertobat dari segala maksiat. Itulah sebabnya, Imam Ibnul Jauziy *rahimahullah* berkata:

يَا طَالِبَ الْجَنَّةِ، أُخْرِجَ أَبُوكَ آدَمَ مِنْهَا بِدَنْبٍ  
وَاحِدٍ أَتَطْمَعُ فِي دُخُولِهَا بِدُنُوبٍ لَمْ تَتُبْ عَنْهَا؟!

*Wahai engkau yang mengejar surga, sungguh Bapak kalian, Adam as., telah dikeluarkan dari surga hanya karena satu dosa. Lalu pantaskah engkau berambisi masuk ke dalam surga dengan membawa banyak dosa yang tidak segera engkau tobatinya?! (Ibnu al-Jauziy, At-Tabshirah, 1/326).*

Karena itu tobat dari segala dosa itu wajib bagi setiap manusia. Sebabnya, setiap manusia senantiasa berbuat dosa. Bisa setiap hari.

Bahkan setiap waktu. Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ ابْنِ آدَمَ حَطَّاءٌ، وَحَيْرُ الحَطَّائِينَ التَّوَابُونَ

*Setiap manusia pasti berbuat dosa. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang gemar bertobat (kepada Allah) (HR Ibnu Majah).*

Bahkan Rasulullah saw. sendiri, yang jelas-jelas *ma'shuum* (terpelihara dari segala dosa), biasa bertobat tak kurang dari 70 sampai 100 kali sehari (HR Muslim). Rasulullah saw. bersabda:

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ  
أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

*Demi Allah, sungguh aku ini biasa beristighfar (memohon ampunan) dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali (HR al-Bukhari).*

Tobat yang Allah perintahkan tentu adalah tobat yang sebenar-benarnya (*tawbat[an] nasuaha*) (QS at-Tahrim [66]: 8). Selain banyak beristighfar (memohon ampunan) kepada Allah, tobat yang sebenar-benarnya tentu memiliki sejumlah tanda. Menurut Syaqiq al-Balkhi *rahimahullLaah*:

عَلَامَةُ التَّوْبَةِ الْبِكَاءِ عَلَى مَا سَلَفَ، وَ الخَوْفُ مِنَ  
الْوُقُوعِ فِي الذَّنْبِ، وَ هِجْرَانُ إِخْوَانِ السُّوءِ، وَ  
مُلازِمَةُ الْأَخْيَارِ

*Tanda tobat itu adalah: menangisi dosa-dosa masa lalu; takut terjerumus kembali ke dalam dosa; menjauhi teman-teman yang buruk; dan selalu bergaul dengan orang-orang pilihan (shalih) (Adz-Dzahabi, Siyar A'laam an-Nubalaa', 9/315).*

Tentu tak selayaknya tobat ditunda-tunda.

Hanya karena masih muda, misalnya. Sebabnya, kata Imam Ibnu Rajab *rahimahullLaah*:

تَأْخِزُ التَّوْبَةَ فِي حَالِ السَّبَابِ قَبِيحٌ، فَنِي حَالِ  
الْمَشِيْبِ أَقْبَحُ وَأَقْبَحُ

*“Menunda-nunda tobat saat usia muda itu sangat buruk. Jauh lebih buruk lagi menunda-nunda tobat saat usia sudah tua.”* (Ibnu Rajab, *Lathaa'if al-Ma'aarif*, hlm. 737).

Karena itu pula Luqman al-Hakim pernah berkata kepada putranya, *“Nak, jangan engkau menunda-nunda untuk bertobat karena sesungguhnya kematian itu datang tiba-tiba.”* (Al-Baihaqi, *Tahdziib az-Zuhd al-Kabiir*, hlm. 137).

Saat ajal tiba, tentu tak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Pada saat demikian, kata Ibnu Rajab al-Hanbali *rahimahullLaah*, semua manusia pasti menyesal dan bahkan berangan-angan ingin kembali ke dunia. Salah satunya agar bisa bertobat. Kata Imam Ibnu Rajab:

أَنَّ الْمَوْتَى كُلَّهُمْ يَتَمَنَّوْنَ حَيَاةَ سَاعَةٍ لِيَتُوبُوا  
فِيهَا، وَ يَجْتَهُدُوا فِي الطَّاعَةِ، وَ لَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى  
ذَلِكَ.

*Sungguh kebanyakan orang-orang yang telah diwafatkan berangan-angan bisa hidup kembali meski hanya sesaat saja agar bisa bertobat dan bersungguh-sungguh melakukan ketaatan. Padahal hal demikian adalah mustahil bagi mereka* (Ibnu Rajab, *Lathaa'if al-Ma'aarif*, hlm. 727).

Karena itu sebelum ajal mendekat, teruslah bertobat. Sering-seringlah memohon ampunan kepada Allah SWT setiap saat. Pasti, tobat kita diterima. Demikian sebagaimana kata Imam

an-Nawawi *rahimahullLaah*, *“Andai seseorang mengulang-ulang suatu dosa hingga seratus kali, atau seribu kali, atau bahkan lebih dari itu, lalu ia benar-benar bertobat setiap kali berbuat dosa, maka tobatnya pasti diterima dan dosa-dosanya pasti gugur.”* (An-Nawawi, *Syarh Shahiih Muslim*, 17/75).

Setelah banyak bertobat, selanjutnya seorang Muslim wajib selalu taat kepada Allah SWT. Dalam hal ini Imam Ibnu Katsir *rahimahullLaah* berkata, *“Siapa saja yang suka agar menjadi orang mulia di dunia dan di akhirat, hendaknya ia senantiasa taat kepada Allah* (Ibnu Katsir, *Tafsiiir al-Qur'aan al-'Azhiim*, 6/475).

Selain itu, kata Malik bin Dinar *rahimahullLaah*:

اِتَّخَذَ طَاعَةَ اللَّهِ تِجَارَةً تَأْتِيكَ الْأَرْبَاحُ مِنْ غَيْرِ بَضَاعَةٍ  
*“Jadikanlah ketaatan kepada Allah sebagai ‘perniagaan (bisnis)’ yang mendatangkan laba (keuntungan) tanpa (harus menjual) barang dagangan.”* (Ibnu Hibban, *Rawdhah al-'Uqalaa*, hlm. 63).

Laba/keuntungan dari “bisnis” dalam bentuk ketaatan kepada Allah SWT ini tidak lain berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi (lihat: QS Ali Imran [3]: 133).

Alhasil, mari kita segera bertobat sebelum ajal mendekat. Mari kita bersungguh-sungguh taat kepada Allah SWT mumpung masih hidup di dunia sebelum tobat dan taat itu tak ada gunanya lagi di akhirat.

Semoga kita senantiasa bisa benar-benar bertobat kepada Allah SWT. Tobat setiap saat. Tobat dari segala dosa dan maksiat. Semoga dengan itu Allah mengampuni semua dosa-dosa kita hingga kita selamat, di dunia dan akhirat. Aamiin.

*Wa maa tawfiiqii illaa bilLaah 'alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib.* [Arief B. Iskandar]



## RUBRIK TAFSIR

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.E.I.



# MEMENANGKAN ISLAM ATAS SELURUH AGAMA

(Tafsir QS al-Fath [48]: 28)

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ  
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾

*Dialah Tuhan Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk Dia menangkan atas semua agama. Cukuplah Allah sebagai Saksi.*

(QS al-Fath [48]: 28).

Dalam ayat sebelumnya diberitakan tentang kebenaran mimpi Rasulullah saw. Dalam mimpinya, beliau melihat kaum Muslim bisa memasuki Masjid Haram dengan aman dan mengerjakan umrah hingga tuntas tanpa takut gangguan dari para musuh. Mimpi itu belum terealisasi ketika Rasulullah saw. dan kaum Muslim menunaikan umrah pada tahun Hudaibiyah. Sejarah membuktikan, pada tahun depannya, mimpi Rasulullah saw. menjadi kenyataan.

Kemudian ayat ini memberikan kabar gembira kepada kaum Mukmin dengan pertolongan kepada Rasulullah saw. atas musuh-musuhnya dan seluruh penduduk muka bumi.<sup>1</sup>

Allah SWT berfirman:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾

*Dialah Tuhan Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar.*

Dalam ayat ini diberitakan bahwa Allahlah Yang mengutus Rasul-Nya. Kata *rasûlahu* (Rasul-Nya) yang dimaksud adalah Nabi Muhammad saw.<sup>2</sup> Beliau diutus dengan membawa «*الهُدَى*» (petunjuk) dan «*دِينِ الْحَقِّ*» agama yang benar).

Secara bahasa makna «*الهدى*» adalah «*الرشاد والدلالة*» (penjelasan dan petunjuk).<sup>3</sup> Menurut Syihanbuddin al-Alusi, yang dimaksud dengan «*الهدى*» di sini adalah

### Tafsir Ayat

الدليل الواضح والحجة الساطعة (dalil yang jelas dan *hujjah* yang terang) atau al-Quran.<sup>4</sup>

Petunjuk dari Allah itulah yang sebenar-benar petunjuk. Bahkan satu-satunya petunjuk yang benar (Lihat: QS al-Baqarah [2]: 120).

Adapun frasa «دين الحق» (agama yang benar) menunjuk pada agama Islam.<sup>5</sup> Makna *al-haqq* di sini merupakan kebalikan dari kata *al-bâtil*. Bisa juga merupakan salah satu dari nama Allah SWT.<sup>6</sup> Islam memang agama dari Allah SWT dan satu-satunya agama yang Dia ridhai setelah Rasulullah saw. diutus (Lihat: QS Ali Imran [3]: 19).

Menurut Muhammad al-Amin al-Harari, makna *al-haqq* disini adalah *ats-tsâbit* (permanen, tetap) yang me-*nasakh* atau menghapus dan membatalkan semua agama.<sup>7</sup>

Dengan demikian semua agama selain Islam adalah batil. Termasuk pula agama-agama yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Sebabnya, sekalipun agama-agama tersebut berasal dari Allah, semua sudah di-*nanaskh* dengan Islam. Oleh karena itu, para Ahlul Kitab disebut al-Quran sebagai orang yang tidak beragama dengan agama yang benar (Lihat: QS at-Taubah [9]: 29).

Dua perkara itulah, yakni petunjuk dan Islam, yang diberikan kepada Rasulullah saw. sebagai utusan-Nya untuk diserukan kepada seluruh manusia, tanpa terkecuali. Ibnu Jarir ath-Thabari berkata, “Dialah Tuhan Yang mengutus Rasul-Nya Muhamad saw. dengan membawa keterangan yang jelas dan agama yang benar, yakni Islam. Dialah yang mengutus beliau sebagai penyeru makhluk-Nya kepada Diri-Nya.”<sup>8</sup>

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾

... untuk Dia menangkan atas semua agama.

Secara bahasa kata «الظهير» berarti salah satu anggota badan manusia. Tepatnya, punggung. Namun, kata itu digunakan untuk berbagai makna. Di antaranya, kata «ظهير عليه» bermakna «غلبه» (mengalahkan).<sup>9</sup>

Pada asalnya, kata «الإظهار» berarti «جعل الشيء على الظهر» (menjadikan sesuatu di atas punggung, permukaan). Oleh karena itu, ia kemudian digunakan untuk menyebut «الإعلاء» (meninggikan); atau «جعله باديا للرأي» (menjadikan sesuatu menjadi terlihat bagi orang yang melihat). Makna tersebut kemudian menjadi *haqiqah ‘urfiiyah*. Kalimat «إظهاره على الحق» berarti me-*nasakh* sebagian hukumnya yang diganti karena perubahan era. Kalimat «على الباطل» berarti menjelaskan kebatilannya. Adapun kalimat «إظهاره على الدين» adalah dengan memberikan kekuasaan kepada kaum Muslim atas semua pemeluk agama.

Lalu frasa *ad-dîn kullihî* bersifat umum, mencakup seluruh agama selain Islam. Ibnu Katsir berkata, “Frasa عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ berarti atas pemeluk seluruh agama di muka bumi, baik Arab maupun non-Arab, *ahlul millah* atau musyrik.”<sup>10</sup>

Az-Zamakhsyari juga berkata, “Yang dimaksud dengan frasa «الدِّينِ كُلِّهِ» adalah semua jenis agama dari berbagai agama yang bermacam-macam, baik agama kaum musyrik maupun orang-orang yang ingkar dari kalangan Ahlul Kitab. Sungguh Allah SWT merealisasikan itu. Maka dari itu, sungguh engkau tidak akan melihat satu pun agama, kecuali bagi Islam kejayaan dan kemenangan atas agama selainnya.”

Menerangkan ayat ini, Imam al-Qurthubi berkata, “Dia meninggikan agama-Nya atas seluruh agama.”<sup>11</sup>

Mufasssir tersebut menyebutkan bahwa ada yang berpendapat, “Agar Dia memenangkan Rasul-Nya atas semua agama, yakni atas agama yang telah Dia syariatkan dengan *hujjah*, kemudian dengan tangan dan pedang, serta me-*nasakh* (menghapus) semua agama yang lainnya.”<sup>12</sup>

Menurut az-Zuhaili, makna “Allah memenangkan Islam atas semua agama” adalah meninggikan agama-Nya di atas semua jenis agama dengan me-*nasakh* yang sebelumnya benar, menerangkan kerusakan semua yang sebelumnya batil. Ini merupakan penegasan

terhadap janji *al-fat-h* (kemenangan atau penaklukan).<sup>13</sup>

Jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya, ayat ini merupakan penjelasan dan penegasan terhadap kebenaran mimpi Rasulullah saw. Sebelumnya, Rasulullah saw. bermimpi bahwa umat Islam dapat masuk Makkah dan Masjid al-Haram serta menunaikan umrah hingga tuntas dengan aman dan tidak takut ancaman musuh. Beliau pun menceritakan mimpi tersebut kepada kaum Muslim. Akan tetapi, setelah beliau bersama kaum Muslim pergi ke Makkah pada tahun itu, mereka dihalangi kaum kafir Quraisy sehingga tidak bisa masuk Tanah Haram. Kemudian terjadi Perjanjian Hudaibiyah yang di antara isinya: Rasulullah saw. dan kaum Muslim harus pulang kembali tanpa diizinkan masuk ke Makkah pada tahun itu. Mereka baru bisa diperkenankan pada tahun berikutnya. Sebagian di antara mereka pun ada yang kecewa.

Kekecewaan mereka terobati ketika mendapatkan penjelasan Rasulullah saw. bahwa mimpi beliau itu tidak berarti harus terjadi pada tahun itu. Kemudian Allah pun memastikan kebenaran mimpi tersebut dan peristiwa akan terjadi. Ini diberitakan dalam ayat sebelumnya:

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾

*Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (QS al-Fath [48]: 27).*

Juga firman-Nya dalam ayat ini:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾

*Dialah Tuhan Yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar.*

Dalam ayat ini bahkan bukan sekadar bisa masuk ke Makkah, Masjid al-Haram dan menunaikan ibadah umrah, namun jauh lebih besar dari itu. Tentang ayat ini, al-Khazin berkata, “Di dalamnya terdapat penjelasan tentang *al-fat-*

*h* (kemenangan, penaklukan) dan kaum Muslim memasuki Makkah.”<sup>14</sup>

Peristiwa yang diberitakan dalam ayat ini, yakni kekalahan seluruh agama yang ada di muka bumi ini belum terjadi pada zaman Nabi saw. sebagaimana janji Allah SWT dalam ayat sebelumnya. Masuknya kaum Muslim ke Makkah, Masjid al-Haram dan menunaikan umrah secara damai dan tidak takut ancaman benar-benar terjadi pada tahun sesudahnya.

Menurut asy-Syaukani, janji Allah SWT ini, alhamdulillah, sudah terjadi. Islam telah mengalahkan semua agama dan semua pemeluk agama sudah terkalahkan oleh Islam.<sup>15</sup>

Namun, jika mendasarkan pada penjelasan para ulama tentang makna frasa: *عَلَى الدِّينِ كَلِمَةً* yang mencakup seluruh agama yang ada di muka bumi belum terjadi, maka sebagian agama memang sudah dikalahkan, tetapi belum semuanya. Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari, keadaan tersebut benar-benar terjadi setelah turunnya Isa bin Maryam yang membunuh Dajjal. Mufasssir tersebut berkata, “Agar Dia dengan Islam membatalkan semua agama lainnya hingga tidak ada agama selain Islam. Itu terus terjadi hingga Isa bin Maryam turun dan membunuh Dajjal. Ketika itu, batallah seluruh agama selain agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Dia memenangkan Islam atas semua agama.”<sup>16</sup>

Kemudian ayat ini diakhiri dengan firman-Nya:

﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾

*Cukuplah Allah sebagai Saksi.*

Menurut al-Qurthubi, huruf *al-bā'* pada frasa *بِاللَّهِ* merupakan *zāidah* (tambahan). Karena itu ayat ini bermakna: «كَفَى اللَّهُ شَهِيدًا» (Cukuplah Allah menjadi Saksi).<sup>17</sup>

Menurut mufasssir, perkara yang Allah menjadi Saksi adalah kenabian Rasulullah saw. Al-Khazin berkata, “Cukuplah bagi Allah menjadi Saksi bahwa beliau adalah utusan-Nya.”<sup>18</sup>

Ibnu Katsir juga berkata, “Beliau adalah

utusan-Nya dan Dia adalah penolongnya.”<sup>19</sup>

Imam al-Qurthubi juga berkata, “Cukuplah Allah sebagai Saksi atas Nabi-Nya. Kesaksian-Nya atas beliau adalah menerangkan kebenaran kenabiannya dengan mukjizat.”<sup>20</sup>

Ada pula yang mengatakan bahwa perkara yang Allah menjadi Saksi-Nya adalah kemenangan yang Dia janjikan. Asy-Syaukani berkata, “Cukuplah bagi Allah sebagai Saksi atau kemenangan yang dijanjikan kepada kaum Muslim dan kebenaran *nubuwwah* Nabi saw.”<sup>21</sup>

Mengenai makna ayat ini secara keseluruhan, Ibnu Jarir berkata, “Ini adalah pemberitahuan dari Allah SWT kepada Nabi-Nya saw. dan sebagian Sahabatnya yang tidak menyukai Perjanjian Hudaibiyah, bahwa Allah SWT akan menaklukkan Makkah dan negeri-negeri lain untuk menghibur mereka dari kesusahan dan kesedihan yang mereka alami karena meninggalkan Makkah sebelum mereka memasuki kota itu dan *thawaf* di Baitullah.”<sup>22</sup>

Demikianlah. Ayat ini memberitakan bahwa Dialah Allah Yang mengutus Rasulullah saw. dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Dia pula Yang akan memenangkan Islam semua agama tanpa kecuali. Ini adalah berita dan janji Allah Yang janji-Nya pasti benar dan terwujud. Dia tidak akan menyelisihi janji-Nya dan pasti dapat mewujudkan janji-Nya. Tidak ada satu pun yang bisa menghalangi Diri-Nya Yang Mahakauasa atas segala sesuatu. Dialah Tuhan bumi, langit, beserta seluruh isinya. Masih adakah yang meragukan kemenangan Islam atas seluruh agama?

*Wallâh a'lam bi ash-shawâb. [].*

### Catatan kaki:

- <sup>1</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 7 (tt: Dar Thayyibah, 1999), 360
- <sup>2</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 16 (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), 291
- <sup>3</sup> Abu Bakar al-Razi, *Mukhtâr al-Shihhah* (Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, 1999), 325
- <sup>4</sup> al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 13 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 275
- <sup>5</sup> al-Zamakhshari, *al-Kasysyâf*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1987), 346; al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol.

Ayat ini memberitakan bahwa Dialah Allah Yang mengutus Rasulullah saw. dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Dia pula Yang akan memenangkan Islam semua agama tanpa kecuali. Ini adalah berita dan janji Allah Yang janji-Nya pasti benar dan terwujud. Dia tidak akan menyelisihi janji-Nya dan pasti dapat mewujudkan janji-Nya. Tidak ada satu pun yang bisa menghalangi Diri-Nya Yang Mahakauasa atas segala sesuatu. Dialah Tuhan bumi, langit, beserta seluruh isinya. Masih adakah yang meragukan kemenangan Islam atas seluruh agama?

5 (Damaskus: Dar Ibnu Katsîr, 1994), 65; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 13, 275; al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 26 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashshir, 1998), 200

<sup>6</sup> al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 13, 275

<sup>7</sup> al-Harari, *Hadâiq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 27 (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2001), 205

<sup>8</sup> al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Tâ'wil al-Qur'ân*, vol. 22 (tt: al-Risalah, 2000), 260

<sup>9</sup> al-Asfahani, *al-Mufradât fi Gharîb al-Qur'ân (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992)*, 540

<sup>10</sup> Ibnu Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 7, 360

<sup>11</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 16, 291

<sup>12</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 16, 291

<sup>13</sup> al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 26, 200

<sup>14</sup> al-Khazin, *Lubâal-Ta'wil fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 172

<sup>15</sup> al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 65

<sup>16</sup> al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Tâ'wil al-Qur'ân*, vol. 22, 260

<sup>17</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 16, 292

<sup>18</sup> al-Khazin, *Lubâal-Ta'wil fi Ma'ânî al-Tanzîl*, vol. 4, 172

<sup>19</sup> Ibnu Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm*, vol. 7 (tt: Dar Thayyibah, 1999), 360

<sup>20</sup> al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 16, 292

<sup>21</sup> al-Syaukani, *Fat-h al-Qadîr*, vol. 5, 65

<sup>22</sup> al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Tâ'wil al-Qur'ân*, vol. 22, 260

## NEGARA WAJIB MENJAMIN DISTRIBUSI KEKAYAAN SECARA ADIL (Telaah Kitab *Muqaddimah ad-Dustûr* Pasal 157)

**B**erbanding terbalik dengan negara kapitalis, yang membiarkan kekayaan terpusat dan terhimpun pada segelintir orang kaya, negara Khilafah justru berupaya menjaga distribusi (peredaran) kekayaan hingga tidak terpusat hanya kepada kelompok atau individu-individu tertentu.

Dalam sistem Kapitalisme jurang kesenjangan antara si kaya dan miskin sangat lebar dan dalam. Laporan “*Time to Care*” Oxfam International menyebut ada 2.135 orang kaya di dunia yang mengontrol jumlah uang melebihi uang yang dimiliki 4,6 miliar orang pada miskin pada tahun 2019. Fakta lain mengungkapkan, 22 pria di dunia memiliki kekayaan akumulasi lebih banyak dibanding kekayaan akumulasi 326 juta perempuan di Afrika. Upah yang tidak dibayar kepada perempuan berusia 15 tahun US\$ 10,8 triliun pertahun. Pada tahun 1990-an, di Asia dan Afrika, lebih dari 60% penduduknya tidak mampu memenuhi keperluan kalori minimum yang diperlukan untuk hidup sehat. Padahal kekurangan nutrisi ini bisa ditutup hanya dengan 2% dari total produksi padi-padian dunia.

Negara Khilafah, dengan konstitusi

syariahnya, tidak hanya fokus menciptakan pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyat, keadilan dan *fair play* dalam mekanisme pasar. Lebih dari itu, Khilafah juga menjamin agar kekayaan atau harta bisa beredar di tengah-tengah masyarakat.

Di dalam Pasal 157 Kitab *Muqaddimah ad-Dustuur* disebutkan:

تَعْمَلُ الدَّوْلَةُ عَلَى تَدَاوُلِ الْمَالِ بَيْنَ الرَّعِيَّةِ وَتَحْوُلِ  
دُونِ تَدَاوُلِهِ بَيْنَ فِئَةٍ خَاصَّةٍ

*Negara berusaha menjamin agar harta benar-benar beredar di antara rakyat dan mencegah peredarannya hanya terjadi di antara kelompok tertentu.*

Dalil yang mendasari pasal ini adalah firman Allah SWT:

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾

*...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian (QS al-Hasyr [59]: 7).*

‘*Illat* (sebab pensyariaatan hukum) pemberian harta *fai*’ hanya kepada kaum Muhajirin saja,



dan tidak kepada seorang pun dari kalangan Anshar, kecuali dua orang laki-laki fakir dari mereka, yakni Abu Dujanah dan Sahal bin Hunaif, padahal harta *fa'i'* adalah hak seluruh kaum Muslim, adalah agar harta tidak beredar di antara orang-orang kaya saja. Kisah ini dituturkan oleh Imam Baihaqi dan Ibnu Saad di dalam Kitab *Ath-Thabaqaat*. Dalam ayat ini Allah SWT menetapkan adanya *'illat*, yakni agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Kaidah ushul fiqih menyatakan:

الْعِلَّةُ تَدْوُرُ مَعَ مَعْلُولٍ وَجُودًا وَعَدَمًا

*'Illat itu beredar mengikuti yang di-'illati-nya; ada atau tidak adanya.*

Atas dasar itu, ketika terjadi ketimpangan peredaran harta di antara masyarakat, Khalifah wajib menciptakan keseimbangan sebagai bentuk pengamalan dari ayat di atas. Sebabnya, ayat tersebut mengandung *'illat*. Lafal yang terkandung di dalam nas tersebut umum meskipun kejadian yang melatarbelakangi ayat tersebut bersifat khusus. Kaidah *syar'iyah* menetapkan:

الْعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ وَ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ

*Pelajaran itu diambil berdasarkan keumuman lafalnya, bukan berdasarkan kekhususan sebabnya.*

Untuk menjaga peredaran harta kekayaan di tengah-tengah berjalan secara adil dan normal, Khilafah menerapkan aturan-aturan penting di antaranya:

### 1. Mencegah individu atau sekelompok individu menguasai harta-harta milik umum.

Yang menjadi bagian harta milik umum adalah: *Pertama*, harta yang dibutuhkan oleh seluruh kaum Muslim, atau menjadi hajat hidup orang banyak, dan jika tidak tersedia akan menyebabkan kegoncangan dan

perselisihan; misalnya air. Rasulullah saw menjelaskan sifat-sifat harta kepemilikan umum ini secara rinci dalam riwayat-riwayat shahih. Dari Abu Khurasyi dituturkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

*Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api (HR Abu Dawud).*

Air, padang rumput dan api adalah harta pertama yang diperkenankan oleh Rasulullah saw. untuk seluruh manusia. Seluruh manusia memiliki hak dan andil yang sama terhadap harta semacam ini. Mereka dilarang memiliki sebagian atau keseluruhan harta milik umum. Mereka hanya berhak mengambil manfaat dari harta-harta tersebut. Sebabnya, harta tersebut adalah milik seluruh kaum Muslim. Setiap orang boleh mengambil air minum dari sungai, danau, wadi, atau istirahat di padang rumput yang belum dimiliki. Termasuk ke dalam harta jenis ini adalah harta yang menjadi kebutuhan dan hajat masyarakat umum. Yang dimaksud dengan "harta-harta yang menjadi hajat hidup masyarakat umum" adalah semua harta yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang jika harta itu lenyap maka manusia akan mengalami kegoncangan, berselisih dan bersengketa untuk mendapatkannya. Sebagai contoh, semua kabilah akan mengalami kegoncangan dan perselisihan saat kehilangan air atau kehilangan padang gembalaan untuk ternaknya.

Atas dasar itu, segala sesuatu yang berhubungan erat dengan hajat hidup orang banyak, sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-harinya, dan manusia akan tergoncang serta berselisih ketika sesuatu itu tidak ada maka barang tersebut termasuk harta milik umum.

Status alat-alat yang digunakan untuk mengolah atau dipergunakan di atas harta



kepemilikan umum jenis pertama dikategorikan juga harta kepemilikan umum. Sebabnya, hukum dan status kepemilikan alat-alat itu sama, yaitu sebagai milik umum. Oleh karena itu, alat-alat yang digunakan untuk mengeluarkan air dari mata air, sumur, sungai, danau, dan saluran-saluran yang menghubungkannya ke rumah-rumah, termasuk milik umum, sesuai dengan status air yang dikeluarkan.

Alat-alat pembangkit listrik yang dibangun di atas bendungan dan sungai, tiang-tiang penyangga, jaringan kawat, dan gardu-gardunya adalah milik umum. Sebabnya, alat-alat ini menghasilkan listrik dari harta milik umum sehingga status hukum alat-alat ini mengikuti sumbernya. Alat pembangkit listrik, gardu-gardu, tiang-tiang penyangganya dan jaringan kawatnya merupakan bagian dari kepemilikan umum selama prasarana itu dibangun di jalan

Alat-alat pembangkit listrik yang dibangun di atas bendungan dan sungai, tiang-tiang penyangga, jaringan kawat, dan gardu-gardunya adalah milik umum. Sebabnya, alat-alat ini menghasilkan listrik dari harta milik umum sehingga status hukum alat-alat ini mengikuti sumbernya. Alat pembangkit listrik, gardu-gardu, tiang-tiang penyangganya dan jaringan kawatnya merupakan bagian dari kepemilikan umum selama prasarana itu dibangun di jalan umum, baik digunakan untuk pemanas maupun untuk penerangan.

umum, baik digunakan untuk pemanas maupun untuk penerangan. Begitu pula industri gas alam dan batu bara juga tercakup dalam kepemilikan umum. Sebabnya, status hukum industri semacam ini mengikuti hukum kepemilikan dari gas alam dan batu bara. Gas alam dan batu bara termasuk kepemilikan umum disebabkan karena keduanya termasuk barang berharga dan tercakup dalam “api”.

*Kedua*, barang tambang yang memiliki deposit sangat besar dan melimpah. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud. Dijelaskan bahwa Rasulullah saw. pernah menarik kembali pemberian beliau yang berwujud tambang garam dari Abyadh bin Hamal, karena depositnya yang melimpah. Negara dilarang memberikan hak khusus kepada perusahaan, atau sekelompok orang tertentu, untuk mengeksploitasinya dengan alasan apapun. Negara wajib membiarkan harta-harta semacam ini sebagai milik umum. Negara adalah satu-satunya pihak yang berwenang melakukan eksploitasi dan menjualnya atas nama kaum Muslim, dan hasilnya disimpan di Maitul Mal.

Ketentuan ini berlaku untuk semua jenis tambang dengan deposit melimpah ruah, baik barang tambang yang terdapat di permukaan bumi, seperti garam, batubara, granit, maupun barang tambang yang berada di perut bumi atau di bawah laut, semacam emas, perak, uranium, fosfat, timah, minyak bumi, gas alam, dan sebagainya.

Adapun barang tambang dengan deposit kecil adalah termasuk harta milik individu dan seseorang boleh menguasai dan memilikinya. Hanya saja, mereka wajib menyerahkan *khumus* (seperlima) dari hasil tambang itu kepada Baitul Mal, baik yang dieksploitasi sedikit maupun banyak.

*Ketiga*, harta yang tabiat asalnya menghalangi atau mencegah monopoli seseorang untuk memilikinya. Perbedaan dengan jenis kepemilikan umum yang pertama



adalah: jenis kepemilikan yang ketiga ini tabiat asalnya menghalangi atau mencegah seseorang untuk memilikinya, sedangkan pada jenis kepemilikan pertama, tabiat asalnya membolehkan seseorang untuk menguasainya; misalnya air. Tabiat asal dari air tidak menghalangi atau mencegah seseorang untuk memilikinya. Atas dasar itu, seseorang tidak dilarang memiliki sumur yang deposit airnya kecil. Namun, jenis kepemilikan yang ketiga ini tabiat asalnya mencegah atau menghalangi seseorang untuk memilikinya.

Dalil harta milik umum jenis ketiga ini adalah sabda Rasul saw.:

مِنَى مَنَاحٍ مِّنْ سَبَقِ

*Mina menjadi hak orang-orang yang lebih dulu tiba (HR Abu Dawud dan Ahmad).*

Selain itu, diriwayatkan pula dari Rasul saw bahwa beliau melarang seseorang menguasai atau memiliki jalan umum dan mengizinkan semua orang untuk sama-sama memiliki hak (andil) di dalamnya.

Oleh karena itu laut, sungai, danau, teluk, selat, terusan (seperti Terusan Suez), lapangan umum dan masjid-masjid adalah milik umum bagi setiap anggota masyarakat.

Benda-benda yang hukumnya mengikuti kepemilikan umum adalah kereta api, tiang-tiang penyangga listrik, saluran-saluran air dan pipa-pipa penyalur air yang terletak di jalan-jalan umum. Semuanya termasuk harta milik umum, mengikuti status hukum dari jalan umum. Harta-harta semacam ini tidak boleh dikuasai oleh seorang atau sekelompok orang. Atas dasar itu, seorang atau sekelompok individu dilarang menguasai secara sepihak harta-harta yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw.:

«لَا جَمْعَ إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ»

*Tidak ada hima (proteksi atas harta kepemilikan umum) kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya (HR Abu Dawud).*

Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh menguasai harta milik umum untuk kepentingan dirinya sendiri. Kereta api, trem, tiang-tiang penyangga listrik, saluran-saluran air, pipa-pipa penyalur air yang terletak di jalan-jalan umum, adalah milik umum. Pengambilalihan sebagian jalan umum oleh seorang individu, kemudian ia menggunakan sebagian jalan umum itu untuk kepentingan dirinya sendiri secara terus-menerus, dapat dianggap sebagai bentuk penguasaan atas harta milik umum. Tindakan seperti ini jelas-jelas dilarang oleh Islam. Pasalnya, penguasaan dan pengaturan harta milik umum ada di tangan negara, bukan di tangan individu atau sekelompok individu.

2. *Melarang transaksi-transaksi yang bertentangan dengan syariah seperti penimbunan, riba, penipuan, spekulasi, jual-beli yang salah satu pihaknya tidak mengetahui harga, dan lain sebagainya.*

Mata uang berbasis pada dinar dan dirham dijadikan sebagai alat tukar resmi negara.

3. *Jika di pasar terjadi kelangkaan barang, atau harga-harga membubung tinggi, Khilafah melakukan intervensi pasar.*

Caranya dengan melakukan operasi pasar, seperti menyuplai barang-barang langka tersebut dengan harga yang murah, bukan dengan cara pematokan harga. Pasalnya, pematokan harga (*tas'iii*) termasuk kezaliman.

Dengan cara ini, mekanisme pasar berjalan secara normal dan adil sehingga harta beredar di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya pada individu-individu tertentu.

*Wallâhu a'lam bi ash-shawâb.* [Gus Syams]

## SYUBHAT DALIL KEBOLEHAN KANZ AL-MAAL SELAMA DIKELUARKAN ZAKATNYA

عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 34] قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «مَنْ كَنَزَهَا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَهَا، فَوَيْلٌ لَهُ، إِمَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنَزَلَ الرَّكَاةُ، فَلَمَّا أُنزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ»

Dari Khalid bin Aslam, ia berkata: Kami pernah keluar bersama Abdullah bin Umar ra. Lalu ada seorang Arab baduwi berkata, “Beritahu aku tentang firman Allah (yang artinya): Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak mereka belanjakan di jalan Allah ... (TQS at-Tawbah [9]: 34).” Ibnu Umar ra. berkata, “Siapa yang menimbun emas/perak dan tidak menunaikan zakatnya maka kebinasaan untuk dirinya. Tidak lain ini sebelum diturunkan kewajiban zakat. Ketika telah diturunkan kewajiban zakat, Allah menjadikan zakat tersebut sebagai penyucian untuk harta.” (HR al-Bukhari no. 1404 dan Ibnu Majah no. 1787).

**D**hiya'uddin al-Maqdisi (w. 643 H) juga mengeluarkan hadis ini dengan redaksi yang lebih panjang di dalam *Al-Ahādīts al-Mukhtārah (al-Mustakhraj min al-Ahādīts al-Mukhtārah min mā lam Yukharijhu al-Bukhārī wa Muslimun fī Shahīhayhimā*, hadis no. 277.

Riwayat ini jelas shahih. Mereka yang berpendapat “boleh *kanzul-maal*/selama dizakati” juga berdalil dengan *khobar* ini. Mereka menyatakan, *khobar* Ibnu Umar ini tidak dikatakan merupakan *takhshīsh* al-Quran dengan as-Sunnah atau *nasakh* al-Quran dengan as-Sunnah, tetapi *khobar* ini adalah informasi yang sahih tentang *nasakh* itu. Jadi itu termasuk *nasakh* al-Quran dengan al-Quran. Sebabnya, yang *me-nasakh* al-Quran adalah al-Quran. Pasaunya, zakat difardhukan dengan al-Quran bukan dengan as-Sunnah. Karena itu yang wajib adalah mengambilnya karena itu merupakan

*khobar* shahih yang meriwayatkan bahwa ayat tersebut telah di-*nasakh* dengan ayat yang lainnya. Jadi pengharaman penimbunan telah di-*nasakh* sehingga harta yang dizakati boleh dtimbun.

Pendapat ini tidak shahih dilihat dari empat hal. *Pertama*, ini merupakan *khobar ahad* yang meriwayatkan bahwa ayat *al-kanzu* telah di-*nasakh*. Karena itu berlaku ketentuan terhadap *khobar ahad* bahwa itu adalah *zhanni*, sementara yang ada pada ayat tersebut adalah *qath'i*. Yang *qath'i* lebih di-*raajih*-kan atas yang *zhanni*. Artinya, tidak adanya pe-*nasakh*-an lebih dikuatkan daripada adanya pe-*nasakh*-an. Dengan demikian yang diamalkan adalah tidak adanya *nasakh* karena itu yang lebih *raajih* dan klaim adanya *nasakh* harus ditolak.

*Kedua*, informasi pe-*nasakh*-an ayat adalah semisal riwayat hadis yang mengandung suatu hukum di-*nasakh* oleh hukum lainnya yang ada

di suatu ayat al-Quran. Hadis tidak me-*nasakh* ayat jika hadis itu mengandung apa yang me-*nasakh*-nya atau memberi faedah pe-*nasakh*-annya. Jadi, *khobar* Ibnu Umar di atas tidak me-*nasakh* ayat al-Quran semata karena informasinya bahwa ayat telah di-*nasakh*.

*Ketiga*, Ibnu Umar tidak menginformasikan bahwa ayat *al-kanzu* telah di-*nasakh* sebagai informasi dari Rasul saw. Artinya, Ibnu Umar tidak meriwayatkan dari Rasul saw. yang bersabda bahwa ayat *al-kanzu* telah di-*nasakh*. Ia hanya memberikan pendapatnya bahwa ayat tersebut telah di-*nasakh*. Sebabnya, orang Arab baduwi itu bertanya kepada dirinya tentang ayat tersebut. Lalu Ibnu Umar menjawab dari dia sendiri bahwa ayat tersebut telah di-*nasakh*. Ia tidak menyandarkan pendapatnya itu kepada Rasul saw. yang memberitahu dia bahwa ayat itu telah dinasakh. Jadi itu merupakan pendapat Ibnu Umar pribadi bahwa ayat tersebut telah di-*nasakh* dengan ayat zakat. Artinya, itu merupakan pemahaman Ibnu Umar bahwa zakat me-*nasakh* ayat ini, dan itu bukanlah hadis dari Rasul saw. Pendapat Ibnu Umar dan pemahamannya tidak dinilai sebagai dalil syariah. Sebabnya, pendapat Sahabat memang tidak dinilai sebagai dalil atas hukum syariah, lalu bagaimana dapat dinilai me-*nasakh* al-Quran?

*Keempat*, zakat difardhukan pada tahun kedua Hijrah, sementara ayat *al-kanzu* diturunkan pada tahun kesembilan hijrah. Lalu bagaimana mungkin hukum zakat yang lebih dulu diturunkan me-*nasakh* ayat *al-kanzu* yang diturunkan tujuh tahun lebih belakangan. Oleh karena itu *khobar* Ibnu Umar itu ditolak secara *diraayah*.

Keempat poin di atas cukup untuk menggugurkan *istidlaal* dengan *khobar* ini dan untuk membatalkan klaim bahwa ayat *al-kanzu* telah di-*nasakh*. Oleh karena itu *khobar* ini tidak layak menjadi dalil atas kebolehan menimbun harta jika dikeluarkan zakatnya.

Mereka juga berargumentasi dengan hadis dari jalur Syarik bin Abdullah dari Abu Hamzah al-A'war dari Amri asy-Sya'bi dari Fathimah binti

Qais, bahwa Nabi saw. telah bersabda:

«لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ»

*Tidak ada dalam harta haq selain zakat (HR Ibnu Majah no. 1789).*

Mereka mengatakan, hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban bagi seorang Muslim dalam hartanya selain zakat. Ini mencakup semua yang wajib atas harta. Ini menunjukkan kebolehan *al-kanzu* jika dikeluarkan zakatnya yang wajib.

Tentu tidak bisa demikian. Sebabnya, keharaman *al-kanzu* itu independen dari zakat. Hadis tersebut menghalangi wajibnya hak tambahan atas zakat. Ini tidak menghalangi adanya hukum tambahan terkait harta. *Al-Kanzu* termasuk hukum harta, bukan hak wajib dalam harta. Selain hukum zakat, *Asy-Syâri'* juga mensyariatkan hukum-hukum lain tentang harta seperti hukum riba dalam emas dan perak, hukum *sharf* dalam emas dan perak dan hukum *al-kanzu* dan lainnya. Karena *al-kanzu* bukanlah hak wajib dalam harta, maka hadis ini tidak ada hubungannya dengan *al-kanzu*.

Selain itu *matan* hadis ini *mudhtharib* (kacau). Sebabnya, riwayat dengan jalur yang sama (dari Syarik bin Abdullah dari Abu Hamzah al-A'war dari 'Amirm asy-Sya'bi dari Fathimah binti Qais dari Nabi saw.) redaksinya justru menetapkan adanya hak wajib dalam harta selain zakat. Misalnya riwayat at-Tirmidzi (w. 279 H) no. 659 dan 660; ath-Thahawi (w. 321 H) di dalam *Syarhu Musykal al-Âtsâr* no.3043; al-Baihaqi (w. 458 H) di dalam *As-Sunan al-Kubrâ* no. 7242 dan ad-Darimi (w. 255 H) di dalam *Sunan ad-Dârimî* no. 1677.

Dengan demikian keharaman *kanzu al-mâl* (menimbun emas, perak atau uang) bersifat mutlak, baik dikeluarkan zakatnya atau tidak.

*Wallâh a'lam bi ash-shawâb.* [Yoyok Rudianto]

# KEUMUMAN (REDAKSI) ITU SESUAI TOPIK PERISTIWA DAN PERMASALAHAN- NYA

الْعُمُومُ فِي خُصُوصِ مَوْضُوعِ الْحَادِثَةِ وَالسُّؤَالِ

**L**afal (ungkapan/redaksi) umum dalam suatu peristiwa atau jawaban atas pertanyaan berlaku umum menurut keumuman lafal itu. Tidak dikhususkan pada peristiwa atau pertanyaan itu saja. Hanya saja, bagaimana implementasi keumuman lafal dalam kekhususan sebab atau peristiwa tersebut? Apakah bersifat umum dan berlaku untuk apa saja? Atau berlaku umum secara terbatas?

Dalam hal ini Al-'Allamah al-Qadhi Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyah* Jilid 3 menjelaskan:

Sesungguhnya keumuman seruan (*khithâb*) dalam peristiwa dan jawaban atas pertanyaan tidak lain hanya berlaku umum sebatas sesuai dengan topiknyanya, bukan bersifat umum mencakup segala hal. Artinya, itu adalah umum untuk topik tertentu pada peristiwa itu dan yang semisal. Pada peristiwa kambing Maimunah, misalnya, jawabannya adalah tentang kulit

bangkai, sehingga mencakup kambing Maimunah dan yang lainnya, dengan topik peristiwanya, yaitu kulit bangkai. Pada peristiwa rida' Shafwan mencakup pencurian rida' Shafwan dan selain rida' Shafwan, dengan topik peristiwanya, yaitu pencurian. Pada peristiwa Salamah bin Shakhr mencakup Salamah dan yang lainnya, tetapi pada topik peristiwanya, yaitu *zhihaar*. Jadi keumuman tersebut tidak lain pada topik peristiwa dan tidak mencakup yang lainnya.

Demikian juga jawaban atas suatu pertanyaan. Dalam peristiwa sumur Budha'ah, Rasul saw. ditanya tentang bersuci dengan air sumur Budha'ah. Jawaban Rasul adalah tentang bersuci dengan air. Jadi mencakup sumur Budha'ah dan yang lainnya, tetapi dengan topik peristiwanya, yaitu bersuci. Sebabnya, topik pertanyaannya adalah tentang bersuci, yakni karena mereka bertanya tentang berwudhu. Maksud dari pertanyaan itu bukan tentang wudhu dalam sifat topik wudhu. Akan tetapi, pertanyaannya adalah tentang bersuci untuk wudhu sehingga topik pertanyaannya adalah bersuci dan bukan wudhu. Jawaban Rasul saw. atas pertanyaan itu bersifat umum mencakup semua air, tetapi pada topik bersuci, dan bukan umum mencakup segala hal. Oleh karena itu jawaban tersebut tidak memberi faedah hukum minum darinya.

Semisal itu adalah pertanyaan tentang air laut. Pertanyaannya adalah tentang bersuci. Sebabnya, mereka meski bertanya tentang wudhu maka yang dimaksud dari pertanyaan itu bukan wudhu dalam sifatnya sebagai wudhu saja, yakni mereka tidak bertanya tentang wudhu saja, melainkan mereka bertanya tentang bersuci untuk wudhu. Jadi topik pertanyaannya adalah tentang bersuci dan bukan wudhu. Jadi jawabannya bersifat umum tentang bersuci,



dan bukan umum pada segala hal sehingga tidak mencakup minum dari air tersebut.

Atas dasar itu, keumuman itu tidak lain terbatas berlau pada topiknja saja, topik peristiwa dan pertanyaan. Artinya, bersifat khusus pada topik itu dan tidak mencakup yang lainnya. Topik itu tidak masuk dalam kaidah: *Al-'Ibrah bi 'umûm al-lafzhi lâ bi khushûshi as-sabab*. Sebabnya, topik itu bukan sebab, yaitu bukan peristiwa dan bukan pertanyaan itu. Karena ucapan itu dinyatakan pada topik itu dan bukan atas yang lainnya maka ia bersifat khusus untuk topik tersebut. Sebabnya, lafal Rasul saw. itu terkait dengan topik pertanyaan dan topik peristiwa sehingga hukumnya terkait dengan topik itu. Jadi nas yang dikatakan pada peristiwa tertentu dan nas yang merupakan jawaban pertanyaan, maka wajib diberlakukan khusus pada topik pertanyaan atau peristiwa itu. Tidak boleh diberlakukan bersifat umum pada segala hal. Sebabnya, pertanyaan itu menjadi tempat kembali dalam jawaban tersebut, karena ucapan itu dalam topik tertentu sehingga hukumnya wajib dibatasi pada topik itu. Pasalnya, lafal Rasul saw. yang di dalamnya beliau menjelaskan hukum pertanyaan atau peristiwa adalah terkait dengan pertanyaan itu saja dan peristiwa itu saja, dan bukan berkaitan dengan yang lainnya sama sekali. Alasannya, hukum tersebut terkait dengan topik pertanyaan dan topik peristiwa itu, yakni terkait dengan perkara yang ditanyakan atau yang tentangnya terjadi peristiwa itu, dan bukan berkaitan dengan yang lainnya. Dengan demikian ia tidak bersifat umum mencakup selain topik tersebut, tetapi hanya khusus dengan topik itu.

Tidak dikatakan bahwa tempat kembalinya jawaban adalah pertanyaan sehingga jawaban itu khusus untuk pertanyaan itu saja. Tidak dikatakan demikian. Sebabnya, tempat kembali

jawaban itu bukan pertanyaannya, melainkan topik pertanyaannya. Dalam kasus sumur Budha'ah, kembalinya jawaban itu pada topiknja, yaitu bersuci dengannya, bukan sumur Budha'ah itu sendiri. Dalam kasus bangkai kambing Maimunah topiknja adalah pemanfaatan kulitnja, bukan kambing Maimunah itu sendiri. Oleh karena itu, jawaban dengan lafal umum itu adalah berlaku umum, tetapi berlaku khusus pada topiknja saja, yakni berlaku atas bersuci dengan air semisal air sumur Budha'ah, atau berlaku atas penyamakan kulit bangkai kambing manapun, yakni kulit bangkai hewan manapun yang boleh dimakan.

Dari semua itu dirumuskan kaidah: "*Al-Lafzhu al-'âm fi al-hâditsah aw as-su`âl fahuwa 'âmun fi mawdhû'i al-hâditsah aw as-su`âl khâshshan* (Lafal umum pada peristiwa atau pertanyaan maka bersifat umum pada topik peristiwa atau pertanyaan itu secara khusus).

Contohnya adalah firman Allah SWT:

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ

خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾

Katakanlah, "Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi—karena sesungguhnya semua itu kotor—atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah." (QS al-An'am [6]: 145).

Ayat ini merupakan bantahan atau komentar tentang topik yang dibicarakan, yakni dijelaskan dalam dua ayat sebelumnya. Topiknja adalah pengharaman delapan pasangan hewan ternak (sepasang kambing, sepasang domba, sepasang unta dan sepasang sapi), yang mana orang



Quraisy mengharamkan dari hewan ternak (kambing, domba, unta dan sapi) yang dilahirkan kembar sepasang, yang jantan diharamkan untuk wanita. Jadi makna ayat ini bersifat umum, namun khusus dalam topiknya, yaitu pengharaman hewan ternak kambing, domba, unta dan sapi. Jadi makna ayat tersebut adalah, tidak aku temukan dalam wahyu sesuatu dari hewan ternak (kambing, domba, unta dan sapi) yang kalian haramkan dan halalkan, yang diharamkan memakannya kecuali bangkai, darah yang mengalir, babi dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi ayat ini tidak berlaku umum untuk semua hewan atau untuk segala hal, melainkan hanya berlaku pada topiknya yaitu hewan ternak kambing, domba, unta dan sapi.

Contoh lainnya, Abu Bakrah ra. berkata:

لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ  
فَارِسَ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ  
يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»

*Ketika sampai kepada Nabi saw. bahwa orang Persia menobatkan putri Kiswa sebagai ratu, beliau bersabda, "Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusan kekuasaan mereka kepada perempuan." (HR al-Bukhari, at-Tirmidzi, an-Nasai dan Ahmad).*

Ini berlaku khusus pada topik yang beliau diucapkan, yaitu pengangkatan penduduk Persia atas seorang wanita sebagai ratu (penguasa). Artinya, ini khusus berlaku pada topik kepala negara, yakni kekuasaan, atau itu berlaku khusus pada pemerintahan dan tidak bersifat umum pada semua *wilāyah*. Sebabnya, *al-wilāyah* itu kadang dalam pemerintahan, anak kecil, *wishāyah* atas harta anak yatim, pelaksanaan peradilan, dsb. Jadi hukum dalam sabda Nabi saw. itu bersifat umum pada topiknya, yaitu *wilāyah al-hukmi* (kekuasaan pemerintahan). Oleh karena itu wanita boleh

menjadi pengurus harta anak yatim. Umar pun pernah menunjuk asy-Syifa', seorang wanita dari kaumnya, menandai *qadhā'u as-sūq* (menjabat *qaadhi hisbah*). Wanita juga boleh menjadi direktur, kepala sekolah dan posisi pemimpin selain jabatan (wewenang) kekuasaan atau pemerintahan.

Contoh lain, diriwayatkan dari Anas ra. bahwa Nabi saw melalui satu kaum yang sedang melakukan penyerbukan kurma. Lalu beliau bersabda:

«لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ». قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ  
فَقَالَ «مَا لِنَحْلِكُمْ». قَالُوا قُلْتِ كَذَا وَكَذَا قَالَ  
«أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ»

*"Andai mereka tidak melakukan penyerbukan niscaya akan menjadi baik." Anas berkata, "Kurma itu mengeluarkan (menghasilkan) kurma yang jelek." Lalu beliau melewati mereka dan beliau bertanya, "Apa yang terjadi pada kurma kalian?" Mereka berkata, "Anda berkata demikian dan demikian". Beliau pun bersabda, "Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian." (HR Muslim).*

Sabda Rasul saw., "*Antum a'lamu bi amri dunyākum* (Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian)" ini bersifat umum. Namun, hanya khusus pada topiknya, yaitu urusan dunia semisal penyerbukan kurma. Itu tidak mencakup perkara dalam topik yang lain semisal taktik, definisi, hukum syariah, dan selain perkara dunia yang semisal dengan penyerbukan kurma.

Demikianlah, lafal umum yang dinyatakan pada peristiwa tertentu atau jawaban atas pertanyaan tertentu, adalah berlaku umum, namun hanya khusus pada topik peristiwa atau topik pertanyaannya saja, dan tidak berlaku umum mencakup topik-topik lainnya atau segala hal.

*Wallāh a'lam wa ahkam.* [Yahya Abdurrahman]



# KONSTITUANTE: MENGGEVAKAN IDEOLOGI ISLAM

ngatan kaum Muslim di negeri ini saat dikhianati oleh kaum sekuler masih terekam jelas. Tanggal 18 Agustus 1945, penghapusan “tujuh kata” di Piagam Djakarta begitu membekas di relung hati umat Islam. Sebuah janji akan diadakan sebuah penentuan kembali ihwal dasar negara, kelak. Dewan Konstituante ternyata jawabannya.

Umat Islam, yang direpresentasikan oleh beberapa partai yang tergabung dalam Faksi Islam memahami jelas, bahwa inilah waktu yang tepat untuk kembali meneruskan langkah perjuangan itu. Menggemakan Ideologi Islam sebagai pondasi dalam tata kenegaraan.

Hadji Muhammad Isa Anshari dari Fraksi Masjumi mengingatkan, ketika berpidato, akan pentingnya menjadikan diri tiada congkak kepada Sang Maha Kuasa:

*“Akan tetapi, Saudara Ketua, mengapa setelah kita merdeka, setelah kita mendapatkan kemenangan dan kedjajaan, setelah kita bernegara berdaulat keluar dan ke dalam,*

*setelah kita mendapatkan kedudukan dan pangkat, setelah kita mendapatkan kekuasaan, achirnja kita menjadi tjongkok dan sombong membusungkan dada; berkata segala kemegahan diri; mengaku dengan segala keanguhannya, bahwa kemenangan dan kemerdekaan jang kita miliki sekarang, hanjalah hasil dan buah dari ketjakaan, kekuatan dan perdjjuangan kita sendiri.”*

Kemerdekaan adalah sebuah rahmat yang perlu dan patut disyukuri. Namun, bukan berarti selesai perjuangan. Justru di titik itulah terjadi peningkatan dalam ketaatan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Pencipta. Bukan malah menjadi congkak dan menolak Islam dalam tata aturan kenegaraan.

Hadji Mohammad Thaha dari Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) menyatakan:

*“Djadi kalau orang Islam mengatakan, ia menolak Islam karena tidak sesuai lagi, ini Saudara-Saudara kami tanjakan, tidak sesuai itu apa? Apakah Tuhan tidak mampu mengatur kita ini? Apakah hanya mampu mengatur djaman dahulu? Ataukah karena kita tidak mampu menjesuaikan diri kita dengan ketentuan-ketentuan Islam, karena kita tidak suka beragama? Itu mungkin ada kebenarannya.”*

Faksi Pantja Sila jelas menolak dasar Islam. Mereka lebih memiliki paham sekuler untuk diterapkan. Moh. Natsir dari Fraksi Masjumi pun mencoba menjelaskan kedigdayaan paham agama dibandingkan paham sekuler. Menurut Natsir,

*“Paham agama-agama adalah sebaliknja. Ia memberikan dasar jang terlepas dari relativisme. Inilah sebabnja mengapa konsepsi “humanity” jang berdasarkan atas*

*agama, lebih logis, lebih meliputi, dan lebih memuaskan. Pahami agama memberikan dasar yang tetap, yang tidak berubah.”*

la menambahkan:

*“Segala yang bergerak dan berubah harus mempunyai dasar yang tetap, harus mempunyai apa yang dinamakan point of reference, titik tempat memulangkan segala sesuatu. Jika tidak ada dasar yang tetap maka nistjaja krisis atau bentjana akan timbul.”*

Agama sebagai pondasi bernegara adalah mutlak. Apalagi Islam sebagai agama dan ideologi. Demikian sebagaimana yang disampaikan K.H. Masjkur dari Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.):

*“Unsur-unsur Islam yang praktis itu Saudara Ketua, semuanya mempunyai dasar-dasar yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada mahkamah sedjarah dan mempunyai sumber-sumber yang jelas dan njata.”*

la memahami bahwa Islam tidak sekadar agama ritual belaka, namun juga sebuah tata aturan dalam berkehidupan termasuk bernegara. la melanjutkan:

*“Memang sesungguhnya, Saudara Ketua, unsur-unsur Islam bagi hidup dan penghidupan manusia tidak saja mempunyai sjarat-sjarat dunia modern, tetapi juga sudah diakui bahwa dunia Islam itu bukan semata-mata agama dalam arti ibadat saja, tetapi suatu “way of life”, suatu djalan hidup.”*

Bahkan K.H. Masjkur mengajak orang-orang yang kontra untuk kembali mendalami Islam secara tepat dan benar, “Supaja lebih mejakinkan hati Saudara-Saudara untuk menerima Islam sebagai Dasar Negara, maka

di sini saja mengajak Saudara-Saudara supaja mempeladjar Islam dengan sedalam-dalamnja dari sumbernja yang resmi, djangan diambil dari dongeng-dongeng dari kata-kata Shahibul hikajat; apalagi djika ditafsirkan sesuai dengan tafsiran kolonial Belanda, yang menganggap Islam sebagai momok. Tidak usah kita tergesa-gesa, tempo masih tjukup untuk mempeladjar Islam dengan sedalam-dalamnja.”

*Tentang ketegasan menggemakan Ideologi Islam juga begitu jelas. Sebagaimana yang disampaikan oleh K.H. Masjkur, “Bagi Nahdlatul Ulama (N.U.) dan kawan-kawan seideologi Islam memperjuangkan Islam sebagai Dasar Negara adalah keharusan dan kewadajiban yang mutlak”.*

Pernyataan Hadji Saifuddin Zuhri pun senada dengan K.H. Masjkur:

*“Tentang Islam, Alhamdulillah, kami telah banjak tahu dan mengerti, bahkan bagi kami tidak ada keragu-raguan barang sedikit pun kejakinan kami kepadanya, sehingga oleh sebab itu setjara tegas telah dikemukakan oleh semua Fraksi-fraksi Islam dalam sidang yang mulia ini untuk diterima mendjadi Dasar Negara kita.”*

Begitulah, sekelumit kisah rekam jejak Faksi Islam yang menggema di Sidang Konstituante. Ideologi Islam yang mereka usung dan gemakan terus menerus, tanpa terkecuali. [Penulis: Muhammad Imadudin Siddiq/Editor: Muhammad Afifuddin Al Fakkar].

### Sumber dan Daftar Pustaka

- Jakarta. RI, 1958. *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante djilid 1*. Indonesia.
- Jakarta. RI, 1958. *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante djilid 2*. Indonesia.
- Jakarta. RI, 1958. *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante djilid 3*. Indonesia.



# JEJAK KHILAFAH DI SULAWESI

## Menyibak Jalinan Politik dan Spiritual yang Dilupakan<sup>1</sup> (Bagian 9)

**Nicko Pandawa<sup>2</sup>**

### 2. Jalur Banten

Bukti alur pentahbisan sultan-sultan Sulawesi Selatan yang berasal dari Makkah-Utsmaniyah bisa kita lihat di fase berikutnya melalui Kesultanan Banten. Setelah Kesultanan Gowa dipimpin Sultan 'Ala'uddin Tumamenang ri Gaukanna selama 46 tahun, pucuk kepemimpinan diambil-alih anaknya, I Manunntungi Daeng Mattola (berkuasa 1639-1653). Gelar Islamnya adalah Sultan Muhammad Malik as-Sa'id. Gelar ini disebut dalam *Lontara' Bilang Raja Gowa* sebagai sebuah pemberian dari Makkah (*anne karaeng uru nigallaraq ri Makka nikana Moammad Saed arena memang nikana Malikosaid*).<sup>1</sup>

*Lontara' Bilang Raja Gowa* tidak mengungkap bagaimana prosesi penganugerahan gelar "sultan" itu berlangsung. Justru kita akan mendapat banyak keterangan mengenai hal demikian dalam sumber *Sajarah Banten*. *Sajarah Banten* adalah sumber primer sejarah Kesultanan Banten. Ia ditulis oleh

Sandisastra berdasarkan riwayat Ki Sandimaya, seorang sesepuh yang punya banyak pengetahuan sejarah. *Sajarah Banten* selesai ditulis pada tahun 1662 atau 1663,<sup>2</sup> bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Abu'l-Fath 'Abdul Fattah, yang terkenal dengan julukan Sultan Ageung II ing Tirtayasa (berkuasa 1651-1682).

Sebelum kita masuk dalam pembahasan *Sajarah Banten* yang menggambarkan prosesi pemberian gelar "sultan" dari Khilafah 'Utsmaniyah-Syarif Makkah-Sultan Banten-Karaeng Gowa, mari kita perhatikan silsilah Sultan Ageung II ing Tirtayasa sebagaimana yang tertera dalam cap resminya: (a) al-Watsiq Billah as-Sulthan Abu'l-Fath *bir*; (b) as-Sulthan Abu'l-Ma'ali *bir*; (c) as-Sulthan Abu'l-Mafakhir *bir*; (d) Muhammad *bir*; (e) Yusuf *bir*; (f) Hasanuddin.<sup>3</sup>

Dalam silsilah tersebut, Sultan Ageung II ing Tirtayasa alias Sultan Abu'l-Fath menyertakan nasabnya sampai lima orang ke

## Tarikh

atas. Terlihat hanya dirinya, ayahnya (Sultan Abu'l-Ma'ali) dan kakeknya (Sultan Abu'l-Mafakhir) yang menggunakan gelar "Sultan". Adapun buyut-buyutnya (Muhammad, Yusuf, Hasanuddin) yang merupakan tiga penguasa awal Banten hanya disebut nama tanpa ada gelar "Sultan". Pada titik ini kita perlu menyorotkan pandangan secara khusus kepada sosok Sultan Abu'l-Mafakhir (berkuasa 1624-1651). Sebabnya, bermula dari posisinya dirinyalah gelar "Sultan" dalam urutan raja-raja Banten pertama kali dipakai, sebagaimana yang tertera dalam cap cucunya.



Cap-cap resmi Kesultanan Banten. (Kiri) Cap Sultan Abu'l-Fath 'Abdul Fattah, alias Ageung II ing Tirtayasa;

(kanan) Cap Sultan Abu'l-Mafakhir 'Abdul Qadir, alias Ageung I ing Surasowan ketika masih bergelar "Pangeran Ratu". Sumber: Gallop 2019, 661.

Nama asli Sultan Abu'l-Mafakhir adalah 'Abdul Qadir bin Muhammad. Sebenarnya ia sudah diangkat menjadi penguasa Banten sejak tahun 1596 setelah ayahnya, Maulana Muhammad, syahid dalam perang di Palembang. Namun, saat itu 'Abdul Qadir masih sangat belia sehingga urusan pemerintahan dijalankan oleh para mangkubumi Banten. 'Abdul Qadir mulai efektif berkuasa tanpa perwalian mangkubumi pada tahun 1624. Ia juga punya cap resmi

sendiri yang dibuat sebelum/sekitar tahun 1628. Sebagaimana cap cucunya, Sultan Ageung II ing Tirtayasa, 'Abdul Qadir juga menyematkan nasabnya lengkap sampai Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati), pendiri Negara Banten yang berasaskan syariah Islam. Hanya saja, cap tersebut berpahatkan tulisan dan bahasa Jawa, yakni:

- Ngalamat Pangeran Ratu ingkang pandara ngadi Surasowan kang putra*, (Cap Pangeran Ratu 'Abdul Qadir penguasa agung di Surasowan, anak);
- Pangeran Sedangrana kang putu*, (Pangeran Muhammad, cucu);
- Pangeran Pasareyan kang buyut*, (Pangeran Yusuf, cicit);
- Pangeran Sabakingking ing Surasowan* (Pangeran Hasanuddin di Surosowan).<sup>4</sup>

Cap di atas mengisyaratkan bahwa sejak pendirian Banten oleh Hasanuddin hingga era 'Abdul Qadir, para penguasanya belum digelar sebagai "Sultan", melainkan masih "Pangeran

Ratu" atau "Pangeran". Kalau begitu, dari mana Pangeran Ratu 'Abdul Qadir mendapat gelar "Sultan" sebagaimana yang diisyaratkan dalam cap Sultan Ageung II ing Tirtayasa? **[Bersambung]**

### Catatan kaki:

<sup>1</sup> William P. Cummings, *A Chain of Kings*, 47, 79.

<sup>2</sup> Hoesein Djajadiningrat, *Tinjauan*

*Kritis Tentang Sejarah Banten: Sumbangan Bagi Pengenalan Sifat-Sifat Penulisan Sejarah Jawa*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1983), 8-11.

<sup>3</sup> Annabel The Gallop, *Malay Seals from the Islamic World of Southeast Asia: Content, Form, Context, Catalogue*, (Jakarta: The Lontar Foundation & The British Library, 2019), 661 (#1941).

<sup>4</sup> *Ibid*, 661 (#1940).



Istana Ishak Pasha adalah warisan bersama tidak hanya Ağrı dan Turki, tetapi seluruh dunia. Arsitekturnya milik peradaban Ottoman, Persia dan Seljuk, ia membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan.



Istana Ishak Pasha lebih dari sebuah istana. Ini adalah sebuah kompleks. Ini adalah istana paling terkenal yang dibangun pada periode terakhir setelah Istana Topkapi di Istanbul.



Jaraknya 5 km dari Distrik Doğubeyazıt. Istana yang dibangun di atas bukit di lereng gunung di sebelah timur ini merupakan bangunan monumental besar terakhir Kesultanan Utsmaniyah di Era Tulip. abad ke-18. Bangunan ini bernilai tinggi dalam sejarah seni. Menurut Prasasti Takkapi dari Kamar Harem Istana, tanggal pembangunannya adalah 1199 Hijriah, 1784 Masehi.

Tanah tempat bangunan keraton berada di sisi lembah, tanahnya berbatu dan keras. Meski berada di tengah kota tua Beyazıt, fasad utara, barat, dan selatan, bangunan ini curam dan miring. Ada dataran yang cocok hanya di sisi timur dan ada gerbang



Masjid Istana Ishak Pasha yang berusia 234 tahun ditutup untuk beribadah. Sebagai hasil pemugaran, dibuka untuk beribadah pada tahun 2015, sekitar 100 tahun kemudian.



Istana adalah tempat kastil kehilangan harta bendanya. Karena dibangun pada zaman senjata api, ia hanya memiliki sedikit pertahanan terhadap perbukitan di timur. Pintu kalimat adalah titik terlemah dalam hal pertahanan. Bagian gerbang kalimat tidak berbeda dengan istana-istana yang didirikan di Istanbul dan Anatolia, dan terlihat rapi dari segi pa-



Sangat sedikit contoh istana Turki di Turki saat ini. Istana dan Kompleks Ishak Pasha adalah salah satunya.

Istana ini terdiri dari 14 bagian arsitektur:  
1. Eksterior, 2. Halaman pertama dan kedua, 3. Perempat Selamlık, 4. Bangunan masjid, 5. Dapur umum (Darüzzıyafe), 6. Pemandian Turki, 7. Ruang harem, 8. Ruang upacara dan hiburan, 9. Takkapılar, 10. Gudang senjata dan ruang persediaan, 11. Bangunan makam, 12. Oven, 13. Penjara bawah tanah, 14. Beberapa bagian arsitektur interior (pintu, jendela, lemari, serbat, perapian, dll.)



Istana ini memiliki keistimewaan yang memadukan gaya arsitektur peradaban Ottoman, Persia dan Seljuk.

